

KEPENDUDUKAN INDONESIA

The Impact of Gendered Labor Migration on Children's Growth: A Case of Indramayu Regency, West Java Province, Indonesia

Titan Listiani

Indonesian Return Migrants Entrepreneurship at Home Village: Knowledge Production and Living Strategy

Paulus Rudolf Yuniarto

Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap Employment Transition: Analisis Sektor Formal dan Informal pada Tingkat Individu di Pulau Jawa

Beni Teguh Gunawan

Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan

Deshinta Vibriyanti

Keterkaitan Transfer Pemerintah untuk Perlindungan Sosial terhadap Perilaku Merokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia

Diyang Gita Cendekia

Pengetahuan Penduduk terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana Merapi

Laksmi Rachmawati



LIPI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 13	No. 2	77- 156	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1907-2902
-------------------------------	---------	-------	---------	---------------------------	-------------------

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi Dewan Redaksi

Prof. Dr. Aswatini, MA
Dra. Mita Noveria, MA
Widayatun, SH, MA
Dra. Ade Latifa, M.Hum
Zainal Fatoni, MPH
Meirina Ayumi Malamassam, S.Si, M.Sc, MSR
Laksmi Rachmawati, S.E, M.Ec.Dev
Intan Adhi Perdana Putri, M.Si
Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ
Tria Anggita Hafsari, S.Si
Ari Purwanto Sarwo Prasajo, S.Si
Puji Hartana, S.Sos

Mitra Bestari

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore, Singapore
Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University, Japan
Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University, Australia
Prof. Ben White, Ph.D, Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherland
Prof. Yoshifumi Azuma, Ph.D, Associate Professor, School of Human and Social Sciences, Ibaraki National University, Japan
Haidong Wang, Ph.D, Assistant Professor, Institute of Health Metrics and Evaluation, Department of Global Health, University of Washington, United States
Dr. L.G.H. Laurens Bakker, Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, Netherlands
Salahudin Muhidin, Ph.D, Faculty of Business and Economics, Macquarie University, Australia
Dr. Triarko Nurlambang, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. Irwan M. Hidayana, Fakultas FISIP, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. Wendy Hartanto, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Dr. Drs. Semiarti Aji Purwanto, M.Si, Universitas Indonesia, Indonesia
Sri Irianti, SKM, M.Phil, Ph.D, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Indonesia
Evi Nurvidya Arifin, Ph.D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia
Dr. Drs. Chotib M.Si, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Dr. dr. Sabarinah B. Prasetyo, M.Sc, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Indonesia
Sukamdi, M.Sc, Ph.D, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Dr. Edy Priyono, ME, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Prof. Drs. Heru Santosa, M.S, Ph.D, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Dr. Hardius Usman, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Indonesia
Dr. Tiodora Hadumaon Siagian, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Indonesia
Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan LIPI, Indonesia
Dr. Makmuri Sukarno, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Augustina Situmorang, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Drs. Soewartoyo, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Deny Hidayati, MA, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Indonesia
Dr. Djoko Hartono, Konsultan Bank Dunia, Indonesia
Dr. Zuzy Anna, Padjajaran University, Indonesia
Dra. Wati Hermawati, M.Hum., Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK-LIPI
Dr. Dyah Rahmawati Hizabaron, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Helena Rea, MA, BBC Media Action
Dra. Titik Handayani, M.Si

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Kependudukan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha LIPI, lantai X
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
Tromol Pos 250/JKT 1002,
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
Fax: +62 21 5207205
E-mail: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
Website: <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id>;
www.kependudukan.lipi.go.id

Penerbit

Pusat Penelitian Kependudukan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha LIPI, lantai X
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



The Impact of Gendered Labor Migration on Children's Growth: A Case of Indramayu Regency, West Java Province, Indonesia

Titan Listiani

Indonesian Return Migrants Entrepreneurship at Home Village: Knowledge Production and Living Strategy

Paulus Rudolf Yuniarto

Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap Employment Transition: Analisis Sektor Formal dan Informal pada Tingkat Individu di Pulau Jawa

Beni Teguh Gunawan

Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan

Deshinta Vibriyanti

Keterkaitan Transfer Pemerintah untuk Perlindungan Sosial terhadap Perilaku Merokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia

Diyang Gita Cendekia

Pengetahuan Penduduk terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana Merapi

Laksmi Rachmawati



JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2018

DAFTAR ISI

The Impact of Gendered Labor Migration on Children's Growth: A Case of Indramayu Regency, West Java Province, Indonesia <i>Titan Listiani</i>	77-88
Indonesian Return Migrants Entrepreneurship at Home Village: Knowledge Production and Living Strategy <i>Paulus Rudolf Yuniarto</i>	89-102
Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah terhadap Employment Transition: Analisis Sektor Formal dan Informal pada Tingkat Individu di Pulau Jawa <i>Beni Teguh Gunawan</i>	103-116
Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan <i>Deshinta Vibriyanti</i>	117-132
Keterkaitan Transfer Pemerintah untuk Perlindungan Sosial terhadap Perilaku Merokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia <i>Diyang Gita Cendekia</i>	133-142
Pengetahuan Penduduk terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana Merapi <i>Laksmi Rachmawati</i>	143-156



Vol. 13, No. 2, Desember 2018

Titan Listiani

DAMPAK MIGRASI TENAGA KERJA BERBASIS GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK: KASUS KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT

*Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 77-88*

Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam rumah tangga. Secara tradisi, laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah pengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, ketidakhadiran seorang ayah atau ibu akan memberikan dampak kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan mengambil fokus kepada dampak migrasi orang tua terhadap anak yang masih kecil, kajian ini meneliti bagaimana ketidakhadiran seorang ayah atau ibu secara berbeda memengaruhi pertumbuhan anak-anak. Kajian ini juga mengevaluasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), layanan bantuan masyarakat untuk peningkatan kesehatan di Indonesia, dalam pertumbuhan anak-anak. Survei dilakukan di Kabupaten Indramayu, salah satu wilayah dengan persentase TKI tertinggi di Indonesia. BNPTKI melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2011 sampai 2015, lebih dari 131 ribu pekerja migran telah diberangkatkan dari Indramayu. Indikator pertumbuhan anak menggunakan ukuran antropometrik berdasarkan standar pertumbuhan WHO tahun 2006. Kajian ini menemukan bahwa migrasi tenaga kerja berbasis gender cenderung memiliki dampak yang berbeda terhadap anak-anak. Migrasi ayah cenderung memengaruhi pertumbuhan anak-anak secara positif. Sementara itu, migrasi ibu tidak ditemukan sebagai faktor yang berpengaruh sebab manfaat migrasi dalam bentuk remitan tereduksi dengan ketidakhadiran ibu untuk merawat anak secara langsung. Temuan studi ini juga memperlihatkan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan anak-anak dan dapat

menjadi strategi dalam mengurangi dampak negatif migrasi terhadap mereka.

Kata Kunci: Migrasi tenaga kerja berbasis gender, dampak migrasi, anak yang ditinggalkan, pertumbuhan anak-anak

Paulus Rudolf Yuniarto

PRODUKSI PENGETAHUAN DAN STRATEGI KEWIRAUSAHAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA DI DESA ASAL

*Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 89-102*

Artikel ini membahas kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang telah kembali ke kampung halaman. Studi dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tulisan membahas hubungan antara pengalaman migrasi dan strategi adaptasi PMI Purna yang terkait erat dengan proses reintegrasi ekonomi. Dengan metode wawancara mendalam dan observasi, studi ini memperlihatkan beberapa temuan menarik. Pertama, kewirausahaan PMI Purna adalah suatu hasil dari proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketika akan dan sedang bekerja di luar negeri. Kedua, PMI Purna menghadapi beberapa tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai di desa, antara lain upaya membangun jaringan dengan kolega/teman serta kesulitan memenuhi harapan ekonomi keluarga seperti saat bekerja ke luar negeri. Ketiga, reintegrasi ekonomi ternyata sulit bagi PMI Purna karena minimnya dukungan pengembangan keahlian yang dapat memaksimalkan penghasilan/tabungan (remitan). Keempat, di sisi lain, kewirausahaan PMI Purna dapat juga diasosiasikan dengan transformasi diri dan strategi hidup di desa. Artinya PMI Purna mengalami ‘kelahiran kembali’ lewat pengetahuan dan pekerjaan baru yang diperoleh, pemanfaatan pengalaman ekonomi serta mobilitas ekonomi mereka. Dapat disimpulkan

bahwa kombinasi dukungan finansial dan pengetahuan menjadi wirausaha menjadi aset berharga dalam upaya reintegrasi ekonomi PMI Purna di desa.

Kata Kunci: reintegrasi ekonomi, PMI Purna, kewirausahaan.

Beni Teguh Gunawan

PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP EMPLOYMENT TRANSITION: ANALISIS SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL PADA TINGKAT INDIVIDU DI PULAU JAWA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 103-116

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi fenomena politik yang diduga berdampak ke berbagai sektor lainnya, tak terkecuali sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komoditas yang menarik untuk dijual oleh kepala pemerintahan, sehingga sektor inipun rentan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu. Alasan ekonomi acapkali digunakan oleh calon kepala daerah melalui janji untuk menyediakan lapangan kerja, sehingga relatif lebih mudah menarik simpati para pengangguran. Tulisan ini memaparkan hasil kajian tentang dampak adanya pilkada terhadap employment transition. Dampak yang dilihat adalah perubahan sektor pekerjaan pada saat setahun sebelum pilkada dilakukan (t-1) hingga tahun yang sama saat pilkada dilakukan (t). Kajian ini menganalisis data sensus penduduk tahun 2010 dengan pendekatan analisis multinomial logit (MNL). Hasil empiris menunjukkan bahwa pilkada tingkat kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap transisi dari tidak bekerja menjadi bekerja di sektor informal dan formal. Sementara individu yang sebelumnya telah bekerja di sektor formal cenderung bertahan di sektor tersebut. Namun di sisi lain, pilkada tingkat kabupaten/kota ternyata tidak berdampak signifikan terhadap individu yang sebelumnya bekerja di sektor informal.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, ketenagakerjaan, formal, informal, Jawa

Deshinta Vibriyanti

SURABAYA MENUJU KOTA RAMAH LANSIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 117-132

Peningkatan jumlah lansia secara global dan nasional membawa implikasi yang luas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia (Aged Friendly Cities Guideline) untuk merespons dua fenomena demografi yaitu penuaan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain menjaga kualitas kesehatan, lansia membutuhkan lingkungan baik fisik maupun sosial yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas dan tipe aktivitas lansia. Hal tersebut memungkinkan lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan, berinteraksi, dan meng-aktualisasikan diri secara optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang berpenduduk tua agar dapat menyandang predikat kota ramah lansia. Data yang digunakan berasal dari penelitian Tim Lansia Puslit Kependudukan LIPI tahun 2016 di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder seperti data Susenas 2016, 2017 dan Sakernas 2015. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan stakeholder, observasi dan studi literatur. Studi ini memperlihatkan bahwa Kota Surabaya memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat menyandang predikat kota ramah lansia karena adanya peraturan daerah, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait lansia, dan komitmen kepala daerah yang tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Surabaya adalah fasilitas fisik yang kurang memadai, kondisi perumahan, dan kesempatan kerja bagi lansia. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja nyata dari segenap elemen kota, pemerintah dan pihak swasta.

Kata kunci: kota ramah lansia, pelayanan untuk lansia, kota Surabaya.

Diyang Gita Cendekia

KETERKAITAN TRANSFER PEMERINTAH UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU MEROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 133-142

Indonesia memiliki proporsi penduduk produktif yang relatif tinggi. Mengurangi konsumsi rokok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal manusia, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi untuk rokok merupakan pengeluaran kedua terbesar pada rumah tangga miskin setelah beras. Di sisi lain, rumah tangga miskin juga mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan banyaknya jenis program bantuan perlindungan sosial yang diterima dengan perilaku merokok pada rumah tangga miskin. Dengan metode regresi linier berganda, hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel banyaknya jenis bantuan perlindungan sosial yang diterima memiliki keterkaitan terhadap rata-rata rokok yang dikonsumsi kepala rumah tangga (KRT) pada rumah tangga miskin. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa KRT pada rumah tangga miskin yang menerima tiga jenis program bantuan perlindungan sosial sekaligus, yaitu Raskin, BLT, dan BSM memiliki rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu lebih besar dibandingkan dengan KRT pada rumah tangga miskin yang sama sekali tidak mendapatkan program bantuan perlindungan sosial.

Kata kunci: Kemiskinan, Program Perlindungan Sosial, Rokok

Laksmi Rachmawati

PENGETAHUAN PENDUDUK TERHADAP PETA KAWASAN RAWAN BENCANA DAN MITIGASI BENCANA MERAPI

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, Desember 2018, Hal 143-156

Risiko bencana erupsi gunung api makin meningkat dari waktu ke waktu akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat dan bermukim di sekitar gunung api. Selain itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah ini juga makin meningkatkan kerentanan penduduk akan bencana erupsi gunung api. Pilihan untuk tetap tinggal di sekitar gunung api seharusnya diikuti pula dengan pengetahuan akan bencana yang direfleksikan pada pengetahuan kawasan rawan bencana (KRB) dan status gunung api sebagai bagian dari peringatan dini. Namun, pada kenyatannya pemahaman akan kawasan rawan bencana dan peta bencana masih terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi terhadap peta kawasan rawan bencana dan pemahaman akan kawasan rawan bencana di Merapi terkait dengan upaya mitigasi. Selain itu, upaya untuk mengkomunikasikan risiko dengan memperhatikan pendekatan Living in harmony with environment juga dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh akan pengetahuan peta rawan bencana dan sistem peringatan dini yang merupakan salah satu kegiatan mitigasi penduduk. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2012 dan 2014 dengan pendekatan kualitatif (wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi) dan pendekatan kuantitatif (survei pada 600 responden yang tersebar merata di wilayah KRB III-I dan luar KRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54 persen responden mengetahui tentang kawasan rawan bencana. Selain itu, dari responden yang tahu tentang kawasan rawan bencana, hanya 49 persen yang pernah melihat peta kawasan rawan bencana (KRB). Perubahan peta KRB akibat perubahan penamaan zonasi dan kejadian erupsi 2010 diindikasikan menjadi salah satu faktor keterbatasan pemahaman kawasan rawan bencana. Selain itu, sosialisasi informasi dan persepsi masyarakat akan kawasan yang dianggap aman juga menjadi faktor lain yang didiskusikan dalam artikel ini. Oleh karena itu strategi komunikasi risiko yang lebih efektif, dan mengintegrasikan

peringatan dini secara spasial (peta KRB) dan status Merapi serta penerimaan akan peringatan dini secara tradisional menjadi sebuah keharusan untuk mitigasi bencana Merapi.

Kata kunci: peta rawan bencana, pengetahuan penduduk, mitigasi bencana gunung api, komunikasi risiko



Titan Listiani
**THE IMPACT OF GENDERED LABOR
MIGRATION ON CHILDREN'S GROWTH:
A CASE OF INDRAMAYU REGENCY,
WEST JAVA PROVINCE, INDONESIA**
Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.13, No. 2, December 2018, Page 77-88

Men and women have different roles in the household. Traditionally, men are the breadwinners and women are the caretakers of the household. Therefore, the absence of a father or a mother will bring some effects on the family left behind. By focusing on the impact of parental migration on young children, this paper examines how the absence of a father or a mother may differently influence children's growth. The paper also evaluates the role of the Integrated Health Service Post (Pos Pelayanan Terpadu, henceforth Posyandu - a community assistance service for health improvement in Indonesia) in children's growth. The survey was conducted in Indramayu Regency, one of the regions in Indonesia with the highest percentage of labor migrants. BNP2TKI reported that more than 131 thousand migrants were departing from Indramayu between 2011 and 2015. The indicator of children's growth in this study used the anthropometric measurements based on the 2006 WHO growth standards. This study finds that gendered labor migration tends to have different impacts on children. Father's migration tends to influence the children's growth positively. However, mother's migration has not been found to be as an influential factor since the advantage of remittances is canceled out by the absence of mothers. The findings also show that Posyandu plays a significant role in improving the growth of children and can be an effective strategy to reduce undesired effects of migration on them.

Keywords: Gendered labor migration, the impact of migration, left-behind children, children's growth

Paulus Rudolf Yuniarto
**INDONESIAN RETURN MIGRANTS
ENTREPRENEURSHIP AT HOME VILLAGE:
KNOWLEDGE PRODUCTION AND LIVING
STRATEGY**
Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.13, No. 2, December 2018, Page 89-102

This paper explores the phenomenon of Indonesian return migrant and entrepreneurship issues to their hometown in Malang Regency, East Java. It discusses the linkage between migration experiences and adaptation strategies in the economic reintegration of return migrant in home village. By using interviews and observations, the paper concludes some interesting issues. Firstly, the return migrants' entrepreneurship is the process of accumulating knowledge that acquired before and during migration. Secondly, the return migrants face several challenges including finding appropriate jobs in their villages of origin, including efforts to establish networking with former colleagues and friends as well as difficult to meet their family members' economic needs. Thirdly, economic reintegration is particularly difficult for the return migrants when their home villages' infrastructures are not well developed. Four, on the other sides, the return migrants maximize revenues/saving and social remittances for entrepreneurship associated with self-transformation and living strategy at home villages. The return migrants undergo 'rebirth' by acquiring new knowledge and occupations, utilizing their economic experiences and mobility, and reintegrating themselves into society both socially and economically. In conclusion, the combination of financial support and social remittance of migrant workers is a valuable asset for economic reintegration of the return migrants.

Keywords: economic reintegration, return migrant, entrepreneurship.

Beni Teguh Gunawan

THE EFFECT OF LOCAL ELECTION ON EMPLOYMENT TRANSITION: ANALYSIS OF FORMAL AND INFORMAL SECTORS AT INDIVIDUAL LEVEL IN JAVA ISLAND

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, December 2018, Page 103-116

Local elections (pilkada) have become a political phenomenon which presumably may impact other sectors, including the employment and labour sector. This sector is one of the attractive commodities to be sold by the head of government, thus vulnerable to the interests of certain parties. Economic rationale is all too often used by the electoral candidate through promises to provide employment, and making it easier to attract sympathy from the unemployed. This paper presents the results of the study about the impact of the election on the employment transition. The analysed impact is the change in the employment sector one year before the election (t-1) until the year in which election was hold (t). This study analyzes the 2010 population census data with a multinomial logit (MNL) analysis approach. Empirical results show that district elections have a positive and significant effect on the transition from unemployment to working in the informal and formal sectors. While individuals who have previously worked in the formal sector tend to survive in the sector. On the other hand, it turns out that the district elections did not have a significant impact on individuals who previously worked in the informal sector

Keywords: local election, employment formal, informal, Java

Deshinta Vibriyanti

SURABAYA TOWARD AGE-FRIENDLY CITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, December 2018, Page 117-132

Increasing number of the elderly globally and nationally has broad implications in family, community and state. WHO issued an age-friendly cities guideline to respond two demographic phenomena, namely aging population and high levels of urbanization. To maintain the quality of health, the elderly need both physical and social environments

that consider their characteristics and needs. This facilitates the elderly to access the services, interact with others and actualize themselves optimally. This study aims to analyze the opportunities and challenges faced by Surabaya as one of the ageing population city in Indonesia to be an age-friendly city. Data was collected through quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach use several secondary data at the provincial and city levels such as the 2016 Susenas data, 2017 and the 2015 Sakernas. The qualitative approach include interviewing stakeholders, observing, and reviewing literature. This study concludes that Surabaya has an opportunity to be an age-friendly city. This is because Surabaya has local regulation that support fulfillment of elderly need, the existence of elderly institution, and the committed local leader to support the elderly. However, there are still many challenges faced by the Surabaya City, particularly related to inadequate physical facilities, housing, and employment opportunities for the elderly. It requires commitment and support from all elements of the city, public and private sector.

Keywords: age-friendly cities, elderly services, Surabaya

Diyang Gita Cendekia

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT TRANSFERS FOR SOCIAL PROTECTION ON SMOKING BEHAVIOUR AMONG POOR HOUSEHOLDS IN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, December 2018, Page 133-142

Indonesia has a relatively high proportion of the productive population. Decreasing the number consumption of cigarette is one of the ways to improve human capital, productivity, and wealth. The report published by Statistics Indonesia states that cigarettes expenditure is the second largest expenditure in poor households. On the other hand, poor households also get government social protection programs to help them get out of poverty. Therefore, this study aims to determine the association of the number types of social protection assistance programs received with smoking behaviour in poor households. By using multiple linear regression method, the results of this study found that the variables of the number types of social protection assistance received are related to the average of cigarettes consumed by the head of household in poor

households. Besides, the study found that head of household in poor households who received three types of social protection assistance programs at once (Raskin, BLT and BSM) had a greater weekly average of cigarettes consumption than that of households in the same poor household that did not get any social protection assistance program.

Keywords: Poverty, Social Protection Program, Cigarettes

areas considered safe are also other factors discussed in this paper. Therefore a more effective risk communication strategy, which integrates spatial early warning (KRB map), Merapi alert status and traditional acceptance of early warning becomes a necessity for Merapi disaster mitigation..

Keywords : hazard map, people's knowledge, volcanic hazard mitigation, risk communication.

Laksmi Rachmawati

PEOPLE'S KNOWLEDGE ON HAZARD MAP AND MERAPI HAZARD MITIGATION

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.13, No. 2, December 2018, Page 143-156

The risk of volcanic disasters is increasing over time due to population growth and the increase of settlements around volcanoes. In addition, the centres of economic growth and infrastructure development around this area also further increase the vulnerability of the population living around of the volcano. The choice to live around volcanoes should be followed by knowledge on hazard, hazard zone and the alert status of a volcano as part of the early warning system platform. However, in reality, the understanding of hazard-prone areas and hazard maps is still limited. This paper aims to examine the knowledge of people living around of Merapi on Hazard map (peta Kawasan Rawan Bencana – KRB) and the understanding of hazard-prone areas in Merapi related to mitigation efforts. In addition, to communicate risk by paying attention to the Living in harmony with environment approach are also examined, to provide a complete understanding of the knowledge of hazard map and early warning systems. Data collection was conducted in 2012 and 2014 by using qualitative approach (interviews, focus group discussions and observations) and using quantitative approach (survey of 600 respondents which distributed evenly in the KRB III-I and outside of KRB areas). The findings of the research at Merapi showed that 54 per cent of respondents know about disaster-prone areas. In addition, from respondents who knew about disaster-prone areas, only 49 per cent had seen maps of hazard map (KRB). Changes to the KRB map due to changes in the naming of zoning and 2010 eruption events are indicated to be a factor in the limitations of understanding disaster-prone areas. In addition, information dissemination and public perceptions of

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN: 1907-2902 (Print)

e-ISSN: 2502-8537 (Online)

THE IMPACT OF GENDERED LABOR MIGRATION ON CHILDREN'S GROWTH: A CASE OF INDRAMAYU REGENCY, WEST JAVA PROVINCE, INDONESIA

(DAMPAK MIGRASI TENAGA KERJA BERBASIS GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK: KASUS KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT, INDONESIA)

Titan Listiani

Ph.D. student, Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University
Planner, Regional Development Planning Board (BAPPEDA) of Indramayu Regency, West Java, Indonesia

Correspondence emails: ps0291ki@ed.ritsumei.ac.jp; titan.listiani@gmail.com

Abstrak

Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam rumah tangga. Secara tradisi, laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan adalah pengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, ketidakhadiran seorang ayah atau ibu akan memberikan dampak kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan mengambil fokus kepada dampak migrasi orang tua terhadap anak yang masih kecil, kajian ini meneliti bagaimana ketidakhadiran seorang ayah atau ibu secara berbeda memengaruhi pertumbuhan anak-anak. Kajian ini juga mengevaluasi peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), layanan bantuan masyarakat untuk peningkatan kesehatan di Indonesia, dalam pertumbuhan anak-anak. Survei dilakukan di Kabupaten Indramayu, salah satu wilayah dengan persentase TKI tertinggi di Indonesia. BNPTKI melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2011 sampai 2015, lebih dari 131 ribu pekerja migran telah diberangkatkan dari Indramayu. Indikator pertumbuhan anak menggunakan ukuran antropometrik berdasarkan standar pertumbuhan WHO tahun 2006. Kajian ini menemukan bahwa migrasi tenaga kerja berbasis gender cenderung memiliki dampak yang berbeda terhadap anak-anak. Migrasi ayah cenderung memengaruhi pertumbuhan anak-anak secara positif. Sementara itu, migrasi ibu tidak ditemukan sebagai faktor yang berpengaruh sebab manfaat migrasi dalam bentuk remitan tereduksi dengan ketidakhadiran ibu untuk merawat anak secara langsung. Temuan studi ini juga memperlihatkan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan anak-anak dan dapat menjadi strategi dalam mengurangi dampak negatif migrasi terhadap mereka.

Kata kunci: Migrasi tenaga kerja berbasis gender, dampak migrasi, anak yang ditinggalkan, pertumbuhan anak-anak

Abstract

Men and women have different roles in the household. Traditionally, men are the breadwinners and women are the caretakers of the household. Therefore, the absence of a father or a mother will bring some effects on the family left behind. By focusing on the impact of parental migration on young children, this paper examines how the absence of a father or a mother may differently influence children's growth. The paper also evaluates the role of the Integrated Health Service Post (*Pos Pelayanan Terpadu*, henceforth *Posyandu* - a community assistance service for health improvement in Indonesia) in children's growth. The survey was conducted in Indramayu Regency, one of the regions in Indonesia with the highest percentage of labor migrants. BNPTKI reported that more than 131 thousand migrants were departing from Indramayu between 2011 and 2015. The indicator of children's growth in this study used the anthropometric measurements based on the 2006 WHO growth standards. This study finds that gendered labor migration tends to have different impacts on children. Father's migration tends to influence the children's growth positively. However, mother's migration has not been found to be as an influential factor since the advantage of remittances is canceled out by the absence of mothers. The findings also show that *Posyandu* plays a significant role in improving the growth of children and can be an effective strategy to reduce undesired effects of migration on them.

Keywords: Gendered labor migration, the impact of migration, left-behind children, children's growth

INTRODUCTION

Many people migrate to improve their livelihoods. Parents leave their home countries seeking economic betterment for their children. However, the absence of a parent might result in undesired consequences on children's well-being, particularly for children at an early age. No data shows the exact number of children left behind by migrant parents, but the number of international labor migrants might suggest their prevalence. In Indonesia, for instance, the data from the National Board for Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers (BNP2TKI)¹ shows that more than half (58.12%) of the labor migrants who departed between 2011 and 2016 (over 1.1 million) are married (BNP2TKI, 2017). This number may indicate the volume of children whose one or both parents were migrants during that time. The number could be much higher if using estimations from the International Labor Organization (ILO), which suggested that there were approximately 150.6 million labor migrants in the world (ILO, 2015).

Several empirical studies have examined the benefits of parental migration on children. The results of these studies are varied. In the Philippines, parental migration was found to have a positive influence on children's health (Parrenas, 2002; Asis, 2006; Graham & Jordan, 2013). Lu (2015) has assessed the influence of internal and international parental migration on children under fifteen years old in Indonesia and Mexico. The study concluded that children with internal migrant parents in Indonesia are healthier than both those with non-migrant parents and those with international migrant parents. Lu's study used the anthropometric measurement, namely height-for-age z-scores, and BMI for-age z-scores, as children's growth indicators. However, many studies have shown the undesired outcomes of migration regarding children's wellbeing. Children with migrant mothers tend to be more vulnerable compared to other groups of children with non-migrating parents (Yeoh & Lam, 2007; Graham et al., 2012; Raharto, Noveria, Romdiati, Fitranita, Malamassam, & Hidayati, 2013; Adhikari et al., 2014). Cabotari, Mazzucato, and Siegel (2017) found that parental migration adversely impacted children's health, especially if the parents were divorced. This study confirms that children are most vulnerable to

parental migration when coupled with marital instability. In summary, these studies show that remittances sent by migrant parents may improve children's health, while at the same time, separation makes children emotionally unhealthy.

Indonesia is one of the major sources of female labor migration in South East Asia.² The number of international female labor migrants from this country is higher than that of male migrants. Between 2008 and 2017, the number of international female labor migrants was 3.15 million, which accounted for 67.7 percent of total global migrants (BNP2TKI, 2017). According to Hugo (2005), the patterns, causes, consequences, and policy implications of female labor migration may differ from those of male migration. There are specific roles shared by men and women in the household. The mothers naturally play a significant role in child rearing. Hence, a mother's absence may have a significant impact on her children, especially on younger children. Despite the prevalence of migration, inadequate attention has been paid to the impact of gendered parental migration on children's growth in Indonesia. This situation is reflected in the limited amount of literature available to examine this issue. One of the major research projects investigating the issue is the Child Health and Migrant Parents in South-East Asia (CHAMPSEA) project (Graham & Yeoh, 2013). However, the project focuses on primary school-aged children rather than very young children. Hence, research focusing on children outside of the range of the studies mentioned above is essential.

In Indonesia, the government requires children under five to regularly visit the Integrated Health Service Post (*Pos Pelayanan Terpadu*, henceforth *Posyandu*), a facility run by and for the community. It is aimed to provide the community with convenient access to essential health services (Ministry of Health, 2011). The government provides equipment when the *Posyandu* is first established, then the community itself bears the operational costs of the *Posyandu* (Ministry of Health, 2011).³ The government also provides health professionals that support the *Posyandu* operation, as well as the caring for children under five. The main task of *Posyandu* is to offer health services for community members at least once a month, including pregnant women, postpartum women, elderly individuals, and

¹ The National Board for Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers (BNP2TKI) is a non-department governmental institution responsible directly to the President. The institution was established under Law No.39/ 2004 to implement the policy of migrant placement and protection overseas. The institution's members consist of

representatives from related departments and governmental institutions.

² The three key sending countries in Southeast Asia are the Philippines, Indonesia, and Vietnam (Peng, 2017).

³ It can be supported by individual donors, private sector donors, the profit of *Posyandu* owned business and the government (Ministry of Health, 2011).

couples who require contraception (Ministry of Health, 2012). Posyandu monitors the growth of children under five by regularly measuring their weights and heights. The measurement results have a significant role in monitoring children's growth and detecting malnutrition in its early stages (Ministry of Health, 2016). The services were established in 1984, and until 2014, there were 289,635 Posyandu units in 33 of 34 provinces in Indonesia (Ministry of Health, 2015). Based on the scope of services offered, Posyandu is divided into four strata, namely Posyandu Pratama (elementary), Posyandu Madya (intermediate), Posyandu Purnama (fully developed), and Posyandu Mandiri (self-reliant) (Ministry of Health, 2011).

In an attempt to fill the gap in the literature on the impact of gendered parental migration on children in Indonesia, this paper analyzes how the absence of a father or a mother differently influence children's growth. It is preceded by comparing the growth of children with migrant parents and non-migrant parents. The paper also evaluates the characteristics of migrant households and the impact of Posyandu on children's health. The paper hypothesizes that the absence of a mother might have an undesired impact because she plays a vital role in child rearing. The study focuses on children under five who tend to be influenced by parental migration to a greater extent. Concurrently, children in this age group are required to visit Posyandu monthly in Indonesia. The study uses survey data from three villages in Indramayu Regency, a major source of female migration in Indonesia. The impact of gendered parental migration is mainly examined quantitatively, while the explanation and contextualization of empirical results require the confirmation and cross-validation of qualitative data. The findings show that gendered labor migration tends to have different impacts on children. Children with migrant fathers have more positive growth indicators compared to those with non-migrant parents and migrant mothers. The paper also confirms the significant role of Posyandu in improving children's growth and reducing the negative effects of parental migration.

This paper is organized as follows: Section 2 presents the data; Section 3 explains the variables and the estimation methods; Section 4 presents the empirical results and findings; Sections 5 and 6 discuss the essential issues related to the results of the analysis and conclusions as valuable input for future studies.

METHODOLOGY

Data

The survey used questionnaires to collect household characteristics data, and the Posyandu databases are the source of children's data such as weight, height, and date of birth. In-depth interviews were also conducted to obtain supporting data from Posyandu's officers. Using questionnaires, Posyandu's officers visited the houses of each Posyandu member. The questionnaires also include questions on household characteristics, migrant status and history, and migrant profile. The questionnaires also collected information on Posyandu activities and child rearing by the households. The questionnaires are expected to cover the multifaceted aspect of parental migration and its impact on children's growth.

The survey was conducted in Indramayu Regency, West Java Province, Indonesia, a regency that has been known for its supply of female labor migrants, from August to September 2016. This study selected three villages in three different sub-districts (Balongan, Kertasemaya, and Indramayu) and chose one Posyandu from each village. The selection was based on the official data availability and the representation of strata of Posyandu. Among the three, two Posyandu represented Posyandu Madya, and one Posyandu represented Posyandu Mandiri. Posyandu Mandiri held 12 meetings each year, at which five standard services, namely treatment for mother and child, family planning, immunization, nutritional support, and the prevention and countermeasures of diarrhea⁴ are provided. Meanwhile, a Posyandu is categorized as Posyandu Madya if it holds more than eight meetings per year, is managed by at least five officers, and its service coverage is less than 50% of standard services. While Posyandu Mandiri fulfills all of the requirements of Posyandu Madya, its service coverage is over 50% of the standard services. The center also offers additional programs and gains self-reliant funding (*dana sehat*)⁵ from at least 50% of its members.

The data were collected from 249 children from the Posyandu. The study excluded children whose parents have passed or divorced, children whose parents were both migrants, and children with incomplete individual data. The individual data includes weight in kilograms, length/height in centimeters, and date of birth.

⁴ The services include the treatment for pregnant women, post-partum and breastfeeding mothers; weight and height monitoring, immunization, and health check-up for babies and children under five years old; provision of contraceptives and counseling of family planning; distribution of

supplementary food and vitamins; dissemination of clean and healthy lifestyle and countermeasures of diarrhea.

⁵ *Dana sehat* is the fund collected from, by, and for the community and is organized based on the principle of solidarity and public health improvement.

Children's growth indicators use anthropometric measurements that require these numbers in their calculations. The indicators are based on the 2006 WHO growth standards.⁶ The anthropometric measurements, i.e., length/height-for-age Z-score (LAZ) and weight-for-age Z-score (WAZ) are chosen because they are commonly used to study children's health in developing economies (Lu, 2015; Zhou, et al., 2015; Graham & Jordan, 2013; Jampaklay, Richter, Tangchonlatip, & Nanthamongkolchai, 2018). WAZ is considered more appropriate for Indonesia compared to the body mass index (BMI) for-age Z-score because the latter is usually used for the screening for overweight and obese individuals (WHO, 2008).

The anthropometric measurements show the comparison between one child's measurements and the international standards of children of the same age and sex. The values indicate how many standard deviations fall below or above the mean or median of the reference population⁷ where the child resides. A negative z-score means that the measurement is below the mean or median of the reference population, while a positive z-score means the opposite. LAZ can aid in identifying children who are stunted (short) due to prolonged undernutrition or repeated illness and WAZ can assess

whether a child is underweight or severely underweight (WHO, 2008). LAZ measures long-term changes, while WAZ confounds short and long-term changes and is useful for monitoring growth and change in malnutrition over time (O'Donnell et al., 2008). The height of children naturally rises over time, even though the rate is different from one child to another. However, the weight might easily decrease due to bad nutritional intake or sudden illness.

WHO recommends an acceptance range on the standard deviations of each anthropometric z-score for data quality assessment. Data were excluded if a child's LAZ was below -6 or above +6, or his/her WAZ was below -6 or above +5 (Mei & Grummer-Strawn, 2007). The calculations of this study showed that there were two children beyond standard deviation, whose data were excluded in the subsequent analysis. Table 1 shows the number of observations for each Posyandu based on parental migration status. There have been 193 observations representing the children with non-migrant parents and 56 observations representing the children with migrant parents. Posyandu 1 (Anggrek) and Posyandu 3 (Singaumbara) represent Posyandu Madya, while Posyandu 2 (Menjangan) represents Posyandu Mandiri.

Table 1. The Number of Observations for Each Posyandu by Migration Category

No	Name of POSYANDU	Number of Children for Each Parental Migration Status					Total
		Non-migrant	Father internal migrant	Father international migrant	Mother internal migrant	Mother international migrant	
1	Anggrek (Balongan Sub-district)	69	4	4	0	13	90
2	Menjangan (Kertasemaya Sub-district)	82	23	1	0	3	109
3	Singaumbara (Indramayu Sub-district)	42	4	3	0	1	50
Total		193	31	8	0	17	249

Source: August-September 2016 Survey

Table 2 presents the parental migration status and relevant information. Over 22 percent of the children were from migrant households. The internal migration of fathers and the international migration of mothers are in common patterns in terms of parental migration in the sample villages. The prevalence of fathers' internal migration across the whole sample is over 12 percent, while the prevalence of mothers' international

migration is almost 7 percent. There were a small number of fathers who migrated internationally, but no cases of mothers migrating internally. On average, fathers who have migrated internally have worked for six years, while fathers who have migrated internationally have worked for more than two years.

⁶ We applied the WHO Anthro version 3.2.2 in STATA software to calculate indicators.

⁷ The formula is $z_i = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$, where

z_i = z-score

x_i = measured value

μ = mean or median value in the reference population

σ = standard deviation of the reference population.

The figures on repeated migration ⁸ show that approximately 75 percent of fathers who have migrated internationally are likely to migrate again. On the other hand, the average migration duration of mother's

international migration is less than one year, while the percentage of circular migrants is slightly higher than 50%.

Table 2. Parental Migration Status

Parental Migration Status	Percentage	Duration (average in months)	Repeated Migration (percent)
No migrant parent	77.5	n.a.	n.a.
Father internal migrant	12.4	72.0	67.7
Father international migrant	3.2	28.0	75.0
Mother internal migrant	0.0	n.a.	n.a.
Mother international migrant	6.8	9.1	52.9

N=249

Source: August-September 2016 Survey

Variables and Estimation Methods

To analyze the relationship between the explanatory variables and children's growth, a cross-section regression analysis was conducted. The model below was estimated employing the ordinary least square (OLS) regression method.

$$H_i = c_i + \beta_0 M_i + \beta_1 X_i + e_i,$$

where H_i is the value of growth indicators of child i , c_i is the constant, M_i is migration status of the parents (dummy variable), X_i is a vector of other explanatory variables, and e_i is residual.

Children's growth indicators (LAZ and WAZ) are employed as dependent variables in this study. The analysis includes two key independent variables of interest that measure different characteristics of parental migration and the roles of Posyandu. Additional indicators were also included to control the household characteristics. Firstly, parental migration status (without differentiating the gender of the parent) was used as the explanatory variable. The model was expected to show the general relationship between parental labor migration and children's growth. Secondly, the gender of the migrant parent was differentiated in the model to assess whether the father or mother's absence differently affected children's growth. The parental migration status, whether internal or international migration, was not considered in the model. The classification of internal or international migration is comparable with paternal and maternal migration because the majority of father's migration is

internal migration, while all mother's migration is international migration.

Another critical independent variable is the role of Posyandu. Its contribution is represented by the number of Posyandu visits within the last year and the service's strata. The Posyandu strata is a dummy variable indicating whether the children visit Posyandu Mandiri (the value=1) or Posyandu Madya (reference: the value=0). The additional variables include the features of the household, namely education level, household size, housing conditions, and mother's age. The paper uses the highest education level of an adult in the household since this variable could show whether education would positively influence the household's healthy lifestyle and lead to better children's growth (Lu, 2015). The household size is the number of household members, which indicates the household burden shared by the children and other members of the household. Previous studies have determined a negative association between household size and children's health (Meng & Yamauchi, 2015; Lu, 2015). Housing condition is a dummy variable differentiating permanent (the value=1) and non-permanent housing (reference: the value=0). A house is categorized as non-permanent if it has no flooring or if the wall is made of anything other than brick and cement. It is assumed that the housing conditions may contribute to children's health (Tasnim, Dasvarma, & Mwanri, 2017).

Table 3 presents the summary statistics of the sample. The average of children's growth indicators is lower than the average of international standards but within the normal range. A child is considered as underweight

⁸ Repeated migrant for international migration is usually defined as a circular migrant. A circular migrant is a person who crosses the national borders of the reporting country at

least three times over a 10-year period, each time with the duration of stay (abroad or in the country) of at least 90 days (UNECE, 2016).

if the WAZ is under -1 and stunted if the LAZ is under -2 (WHO, 2008). Furthermore, over 50 percent of the children are boys, of whom almost 53 percent are from households where one of the adult members has a senior high school education or higher. The majority of these

children reside in permanent housing. On average, children visit the Posyandu more than nine times a year. Furthermore, almost 44 percent of the children visit Posyandu Mandiri, while the rest visit Posyandu Madya.

TABLE 3. The Summary Statistics of Sample Data

Variables	Mean	Variable Description
WAZ	-0.779 (1.043)	Weight-for-age z-score
LAZ	-0.612 (1.385)	Length/height-for-age z-score
Parental Migration Status		
Non-migrant	0.775	=1 if the child has no migrant parent; =0 otherwise
Father migrant	0.157	=1 if the child has migrant father; =0 otherwise
Mother migrant	0.068	=1 if the child has migrant mother; =0 otherwise
Gender	0.566	=1 if the child is a boy; =0 otherwise
Age (months)	27.317 (16.589)	Age of the children when the weight and height are measured
Education Level		
No education and elementary school	0.104	=1 if the highest education of an adult in the household is no-education or elementary school; =0 otherwise
Junior high school	0.361	=1 if the highest education of an adult in the household is junior high school; =0 otherwise
Senior high school or higher	0.534	=1 if the highest education of an adult in the household is senior high school or higher; =0 otherwise
Household size	4.100 (1.140)	The number of household member
Housing	0.823	=1 if the house is permanent; =0 otherwise
Mother's age	32.14 (6.048)	Age of the mother at the time of survey
Posyandu visit	9.50 (3.011)	The number of Posyandu visit within the last one year
Posyandu Strata	0.438	=1 if the child visits Posyandu Mandiri; =0 otherwise

N = 249; Standard deviation is in parenthesis for continuous variables

Source: Author's calculations.

EMPIRICAL RESULTS

Table 4 presents the results of the regression analysis. The first and second equations demonstrate the relationship between growth indicators and parental migration status without gender differentiation, while the third and fourth equations offer results that consider parents' gender. The non-migrant household is used as the reference category for parental migration status. In terms of other categorical variables, non-permanent housing, no-education and elementary school, and Posyandu Madya are chosen as reference categories.

The estimated results in Equation 1 and 2 show that parental migration status, without gender differentiation, has an insignificant impact on children's growth indicators at the 10 percent level. However, using gendered parental migration status as an explanatory variable, the estimation offers different results (Equation 3 and 4). The estimated coefficient on

the WAZ for migrant fathers is positive and significant. Though it is weakly significant, the estimated coefficient for the LAZ is also positive. Thus, the children with migrant fathers tend to have better WAZ and LAZ compared to children without a migrant parent. However, the coefficients for maternal migration are insignificant. Maternal migration does not influence either WAZ or LAZ. Despite the seemingly insignificant figure, the estimated coefficient for age is negative and significant for both WAZ in Equations 1 and 3. This finding means that WAZ tends to decrease as children age. On the other hand, age does not influence children's height indicators.

Among the household characteristics variables, the highest education level of an adult in the household and the household size present significant coefficients. The coefficient for senior high school graduates or higher is positive for LAZ in Equations 2 and 4. This finding indicates that households with an adult who graduated

from senior high school or higher level tend to have a child with higher LAZ compared to households with an adult without education or graduated from elementary school. The coefficient for household size is negative for WAZ in Equation 3. This finding means that an increase in household size may reduce the children's weight indicator.

The estimated coefficient for Posyandu visits is positive and significant for LAZ in Equations 2 and 4. This

finding means that children who regularly visit Posyandu tend to have higher LAZ. In addition, the positive coefficient of the strata of Posyandu shows that Posyandu Mandiri is more likely to have higher children's growth indicators compared to Posyandu Madya for both WAZ and LAZ. However, the influence of Posyandu strata to the WAZ is slightly higher than a 10 percent level of significance in Equation 3. These findings suggest the importance of the role of Posyandu.

TABLE 4. The Estimated Influence of Explanatory Variables on Children's Weight-for-age z-score (WAZ) and Length/height-for-age Z-score (LAZ)

Explanatory Variables	Coefficients			
	Equation 1 WAZ (1)	Equation 2 LAZ (1)	Equation 3 WAZ (2)	Equation 4 LAZ (2)
Parental migration status				
Parents migrants	0.159 (0.159)	0.195 (0.202)		
Fathers migrants			0.318 * (0.183)	0.256 a (0.234)
Mothers migrants			-0.221 (0.269)	0.048 (0.344)
Age	-0.010 ** (0.005)	-0.003 (0.006)	-0.009 * (0.005)	-0.002 (0.006)
Housing	0.024 (0.180)	-0.371 (0.229)	0.019 (0.180)	-0.373 (0.230)
Household human capital				
Junior high school	-0.166 (0.237)	0.128 (0.302)	-0.127 (0.237)	0.143 (0.304)
Senior high school or higher	0.110 (0.230)	0.518 * (0.293)	0.123 (0.229)	0.523 * (0.294)
Household size	-0.109 (0.069)	-0.001 (0.088)	-0.117 * (0.069)	-0.004 (0.088)
Mother's age	0.004 (0.013)	-0.025 (0.017)	0.005 (0.013)	-0.025 (0.017)
Posyandu visit	0.025 (0.026)	0.067 ** (0.034)	0.027 (0.026)	0.068 ** (0.034)
Strata of Posyandu	0.264 ** (0.133)	0.793 *** (0.169)	0.219 a (0.135)	0.776 *** (0.172)
Intercept	-0.593 (0.476)	-0.784 (0.606)	-0.617 (0.474)	-0.794 (0.608)
Observation	249	249	249	249
Adj R-squared	0.0333	0.1095	0.0415	0.1068

Source: Author's estimates

Notes: ***, **, and * indicate significance at the 1 percent, 5 percent, and 10 percent levels, respectively. ^a indicates significance at higher than 10 percent. The standard error appears in parenthesis.

DISCUSSION

This section is a more thorough discussion of the empirical results. There is no influence of parental migration on the child's growth if the gender of the parent is excluded from the analysis. This finding indicates that the influence of parental migration as a whole is not a significant factor in children's growth.

However, if the gender of the migrant parent is considered, paternal migration has a significant positive influence on WAZ and LAZ of the children. Children with migrant fathers tend to have higher growth indicators. The remittances from paternal migration can provide more effective support for the children's nutritional and health necessities. Rahman and Fee (2009) found that female (mother) recipients tend to use

remittances to invest in human capital such as education and health, while male (father) recipients spend the money for physical capital such as housing, farmland, and livestock. The presence of the mother may also improve the child's condition because mothers are usually the primary caregiver for young children (WHO, 2004). This result is consistent with Graham and Jordan (2013) who found that, in the Philippines, children with migrant fathers are significantly less likely to be stunted than children in non-migrant households.

The assumption that maternal migration has a negative impact on children's growth has not been observed. The advantages of maternal migration or the loss caused by maternal absence on child growth are not evident. Generally, the remittance sent home is beneficial to children, in that it may improve their nutritional intake and health, especially when the main recipient of remittance is the female member of the household. However, those advantages may also be influenced by the negative impact of maternal absence. In the case of maternal migration, the practice of caregiving is more complicated. Caregiving without the mother may involve individuals outside of the nucleus family member, which has more uncertain effects on children. Jordan and Graham (2012) argued that the variations in caregiving arrangements are one of the reasons for the different outcomes of the gendered parental migration as well as the differences in monetary remitting patterns.

The difference in monetary remitting patterns between maternal and paternal migration may also explain the insignificant effect of maternal migration compared to paternal migration. The remitting pattern is affected by the characteristics of the female and male migration in Indramayu Regency. The duration of the employment contracts given to the female labor migrants is usually two to three years.⁹ Most of these women work as domestic workers and caregivers abroad (BNP2TKI, 2017; Listiani, in press). Even though their contracts can be extended, they usually come back to Indonesia after the end of the contracts. Therefore, the employment continuity is relatively low. At the time of the survey, the data revealed that the average duration of maternal migration was less than one year (see Table 2). Also, the majority of these women's migration processes are facilitated by recruitment agencies¹⁰

(Listiani, in press). With the debt-financed migration scheme, the migrant should pay back their migration costs through remittances for several months, which reduces the amount of remittances sent to their family. Furthermore, if migrants return to their villages before finishing their contracts, the household might be indebted due to failed migration. These characteristics are entirely different from the characteristics of paternal internal migration, i.e., longer migration duration, lower cost, and without contracts. Paternal internal migration can provide more dependable remittances compared to maternal international migration and has a more positive impact on children's growth. This finding is consistent with Lu (2015)'s study that shows a positive influence of parental internal migration on children's health. International migration tends to have a longer duration of family separation, and fluctuations in remittances and childcare arrangement issues that cause significant problems for migrant families. However, our samples have less than a one-year migration. Therefore, the remittance and childcare arrangement are the most prominent factors.

Education of an adult in the household has a significant positive impact on long-term children's growth indicators. It is argued that the children's physical well-being is highly related to the education level of the caregiver (Graham & Jordan, 2013). Even though the variable education level in this research does not explicitly belong to the caregiver, the results of this research support the importance of the household members' education in children's health. An educated household member may considerably improve the healthy lifestyle and the hygiene awareness of the household.

The contribution of Posyandu in the community is a prominent factor that enhances the growth of all children, including those of migrants. Posyandu services, such as monthly monitoring of children's physical growth, the dissemination of healthy lifestyles, immunization support, and pregnancy examinations, are efforts that positively improve communities' health awareness. These actions might become one of the factors that reduce the undesired impacts of parental migration. One of these factor's influences is reflected in the long-term child growth indicators. The finding confirms the importance of civil society as one of the various actors expected to play a role in supporting the

⁹ The migrants may work only in countries which the Indonesian government has already signed agreements with. The work period is based on the contract between the recruitment agencies and the business partners or the employers (Law No.18, 2017).

¹⁰ The recruitment agencies are called *Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia* (Indonesian migrant-worker placement company) (Law No.18, 2017) or *pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta/ perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia* (Law No. 39, 2004) to refer to private migrant-sending firms.

left behind families (Lam, Ee, Anh, & Yeoh, 2013), while the community contributions significantly act as valuable social capital.

The finding also shows that the strata of Posyandu are a significant factor in influencing children's growth indicators. The higher the strata of Posyandu, the higher the children's growth indicators would be. The improvement of service coverage and more effective management positively influence children's health. The results indicate that the quantity and quality of Posyandu, in terms of frequency of Posyandu's visits and Posyandu's strata, are essential in enhancing the children's growth.

CONCLUDING REMARKS

This paper has examined whether parental migration influences children's growth. The examination of gendered parental migration reveals that paternal migration makes a positive difference in children's short-term and long-term growth indicators. There is no evidence of the influence of maternal migration on the growth of the children left behind. The findings suggest a complex relationship between maternal migration and child well-being. The remittances obtained from maternal migration should be beneficial for the improvement of the growth of children. However, the

absence of the mother might cancel out the intended gains from the remittances. The other finding is that well-educated households tend to have better children's growth. Moreover, the role of Posyandu significantly influences children's growth. Gendered parental migration indeed affects the growth of children, but the accumulative impact is somewhat inconsistent. However, the presence of Posyandu provides more robust outcomes for children's health improvement. The improvement of the service and its management may be an effective strategy for reducing the negative impact of parental migration.

There are some limitations to this research. Firstly, the impact of maternal migration on young children's emotional well-being must be evaluated to gain a comprehensive understanding of the impact of parental migration on children with migrant parents. Secondly, the role of substitute caregivers and the scheme of caregiving practice, which are expected to be important factors in influencing the children's growth, are not yet well elaborated. Thirdly, the further evaluation of the relationship between the strata of the Posyandu and children's growth is necessary as it provides valuable inputs into the formulation of migration policy by the government. Migration policy should broaden the scope and synergize with other related aspects. These topics should be investigated in future studies.

REFERENCES

- Adhikari, R., Jampaklay, A., Chamrathirong, A., Ritcher, K., Pattaravanich, U., Vapattanawong, & Patama. (2014). The Impact of Parental Migration on the Mental Health of Children Left Behind. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 16, 781-789. doi:10.1007/s10903-013-9809-5
- Asis, M. M. (2006). Living with migration, Experience of left-behind children in the Philippines. *Asian Population Studies*, 2(1), 45-67. doi:10.1080/17441730600700556
- BNP2TKI. (2017). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI. Retrieved from http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
- Cabotari, V., Mazzucato, V., & Siegel, M. (2017). Child Development and Migrant Transnationalism: The Health of Children Who Stay Behind in Ghana and Nigeria. *The Journal of Development Studies*, 53(3), 444-459. doi:10.1080/00220388.2016.1187723
- Graham, E., & Jordan, L. (2013). Does Having a Migrant Parent Reduce the Risk of Undernutrition for Children Who Stay Behind in South-East Asia? *Asian Pacific Migration Journal*, 22(3), 315-348. doi:10.1177/011719681302200302
- Graham, E., & Yeoh, B. (2013). Child Health and Migrant parents in South-East Asia: Risk and Resilience among Primary School-Aged Children. *Asian and Pacific Migration Journal*, 22(3), 297-314. doi:10.1177/011719681302200301
- Graham, E., Jordan, L., Yeoh, B., Lam, T., Asis, M., & Sukamdi. (2012). Transnational Families and the Family Nexus: Perspective of Indonesian and Filipino Children Left Behind by Migrant Parent(s). *Environment and Planning*, 44, 793-815. doi:10.1068/a44445
- Hugo, G. (2005). Migration in the Asia-Pacific region. *Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration*. Global Commission on International Migration. Retrieved from https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/rs/RS2.pdf
- ILO. (2015). *ILO Global Estimates on Migrant Workers, Result and Methodology Special Focus on Migrant Domestic Workers*. Geneva: International Labour

- Office. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
- Jampaklay, A., Richter, K., Tangchonlatip, K., & Nanthamongkolchai, S. (2018). The Impact of Parental Absence on Early Childhood Development in the Context of Thailand. *Asian and Pacific Migration Journal*, 27(2). doi:10.1177/011719681302200301
- Jordan, L. P., & Graham, E. (2012). Resilience and Well-Being Among Children of Migrant Parents in South-East Asia. *Child Development*, 83(5), 1672-1688. doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01810.x
- Lam, T., Ee, M., Anh, H. L., & Yeoh, B. S. (2013). Securing a Better Living Environment for Left-Behind Children: Implications and Challenges for Policies. *Asian Pacific Migration Journal*, 22(3), 421-445. doi:10.1177/011719681302200306
- Law No. 39. (2004). *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Placement and Protection of Overseas Indonesian Workers)*. Jakarta: The Government of Indonesia.
- Law No.18. (2017). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Protection of Indonesian Migrant Workers)*. Jakarta: The Government of Indonesia.
- Listiani, T. (in press). Analysis of the Characteristics of Circular Migration: The Case of Female Domestic Workers from Rural Indonesia. *Journal of Policy Science*.
- Lu, Y. (2015). Internal migration, international migration, and physical growth of left-behind children: A study of two settings. *Health and Place*, 36, 118-126. doi:https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.09.008
- Mei, Z., & Grummer-Strawn, L. M. (2007). Standard deviation of anthropometric Z-scores as a data quality assessment tool using the 2006 WHO growth standards: a cross country analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, Volume 85, Number 6, 421-500. doi:10.2471/BLT.06.034421
- Meng, X., & Yamauchi, C. (2015). Children of Migrants: The Impact of Parental Migration on Their Children's Education and Health Outcomes. *IZA Discussion Paper No. 9165*. Retrieved from <http://ftp.iza.org/dp9165.pdf>
- Ministry of Health. (2011). *General Guidelines of Posyandu Management (Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu)*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia. Retrieved from <http://cisdi.org/files/9f1f53a8c4b972590cfb79d815d48ceaf76e0f16.pdf>
- Ministry of Health. (2012). *Let's go to POSYANDU Every Month (Ayo ke POSYANDU Setiap Bulan)*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/buku-saku-posyandu.pdf>
- Ministry of Health. (2015). *2014 Indonesia Health Profile*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Indonesia%20Health%20Profile%202014.pdf>
- Ministry of Health. (2016). *2015 Indonesia Health Profile*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/indonesian%20health%20profile%202015.pdf>
- O'Donnell, O., van Doorslaer, E., Wagstaff, A., & Lindelow, M. (2008). *Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation*. Washington: The World Bank. Retrieved from <http://siteresources.worldbank.org/INTPAH/Resources/Publications/459843-1195594469249/HealthEquityFINAL.pdf>
- Parrenas, R. S. (2002). The care crisis in the Philippines: children and transnational families in the new global economy. In A. R. Barbara Ehrenreich, *Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy* (pp. 39-54). New York: Metropolitan Books.
- Peng, I. (2017). *Transnational Migration of Domestic and Care Workers in Asia Pacific*. Geneva: International Labour Office.
- Raharto, A., Noveria, M., Romdiati, H., Fitranita, Malamassam, M. A., & Hidayati, I. (2013). Indonesia Labour Migration: Social Cost and Families Left Behind. In N. Dungo, A. Jampaklay, A. J. de Rios, A. Raharto, & M. Reyes, *Valuing the social cost of migration: An exploratory study* (pp. 18-71). Thailand: UN Women.
- Rahman, M. M., & Fee, L. K. (2009). Gender and the Remittance Process: Indonesian domestic workers in Hong Kong, Singapore and Malaysia. *Asian Population Studies*, 5(2), 103-125. doi:10.1080/17441730902992059
- Tasnim, T., Dasvarma, G., & Mwanri, L. (2017). Housing Condition Contribute to Underweight in Children: An Example From Rural Villages in Southeast Sulawesi, Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 50(5), 328-335. doi:https://doi.org/10.3961/jpmph.17.046
- UNECE. (2016). *Defining and Measuring Circular Migration*. New York and Geneva: United Nations. Retrieved from <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/docu>

ments/ece/ces/bur/2016/February/14-Add1_Circular_migration.pdf

WHO. (2004). *The Importance of Caregiver-child Interactions for the Survival and Healthy Development of Young Children*. Switzerland: Department of Child and Adolescent Health and Development. Retrieved from <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42878/924159134X.pdf;jsessionid=99A8DEC36E2948D0CA32CAF4E2F8BEAE?sequence=1>

WHO. (2008). *Interpreting Growth Indicators*. Geneva: World Health Organization, Training Course on Child Growth Assessment. Retrieved from http://www.who.int/childgrowth/training/module_c_interpreting_indicators.pdf

Yeoh, B. S., & Lam, T. (2007). The cost of (im)mobility: Children left behind and children who migrate with a parent. In U. ESCAP, *Perspectives on Gender and Migration* (pp. 120-149). New York: United Nation Publication. Retrieved from https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_PUB_Perspectives_on_Gender_and_Migration.pdf

Zhou, C., Sylvia, S., Zhang, L., Luo, R., Yi, H., Liu, C., . . . Rozelle, S. (2015). China's Left-Behind Children: Impact of Parental Migration on Health, Nutrition, and Educational Outcomes. *Health Affairs*, 34(11). doi:10.1377/hlthaff.2015.0150

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN: 1907-2902 (Print)

e-ISSN: 2502-8537 (Online)

INDONESIAN RETURN MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP AT HOME VILLAGE: KNOWLEDGE PRODUCTION AND LIVING STRATEGY

(PRODUKSI PENGETAHUAN DAN STRATEGI KEWIRAUSAHAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA DI DESA ASAL)

Paulus Rudolf Yuniarto

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Correspondence email: rudolfyuniarto@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang telah kembali ke kampung halaman. Studi dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tulisan membahas hubungan antara pengalaman migrasi dan strategi adaptasi PMI Purna yang terkait erat dengan proses reintegrasi ekonomi. Dengan metode wawancara mendalam dan observasi, studi ini memperlihatkan beberapa temuan menarik. Pertama, kewirausahaan PMI Purna adalah suatu hasil dari proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketika akan dan sedang bekerja di luar negeri. Kedua, PMI Purna menghadapi beberapa tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai di desa, antara lain upaya membangun jaringan dengan kolega/teman serta kesulitan memenuhi harapan ekonomi keluarga seperti saat bekerja ke luar negeri. Ketiga, reintegrasi ekonomi ternyata sulit bagi PMI Purna karena minimnya dukungan pengembangan keahlian yang dapat memaksimalkan penghasilan/tabungan (remitan). Keempat, di sisi lain, kewirausahaan PMI Purna dapat juga diasosiasikan dengan transformasi diri dan strategi hidup di desa. Artinya PMI Purna mengalami 'kelahiran kembali' lewat pengetahuan dan pekerjaan baru yang diperoleh, pemanfaatan pengalaman ekonomi serta mobilitas ekonomi mereka. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi dukungan finansial dan pengetahuan menjadi wirausaha menjadi aset berharga dalam upaya reintegrasi ekonomi PMI Purna di desa.

Kata kunci: reintegrasi ekonomi, PMI Purna, kewirausahaan.

Abstract

This paper explores the phenomenon of Indonesian return migrant and entrepreneurship issues to their hometown in Malang Regency, East Java. It discusses the linkage between migration experiences and adaption strategies in the economic reintegration of return migrant in home village. By using interviews and observations, the paper concludes some interesting issues. Firstly, the return migrants' entrepreneurship is the process of accumulating knowledge that acquired before and during migration. Secondly, the return migrants face several challenges including finding appropriate jobs in their villages of origin, including efforts to establish networking with former colleagues and friends as well as difficult to meet their family members' economic needs. Thirdly, economic reintegration is particularly difficult for the return migrants when their home villages' infrastructures are not well developed. Four, on the other sides, the return migrants maximize revenues/saving and social remittances for entrepreneurship associated with self-transformation and living strategy at home villages. The return migrants undergo 'rebirth' by acquiring new knowledge and occupations, utilizing their economic experiences and mobility, and reintegrating themselves into society both socially and economically. In conclusion, the combination of financial support and social remittance of migrant workers is a valuable asset for economic reintegration of the return migrants.

Keywords: economic reintegration, return migrant, entrepreneurship.

INTRODUCTION

Migration and entrepreneurial activities appear to be a sequential process that people who migrate go through in order to sustain their livelihoods (Benda-Beckman, 2000). According to Wijers (2013), this sequential process of migration consists of the interactions between actors' personal histories, their entrepreneurial skills and resources, and their chances of implementing the opportunity structures available to them. Making adjustments and having knowledge of production applications in the return migration context are crucial aspects of enabling former migrants to sustain their socioeconomic lifestyle after they finish working abroad (Chobanyan, 2013). Two conditions are required for maximizing entrepreneurship and resource opportunities of the return migrants so they can experience success in establishing/building economic activities. The first condition has to do with how the return migrants can gain and reproduce knowledge during the migration process as well as learn to practice it when they return (Gmelch, 1980; Cassarino, 2004; Anwar, 2013). Secondly, the return migrants need to develop ability and make strategic adjustments for economic survival in their home villages (Brettell & Alstatt, 2007). Regarding the intake and dissemination of knowledge and experience gained by immigrants, Levitt (1998) proposed that new ideas, behaviours, knowledge, and personal experiences are immigrants' social remittances. These social remittances are in the forms of normative structures (ideas, values, and beliefs); systems of practices (the actions shaped by normative structures); and social capital (individually acquired through participation in informal networks, registered organizations, and various associations and social movements).

In the context of Indonesian return migrant entrepreneurship at home village, according to studies by Rosalinda (2013) and Wijaya, Sukesi, and Rosalinda (2015) on economic activities in Malang Regency where this research studied, it is shown that entrepreneurial activities are increasing in number. Of the 5,823 migrants who worked abroad in 2013, more than a third are entrepreneurs or worked on seasonal jobs when they returned. The rest are unemployed, or else they re-migrated. However, their studies yet unexplored the issues on how those migrants—with knowledge, experience and vision—have successfully maintained their economic conditions and self-determination after their return. For example, it is not known if the migrants' working abroad experience give them cultural insights and work ethic that can improve the outcomes of their economic activities. The return migrants may also experience structural and individual strategic adjustment or develop their entrepreneurial

knowledge production. Based on this reason, this paper will answer the following questions: (i) How do the return migrants define their migration for sustainability living in the future? (ii) How do the return migrants make economic activities and adjustment strategy to village condition after their return? (iii) How do the return migrants develop entrepreneurship patterns, what the effects (implications) for their future career, and whether they can change their personal life's economic status? This paper will describe entrepreneurship pathway in a way that indicates self-transformation from worker to entrepreneur, and, to some extent, to become a community activist.

LITERATURE REVIEW

The process of return migration and economic activities has been most conceptualized under (i) the economics of labor migration or accumulation of sufficient resources (de Haas et al., 2015; Heberer, 2004) and (ii) the importance of the social, economic, and political conditions of the home countries (Cassarino, 2004). Similarly, the literature on return migrant entrepreneurship in Indonesia discuss the above topic with emphasis on migrants' remittance management, and the role of migrants' remittances in the economic development perspective (for example, Bachtiar & Prasetyo, 2014; IOM, 2010; Knerr, 2012; Rahman, 2010; Rosalinda, 2013). Meanwhile, Naning (2015) studied the combination of strategies (social networks and household savings) and constraints (financial and human capital) that enabled the return migrants to become landowners or entrepreneurs in their home villages. Anwar (2013a, 2016b) found that Javanese workers who migrated to South Korea gained some positive effects from working abroad that influenced their attitudes in their communities of origin, such as discipline, diligence, and hard work. Such social remittances were used for various purposes, including production, consumption, and economic investments.

The return migration literature above focused on financial aspects as determinants of the migrants' self-autonomy. However, the human aspects of the migration and entrepreneurship interconnection processes have not yet been explored. Boissevain (1986) and Cassarino (2004) both mentioned that to be successful businesspersons, the return migrants had to consider aspects of self-confidence, achievement orientation, perseverance, and resourcefulness in their entrepreneurial practices. Two interesting studies on return migrant entrepreneurship in Vietnam (Phuong La, Trand, & Wang, 2015) and the Philippines (Spitzer, 2016) reveal similarities to Indonesian return migrants who establish entrepreneurship after returning home. In

Vietnam, the return migrants do not have access to job opportunities corresponding to their new skills; thus, they have difficulty gaining recognition for their internationally acquired skills. Such a situation leads to their underutilization and subsequent inefficiencies in the labor market. Moreover, in the Philippines, there is an empowerment policy that is supposed to protect the rights of the return Filipino migrant, but the policy has gaps and weaknesses. In both countries, the strong local economy should have ensure the maximization of the gains achieved from migration, but the return migrants struggle alone to survive and achieve economic sustainability.

DATA AND METHOD

My fieldwork was conducted from August through September 2015. Research location at AW and DM village at Southern Malang Regency, East Java. Data on the village offices showed that approximately 3,000 inhabitants of AW village worked as migrant workers up until 2015, and 10 percent of them might return as entrepreneurs. A relatively smaller number of returned migrant entrepreneurship was found at DM village where 355 villagers worked as migrant workers from 2010 to 2013, and about 83 home industry entrepreneurship, trading, and farming establishments in the village belong to migrant families.

The interviews completed at this field site consisted of the following: (i) 10 return migrant entrepreneurs who had at least one current business in AW; and (ii) 11 return migrant entrepreneurs who had at least one current business in DM. The interviews were conducted with the individuals in charge of the business activities and their spouses. The majority of the returnees interviewed in both villages were between 30–40 years old, and the sample included both male and female returnee migrants. Most of the informants finished primary education, followed by those who completed senior high school. Furthermore, none of the informants was single, and the married informants in both villages had only one or two children, followed by some who had three children. Those selected as the informants for this study are the return migrants who can successfully establish, initiate, and proceed entrepreneurship activities at their home villages.

At a glance, the returned migrant entrepreneurship are scattered and cannot be observed directly; they do not employ shop windows to display their products, so we must enter the migrant resident area and locate their entrepreneurial activity. Due to most business activity being in the home-based business form, information

about return migrant entrepreneurship was collected through snowballing interviews. For instance, in AW, I started collecting informants based on information from the management staffs of the “PD” migrant cooperative; they have a list of the member with the return-migrant status that I used to make a list of return-migrant worker alumni who conduct business in the village. In DM, I received assistance from the head of the “SM” return migrant cooperative. She gave me a list of return migrant entrepreneurship in her village. In general, return migrant entrepreneurial activities can be sorted into two categories: those that serve primary products (food, neighbourhood, house material, cellular, etc.) and business services (salons, rental services, printing/copying, etc.).

FINDINGS

Migration as Entrepreneurship

The fieldwork locations, AW and DM villages, are agrarian areas that support the seasonal employment of two-thirds of their population. According to Yen, Platt, and Yeoh (2015) and Syafitri (2014), the occupational condition in rural East Java, including the research site area, was dominated by agricultural activities. Farmers generally produce crops like paddy rice, corn, and tapioca. The land is also widely used for cultivating sugarcane and other horticultural seasonal crop products, such as snake fruit and watermelon. Farmers sell part of the harvest (especially their sugar cane leaves and corn produce to be processed later as cow feed or chicken feed) to middlemen who would be benefited from selling their purchases to large commercial entities and village merchants (Yen, Platt, & Yeoh, 2015; Syafitri, 2014; Yuniarto, 2016).

In both villages, most of the villagers work as day laborers (*mburuh*) for landowners. This occupation is common for those who do not own farmland. They would temporarily work on the landowners’ farms to clear land by hand (*matun*) or plough (*mluku*), fertilize (*ngabuk*) and harvest (*manen*) crops as well as raise landowners’ cattles (*ngerumat*). These workers are paid low wages. Salaries for *mburuh* activities, for example, generally range from IDR 30,000 to IDR 35,000 (equivalent to USD 2.04 to USD 2.40; USD 1 = IDR 14,000 as of September 2015) for six hours of work. The other occupations commonly available to the unemployed include construction work, itinerant work, and bus/truck driver assistantship (seasonal jobs) with wages around IDR 50,000 to IDR 75,000 (USD 3.40–USD 5.10) per day. Furthermore, various salaried occupations such as teacher (*guru*), civil servant (*PNS*),

doctor or army officer (*TNI/Polri*), village official, are limited to graduates, and many of them come from the outside village.

Besides characterized as an agricultural area, AW and DM villages also notably known as migrant-sending villages for working abroad. Migration activities by the villages' inhabitants are driven by unfavourable farm conditions and the limited availability of well-paying jobs in their living areas. According to Ms JT, head of the Malang Migrant Workers Union (*Serikat Buruh Migran Indonesia-Malang [SBMI]*), migration is not only motivated by economic conditions but also by the agrarian conditions that typifies the lives of the hill and mountain people in this area. For example, short planting seasons and extended dry seasons, cropping systems, and agriculture unemployment. High outmigration is also a result of the irregular nature of work afforded by the agrarian economic structure of Malang (Yen, Platt, & Yeoh, 2015; Syafitri, 2014) and by the fact that they also cannot yet become farmers. Aside from obtaining work as migrants, AW and DM residents also secure employment outside the village (Jakarta, Surabaya, or Kalimantan) as *tukang bakso* (meatball sellers), clerk, construction workers, timber workers, and informal sector employment. These types of job are not considered as steady jobs since they mostly work based on contractual terms for some time. It is found that some residents move back and forth from village to neighbouring towns to work in some development projects and return home when the projects have finished.

RM (age 40), a tobacco farmer and small-scale poultry entrepreneur in DM village, shared her home conditions and migration experience. Her house is located in the middle of a village plantation area on a hillside that is occupied by a minimal number of residents.

Since I was a kid, our village was always poor; farmland was typically rain-fed, and we depended on the rain season. The main agricultural products were usually sugar cane, cassava, cocoa, red pepper, and watermelon. However, our farmers here don't have a big farm in general; otherwise, they are landless workers. Our family was a working class family. Getting a lot of money from farming is hard. In the dry season after the sugar harvest, people go to town to find a job outside. Around the '80s, international migration started to Saudi Arabia and Malaysia. After I was married, from 2000 to 2004, I worked in Malaysia as a domestic worker and waitress; from salary saving, it was enough to build a house. Then from 2005 to 2010, I departed to Taiwan to continue my

work abroad, still as a domestic worker and nursing the elderly. That time I was looking money for starting my own business. As a result, I could buy farmland outside my village. For us (her and her husband), the land is very important to maintain viability as farmers. My husband and I have backgrounds as farmers; so we just know farming. Since four years ago, we have planted tobacco in partnership with the 'Sampoerna Cigarette Company'. Besides farming, we also raise a few goats and chickens as a form of saving. For instance, we buy baby goats and chicks for IDR 1 million, we raise them, and then one year later, we sell them for IDR 2 million.

In DM village, I also found former migrants who contended with establishing economic sustainability and who used migration as a solution. SQ (male, age 35), who owned and operated a building supply store, explained that his reason to do international labour migration was for seeking capital and improving his household welfare. He said:

My wife has worked three times in Taiwan as a domestic worker from 1999 to 2008; while I've worked twice there at a spin yarn factory from 2002 to 2008. For us, migration abroad means enhancing the standard of living in rural areas. It was such a tradition; my wife's mom worked in Malaysia in the '80s and my neighbours went to various places, like Kalimantan, Brunei, or Saudi Arabia. Now it's time for the second generation to work abroad; it's like we're replacing their position. It's the same as with the previous generation; migration was driven by unfavourable farm conditions and the limited availability of well-paying jobs in villages. First, our money was used for housing renovation to live separately from our family, and second, it was used for opening our business. We made sacrifices, saving our salary while working. We need to do economically sustainable activity when we return and we don't want to keep migrating multiple times just because we don't have farmland to cultivate. Therefore, we have to migrate to acquire capital for doing business, to scrape a living at home. Right now, we can establish our own business. It is our household's economic achievement that was enabled by migrating three times to Taiwan to earn money.

Three important ideas can be extracted from the narratives of RM and SQ. Firstly, migration as an individual/family strategy for income (seeking money) and for business capital. Secondly, the migration of young people, who then return and use their savings to invest in land and business, has also been common for – at least – the previous generation. Lastly, return migrants adjust to village conditions and develop entrepreneurial activities. The return migrants adjusted to the home condition by co-opting family agricultural traditions and maximizing the job market in the village. The pattern of adjustment is closely connected to the living situation in the villages of origin and the migrants' reflections on the villages' economic life. It is also a response to the economic challenges that the migrants met upon their return. Their responses are expected to be a means of intermingling between the village economic structure and household needs. The responses are also the strategy by which the village middle class reproduces for itself and the next generation in the same middle-class position in society. Thus, entrepreneurship has become a working career choice of return migrants in the village. The stories above show us how migration is adopted as a livelihood strategy for capital accumulation. Moreover, migrant remittance was used as a tool for self-employment or entrepreneurship. In other words, the utilization of the remittance is for productive economic purposes. Both migration and remittance can reinforce the sustainability of return migrant livelihoods and economic activities at home village.

Economic Strategy

This subchapter explains cases of the return migrants who create entrepreneurial activities and their strategies. There are three factors that can help the return migrants to be successfully creating their entrepreneurial activities at village: (i) intensifying their family resources; (ii) the role of family (household) members in remittance management for entrepreneurship; and (iii) the return migrants' business adaptation through the implementation of local business patterns. However, economic strategy activities at home villages could be in various pathways for each person. For instance, the story from TT (age 30), a female return migrants from AW that shared her adjustment upon her return from working abroad:

My family background is farmers and TKI (Tenaga Kerja Indonesia - Indonesian Foreign Labor). When I was a child (in the '80s), my father was in Malaysia working as oil-mill labor. When he returned, he bought 1 hectare of farmland and run farming activities by planting sugar cane, sweet

potatoes, and vegetables. We also raised two or three cows or sheep in between. Cows or sheep are the main sources of farmer savings. They will be sold to fund the children's education or housing renovations, while agriculture yields use for daily consumption and land cultivation. In my opinion, my father is not only a farmer; he is also an entrepreneur. I worked in Taiwan in 2000 and then continued from 2003 to 2010 in Hong Kong as a TKI. At first, I invested in land and housing, saving my salary along with my husband's. My husband also worked in Korea as TKI. After building our house, we started our entrepreneurship. First, we invested our money in buying paddy fields and planted them with the tumpang sari system; that is, we planted paddy combined with vegetables. For business management, we copied my father's mechanism to find another investment to support subsistent farming activities. My husband established breeding broilers with his savings from working in South Korea. Meanwhile, I started a salon business. They were our ways to adjust to the village economic conditions; we diversified our agricultural products and occupations. I follow my father's ways with different business interests to be able to survive in our home village.

Another informant has also shared her economic readjustment stories. SP (age 36), a female return migrant from DM village, adopted an entrepreneurial strategy by doing a trading activity, i.e. selling and buying vehicles (*jual-beli*). With her brothers who also one of the intermediaries of agricultural products in the village, they buy second-hand cars or motorcycles, make some modifications to repair or enhance them, and then sell them on the local market. From this trading activity, they manage to get excess profits.

A similar situation occurred to WG (female, age 30) and SW (male, age 32), a couple who raise poultry as well as cultivate chili and watermelon. They build their economic activities by following patterns and learning from family members who are successful entrepreneurs. SW's brother has 25 years' experience as a crop farmer, so he is an expert in diversified products and cultivating farmland. They decide not to sell their products at the local market since buyers from the local village do not have much money. Thus, they try to find buyers from outside the village, including selling their products to intermediaries.

Besides trading, products diversification and farmland cultivation, village traditions influence the development of economic activities by the return migrants. In both studied villages, the inhabitants continue to practice traditional rituals, such as the wedding ceremony (*mantenan*), the annual ritual for ancestors, the festival of cleaning village (*bersih desa*), the national independence day celebration (*tujuh-belasan*), the religious ceremonies (Eid al-Fitr and Eid al-Adha), and the school ceremonies (camping and graduation party). All of these events are usually punctuated by the appearance of local traditional art forms, such as music, dances, or religious group songs. In addition, these ritual practices can last for two days to a week and run from noon to midnight. These events involve all of the residents of a village, not only as participants but also as event organizers.

Many business ideas have emerged from village traditions. For example, during weddings or the national Independence Day ceremony, village members render services such as food catering, printing, rental services for sound systems and music, national/traditional wedding dresses, makeup and hair salon, party equipment; tailoring, video shoots, and souvenir supplies. The other businesses that are associated with these traditional events include food supplies, transportation services, and seed or plant supplies. Thus, the local traditions in a village foster an environment where local entrepreneurs, traders, and return migrants can create business innovations or leverage the events for their business products. In this case, return migrant entrepreneurship adjustment is highly related to the tradition aspects of the home village. They tend to activate businesses that adjust to the needs of the villagers and recent economic trends. As many villages still keep their traditional rituals, their inhabitants are embedded in local traditions. Therefore, there is a high demand for products or services related to traditional events that return migrants can fulfil—as village economic structure opportunity taken.

Knowledge Production

As mentioned above, regarding the intake and dissemination of knowledge and experience gained by immigrants, Levitt (1998) defined three types of social remittances, namely (i) normative structures (ideas, values, and beliefs); (ii) systems of practices (the actions shaped by normative structures); and (iii) social capital (individually acquired through participation in informal networks, registered organizations, and various associations and social movements). My observations suggest two ideas of knowledge production develop return-migrant entrepreneurship, i.e. self-development and self-adjustment.

1. Self-development

Migrant workers reported that the first time they worked abroad, the wages that they received was considered as *uang kaget* (shock money). It was because they received money that was surprisingly high or at least higher than the minimum wages in their home villages. This experience is common among first-time immigrants, and typically, they spend their incomes on excessive consumption. However, when the money begins to dwindle or when they return home with little money to show their efforts, they start to recognize that they do not have enough money. They tend to emigrate again for productive investment purposes or for earning more money. Migrants who work abroad for the second or third time usually begin to think about entrepreneurship or to prepare themselves for self-employment. It is the basic migration pattern of Indonesian migrant workers. In this basic pattern, as soon as a migrant begins to think about future financial investments, he or she begins to experience a sense of “future self-awareness.” This new awareness is the starting point of commitment to improving one’s lifestyle. It is an important step toward return-migrants’ economic reintegration (i.e., financial self-sufficiency in the economy of the home village). In this process, return migrants encounter enlightenment through their work and life experiences, and this knowledge supplements their entrepreneurial business operations.

The process of creating self-awareness and entrepreneurship was positively influenced by the open-mindedness and resilience that return migrants developed along with the knowledge they obtained from their experiences during migration and after returning home. In both villages, return migrant entrepreneurs mentioned the lessons they learned while working in Taiwan and learning the Taiwanese work culture. For example, they reported a new sense of concern such as respect for others and balanced social interactions as well as stronger work ethics related to productivity, such as discipline, promptness, balanced work and rest, diligence, and hard work. They also mentioned an increased efficiency of their consumption habits, such as saving instead of freely spending. All of the values they obtained from working abroad influenced the return migrants’ entrepreneurial behaviours in their home villages. Because of their social and cultural experiences, the return migrants learned how to solve the financial problems they faced in their home villages. The return migrant accumulated ideas, behaviours, and experiences in their host countries and then applied them to their developing businesses. Social remittances give positive feedbacks, which are useful for the return migrant entrepreneurship.

SW (male, 35 years old) presents an example of entrepreneurship that developed through this process. Initially, he was an immigrant worker in a factory and a construction worker in Sabah and Sarawak, Malaysia from 1991 to 1999. From 2004 to 2010, he worked in the Hsinchu City pipe factory in Taiwan. In Malaysia, he worked on two-year contracts, and, in Taiwan, he worked on three-year contracts. To increase his income, he worked overtime, often working from 8 am until 10 pm. He summarized these conditions “*Time is work and time is money.*” Since he realized that his main working aim is for earning money, he tried to gain as much as he could in order to be able to build a house or establish a business when he returned home. Although working abroad was harder and more tiring compared to working in the village, he felt that he was already accustomed to working hard. Furthermore, albeit his less work experience at the outset and relatively less factory education, he learned valuable lessons from his work abroad experiences about discipline and perseverance. Learning about work ethics and experiencing socialization opened up his thought, which created a foundation to the establishment of his self-employment economic activities after he returned to his home village. He stated:

In my experience, the downside of work was the lack of facilities. But, working in a factory in Malaysia or Taiwan was since the conditions of service were good, and there was at least average pay. I communicated with supervisors and other friends about job responsibility, rights, and standards for rewards, work situations, and discipline to reduce misunderstandings at work. From working abroad, I actually did learn how to work on anything from operating and pattern packing to transporting goods, to watching people's business habits and exploring areas that I did not know about before. Migration and working abroad opened up a whole other part of myself about what I would like to develop in the future.

Eventually, SW decided to become an entrepreneur when he returned home by creating self-employment. His decision was influenced by three family conditions: his parents were old, he wanted to support the growth and education of his children, and maximizing his family farmland. To initiate self-employment, he tapped into his empowering resources, mainly his farm and house lands. He set up a chicken farm in his parent's yard, where he built a stable for about 500 laying hens that cost about IDR 50 million (USD 5,000). This chicken farm was not particularly profitable since the costs and efforts exceeded the profits. Therefore, to

increase the family income, he cultivated his farmland by planting chili peppers and watermelons. His business strategy was to diversify his agricultural production and spread the profit across the ventures, which allowed him to increase his chicken farm to 1,000 stables.

On the expense side of the ledger, such as the cost of daily food, he used the house yard and planted vegetables and spices, and he bought inexpensive rice from his extended family. With this strategy, he obtained free or inexpensive food. Regarding other expenses, his family spent little. They rarely used gasoline, and they used firewood for cooking, water was usually free, electricity was used only for television and electric lights, and telephone vouchers were exclusively used for business and family members communications. Regarding entrepreneurship and survival strategies, he employed the specific types of coping strategies referred to income-maximizing and consumption-minimizing strategies (Snel & Staring, 2001). The household coping strategies to support business activities aimed to obtain revenue from a variety of sources, including yard farming and a frugal budget, when the business income was insufficient to support daily needs. To cope with entrepreneurship, Snel and Staring (2001) referred to this type of activity as “subsistence production”—that is, productive activities that yield cash income and reduce expenditures—which plays an important part in the survival of return migrant entrepreneurs' households.

In situations like SW's, monthly expenses tend to support business activities, such as animal feed, stable hygiene, seed plants, agricultural processing, and children's schooling. In this situation, it is not possible to grow savings because it is necessary to improve and maintain high-quality harvests. Moreover, there is no support from local banks or governmental subsidies for small-scale village entrepreneurs like SW, except for private micro-credit institutions with high-interest rates. According to SW, a letter of guarantee, such as certificate of house or vehicle ownership, is required to obtain bank credit. In villages, banks typically require lenders to submit letters of guarantee and make fixed monthly payments. SW's family only had a certificate of house ownership, and they did not want to establish collateral with the bank or generate uncertain revenue, so they did not want to borrow money from the bank.

Price fluctuation is another constraint on business sustainability because inflation influences the market prices of agricultural products. When prices are high, so are profits, but when prices drop, risks increase. SW dealt with this issue by maintaining a savings account at the bank and borrowing from his elder brother if he

needed capital or market assistance. In addition, he developed a relationship with an intermediary produce collector from outside of the village through whom he marketed his produce to a broader market. Taken together, he generated an average gross income of IDR 5,000,000 (USD 370) per month from the egg business, a gross income of IDR 15,000,000 (USD 1,100) every three months from the chili plantation, and a net income of IDR 3,000,000 (USD 220) every two months from watermelon production. He also employed part-time workers to help him run the business. After overcoming some difficulties he encountered while establishing his business in the village, he had the opinion that *“Now, after having a stable business and getting moderate income, I am really not interested in working abroad as a TKI. Becoming an entrepreneur is better than labor.”*

2. Making adaptation

Return migrant entrepreneurs' businesses depend on and are even controlled by the traditional village structured economies. As explained in the previous part, price fluctuations constrain business sustainability. In the villages' subcontracting agricultural farming system, business conditions often depend on fluctuations in market prices, intermediaries, and/or temporary employment contracts. Local farmers are typically low-hierarchy labors who occupy an unstable position in the subcontracting farming system. Changes in market trends and climates as well as decline purchasing power influence return migrant entrepreneurs' abilities to organize or improve their business conditions. There are no guarantees for the longevity or profitability of any commercial establishment. Ms RM's experience with her tobacco business from 2014 to 2015 is an example of the effects of unstable production prices. She explained:

Dried tobacco leaf prices differ every year. They range from IDR 25,000 to IDR 35,000 (USD 1.7 to 2.4), and even dropped to IDR 5,000 (USD 0.4) in 2011. Tobacco factories and collectors control the price. The production cost for one hectare ranges from IDR 20,000,000 (USD 1,356), with a production of 1.2 tons of dried tobacco. Our profit at each time of harvest ranges from IDR 10,000,000 to IDR 15,000,000 (USD 678 to 1,017) for five months of work, or more than IDR 3,000,000 (more than USD 204) per month.

In the poultry business, Mr. SS, for instance, a entrepreneur in breeding and laying hen business in DM village, was forced to change from an individual production system to a *kemitraan* (partnership) in 2010 because of the larger financial crisis and his dependence

on intermediaries as material suppliers. In early 2010, the financial crisis inflated foreign exchange rates, which influenced Indonesia at the national level. *Peternak gurem* (small-scale poultry farmers) could not survive the fluctuations. SS stated that *“profit was too low and therefore there were no savings,”* since SS shifted to a subcontracting system. Under this system, they are only responsible for feeding chickens up to 36 days old, providing stable chicken-breeding facilities and equipment, and selling the chickens to their partner companies. The total gross profit earned per month under this system was about IDR 4,000,000 (USD 271), excluding the expenses of electricity, water, and gas.

According to JT, Head of *Serikat Buruh Migrant Indonesia* (SBMI - Indonesian Migrant Association) in Malang Regency, the important entrepreneurial constraints on return migrants include their minimal business experience and limited capital. These shortcomings are encountered frequently by the return migrants. In addition, their business operations are usually located far from the village's main road access, which impedes their abilities to reach the basic sources of trade, markets, and supplies. To increase their business capacities, hardware, such as vehicles and tools, are necessary. However, these additions require capital, and to obtain capital, these entrepreneurs might (or must) emigrate for work to gain capital for entrepreneurship. These problems create slow growth for agricultural businesses. Recognizing this, the majority of return migrants enter business as producers or retailers, who, in turn, highly depend on brokers who operate in the background. JT stated that stakeholders (local governments and immigrant associations) should involve in the efforts of return migrants' empowerment by rewarding return migrant entrepreneurs' hard work with financial credit assistance to boost their business activities. Alternatively, the stakeholders' support could also manifest in the forms of the initiation of business product exhibitions for promotions and market expansion. The supportive efforts should be initiated because there are increasing number of return migrants who face similar challenging constraints.

The return migrants who worked as entrepreneurs might experience monthly income decline of about 20 percent in comparison with their wages while working abroad. In Taiwan, monthly income of TWD 15,580–20,000 was equivalent to about IDR 6,500,000–8,000,000 (USD 475–600). Thus, among the numerous concerns of return migrants, the issues related to income are at the top of the list. Nevertheless, many of them prefer to work in their home villages to be near their family members. Most of the informants viewed this situation in positive terms; for example, *“Although the salary is low, at least we still can survive. Just keep working hard*

and being creative.” However, this situation might compel the return migrants to employ risky business strategies in order to maintain their entrepreneurial ventures and household finances. They optimized their support and resources from family members to increase their incomes. For example, they sold chicken manure as well as home-grown spices and vegetables, substituted incomes (e.g., borrowing from family members’ incomes or dividing business profits to support their own businesses) to support the business ventures, allowed husbands or wives to establish independent businesses, and/or pursued other activities to generate income.

The usual approach of these entrepreneurs to develop a business was to save money and then purchase goods to increase their production assets or renovate their establishments to improve their design. My field research revealed that people tended to adhere to the principle of *arisan* (rotation credit) to accumulate money. Farmers or breeders minimized their business expenses and increased their incomes by using or selling organic fertilizer obtained from farm animals. Grocery or other store owners used a credit system for purchasers, and people in the service sector implemented a proactive system. These individuals established groups or associations where they could share information and distribute jobs. To promote their businesses, entrepreneurs in the public sector tended to offer goods at low prices and as product packages. Besides that, farmers and breeders also sold their harvests at retail prices to local traders and direct intermediaries. In addition, some entrepreneurs expanded their business prospects by offering services that could be used by governmental programs, such as infrastructural development. These services included providing materials at low prices or engaging in food catering. Numerous other alternative strategies were employed to develop businesses and improve sustainability.

The entrepreneurs’ stories and experiences reflect the pathways and the constraints faced by the return migrant entrepreneurs regarding village adaptation (structural adjustment) and home condition. The types of sustainable living that developed after returning home (coping with entrepreneurship) depended on the extents of their self-awareness and creativity. Similar with findings of MICRA (2008) and Rodolfo (2006), successful implementation of social remittances at home village explicitly shows the benefit from the return migrants’ experiences in their home and host countries. The accumulation of their experiences help them to develop their entrepreneurship, strategic entrepreneurial activities, and household spending

control. This study also found that the return migrants can only successfully develop their entrepreneurship if (i) they can feasibly meet their basic needs; (ii) they can establish productive economy activities or improve their financial situations; and (iii) they can develop their business activities independently. Unfortunately, the return migrants are unable to access credit, such as bank loans, to support their entrepreneurial endeavours. If return-migrants were empowered by their knowledge of self-employment and dissemination, they would succeed in their home villages. Also, in the self-employment process, as their businesses grow, it is possible that they would need to hire non-household employees.

Entrepreneurship Implications

Most of the interviewed return migrant entrepreneurs acknowledge that they are happy to be back to their hometown, even though their confidence is low concerning the start of their business. It is because they always compare the living and working conditions in their villages to those abroad. The appeal of a fixed monthly salary and the ability to send money to the family left behind sometimes drives re-migration. Afterward, they set up and established economic activity, and they preferred to live in their home villages. As early as they could, they launched businesses rather than work until they earned a substantial amount of money since the latter option results in unsuccessful business ventures. Starting a business from the bottom and following through with this process are common approaches to entrepreneurship, excepting those who have access to considerable financial support.

Working abroad allows the returning migrant to achieve ownership of a farm business, by purchasing a plot land, or by opening innovative agricultural business (e.g. cattle, poultry, fruits, worms, etc.). Land ownership is made possible by earnings from overseas work; previously land-owning households and farmers manage to buy land. Those involved in business use earnings to increase their business capital. Most of the migrant returnees continue to engage in agricultural work as either sharecroppers, leaseholders, landowners, or just farm labors. They also perform other agriculture-related jobs, such as vegetable dealing, harvesting, or acting as intermediaries between sellers and buyers of agricultural products. Similarly, studies by White (2016) and Pithaloka (2016) on young migrants in Yogyakarta and Sumbawa show the economic status of people who used to be day labors or homemakers change due to their economic activities as entrepreneurs.

The successful development of entrepreneurial activities by the return migrants has three implications. They are as follows: self-transformation, economic change, and the shift in the profession from migrant worker to entrepreneur through self-empowered business activities that bring economic benefits to their lives. The return migrant entrepreneurship has an economic stimulation effect on the community, evidencing positive benefits such as the transfer of business expertise, social activism, the exchange of information through the development of local cooperatives, and the exchange of knowledge and experience at migrant community events.

There are at least three types of migrant self-transformation in the migration and economic changing status. Firstly, there is a change in mentality from a 'coolie' in the country of origin to a factory mechanic, boat crewmember, housekeeper, and caregiver. This situation also changes the migrant paradigm from being someone who will always be a migrant worker to returning home with improved work skills in the near future. Secondly, they transform from *wong ndeso* (peasantry) into a knowledgeable person (townspeople) because they have been away from the land, spent most of their time working, and lived abroad, mostly in city areas. Their international movements also influence the migration culture of their community. Thirdly, they transform from traditional to more modern ways due to their migration abroad experiences. They learnt to see other parts of the world and the realities of life. This change makes a continual and indispensable contribution to the home village's development. The stories above reflected on how the migration experience meant to migrants and rationalized the economic steps they need to take when they return home.

Another implication from the return migrants' entrepreneurial activities is the development of the combined social and economic activities by the return migrants have enabled them to be considered as heroes by their families and neighbours. Similar with Zahra & Wright (2015) and Nyberg-Sørensen, Hear, and Engberg-Pedersen (2002)'s observations, the formation of social solidarity in migrant communities has a very positive result as well. Moreover, a long-term consequence of successful return migrant entrepreneurship at home villages is the reduction of remigration. It is because migrants who are unemployed after returning home are more likely to consider migrating again.

It can be summarized that the return migrant entrepreneurship in their home villages mostly using three patterns management – return, remittance, and reintegration. The return migrants are the actors

because they provide the remittances of working abroad. Besides sending money, they remit new patterns of values, behaviours, and practices from their overseas experiences. They have the competency and capacity to perceive how international labor migration may affect other people, view it from a broader context other than merely its contribution to the national economy. Within this international migration sequential process, small enterprises have emerged as critical sources of livelihood for the return migrants in home villages, compared to other job opportunities. Hence, a returnee can experience a 'rebirth'.

Entrepreneurship as a Career Choice

Return migrant entrepreneurship is a strategy followed by migrants to return to their homelands and resettle both economically and socially. It is recognized as a method by which the economically disadvantaged return migrants can sustain their livelihoods at home. These migrants develop sustainable livelihoods at their home region by becoming entrepreneurs and maximizing their human resources, such as money remittance, migration experience and self-awareness, knowledge production, and strategic adjustment. Since they bring different forms of capital with them when returning home, the migrants can participate in the labor market by resorting to either self-employment or entrepreneurship. From self-employment/entrepreneurial activities, their businesses can potentially grow to generate further employment. In this manner, the return migrant entrepreneurial activity may be understood as a response, method of adjustment, or strategy aimed at overcoming an inequitable economic relationship by creating jobs inside (or outside) the home village.

Entrepreneurship (self-employment) becomes a rational response to the opportunities discovered by the migrants during migration and upon their return to the home country. On returning to their home villages, the return migrants face the occupational choice of becoming either an entrepreneur or a formal wage worker. Entrepreneurs are more likely to have a prosperous household income than informal wage workers or farm workers. Moreover, since formal jobs may require a certification of skills or language proficiency or exploit different forms of capital, entering wage employment or the formal labor market can be more competitive than becoming an entrepreneur.

The potential for participating in wage employment have not been comprehensively recorded. Therefore, entrepreneurship is considered as 'one solution and strategy' for creating a sustainable livelihood for return

migrants by generating employment; providing new and better jobs; and, to some extent, reducing migration. Hence, it is vital that the return migrants consider entrepreneurial activities as an option since the labor market and corporate sector provide only a limited number of jobs for those who are appropriately qualified for their needs. In this study, I argue that entrepreneurship is an employment solution for the return migrants since we know that there is the only limited possibility for them to 'seize the future.' It is because the local economy or labor market in their home areas is still underdeveloped. In addition, the labor market in Indonesia cannot accommodate the abundance of the return migrants searching for wage employment. Therefore, these migrants, based on their experience and knowledge, can identify new opportunities by following entrepreneurship as a career choice and, in this manner, seize the future by establishing business in their home villages.

In initiating their economic future at home villages, the return migrants have to face tremendous challenges. In fact, without support, such as financial assistance, infrastructure development, and improved knowledge in entrepreneurial activities, it is impossible for their skills and entrepreneurship activities to improve and develop. Therefore, in terms of capacity building, they need help from local governments, NGOs, universities/academic scholars, friends, and family to empower the economic and social activities in their home village. In this study, we note that successful return migrant entrepreneurs can sustain their economic livelihoods and develop their careers by maximizing their individual/group resources networks.

According to Barth (1963) and Stewart (1992), entrepreneurship gives rise to positive effects (changes) through entrepreneurial activities. These effects (changes) demonstrate the role of the return migrants in developing self-employment opportunities, empowering entrepreneurship in ex-migrant communities, broadening the social basis for access to loans, and establishing new links for the transfer of information. The combined social and economic activities developed by the return migrants have enabled them to be considered as 'heroes' by their families and neighbours. The formation of social solidarity in migrant communities is a very positive result, as well. Moreover, a long-term consequence of successful return migrant entrepreneurship at home is the reduction of remigration, since migrants who are unemployed after returning home are more likely to consider migrating again.

CONCLUSION

Migrant workers are economically active after returning home, and most of them choose to engage in entrepreneurial activities. Based on the explanation above, migrants who shift their careers from migrant work to entrepreneurship are influenced by following conditions: (i) the shared experience that links migrants to their homelands; (ii) knowledge accumulation; and (iii) self-consciousness/self-awareness. The return migrants who develop entrepreneurship at home indicate that both individual and structural conditions play a role in their economic careers development. On the one hand, migration affords workers affluence and revenues from overseas work and return activities (i.e., occupations held upon return home) as well as exposes them to other ways of life, behaviours, and changes. Individual feedback on overseas migration is positive given the relatively high economic returns, capital investments, and formation of small-medium economic (entrepreneurial) activities. On the other hand, structural conditions may prevail wherein the village context, and business limitations become constraints to the economic career development. The return migrants utilize entrepreneurship to ensure sustainable livelihoods by activating the social remittance that they have gained through migration.

One cannot judge the degree of the return migrant entrepreneurship with a snapshot of the apparent successful mode; one has to examine motivation and processes. This study emphasized that social (and cultural) conditions are certainly important in the return migrant entrepreneurship activities. The return migrant entrepreneurship demonstrates the important role of individual norms and village traditions. Symbolic personal assets, such as self-esteem, family, working skills, and future insight, are also important. The return migrant entrepreneurship represents the individual and social sphere, and play an economically relevant role as symbolic collateral that lowers the barrier to financial access, and initiates entrepreneurial activities that may eventually turn into valuable economic capital for their future.

ACKNOWLEDGEMENTS

Many thanks to the journal anonymous reviewer, Ben White, Shin Ichiro Ishida, Makoto Ito, and the participants in the Agrifood XXIV International Conference 2017 for thought-provoking discussions on this article. The research for this study was supported by a grant from the POSCO TJ Park Foundation fiscal year 2017.

REFERENCES

- Anwar, R.P. (2013). Remittances and Village Development in Indonesia: The Case of Former Migrant Workers in South Korea from Ngoro-oro Village in Yogyakarta Special Region Province. *Thammasat Review*, 16, 99-119. Retrieved from <https://tcithaijo.org/index.php/tureview/article/view/40781>
- Anwar, R.P., & Chan, C. (2016). Contrasting Return-migrant Entrepreneurship Experiences in Javanese Villages. *International Migration*, 54(4), 150-163. doi: 10.1111/imig.12232
- Bachtiar, P.P., & Prasetyo, D.D. (2014). Return migration and the importance of reintegration policies. SMERU Policy Brief. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Barth, F. (1963). The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway. Bergen: Norwegian Universities Press.
- Benda-Beckman, F.V., Benda-Beckman, K.V., & Marks, H. (2000). Coping with Insecurity: an under all perspective on social security in the Third World. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boissevain, J. & Grotenbreg, H. (1986). Culture, structure and ethnic enterprise: the Surinamese of Amsterdam. *Ethnic and Racial Studies*, 9(1), 1-23. doi: [10.1080/01419870.1986.9993512](https://doi.org/10.1080/01419870.1986.9993512)
- Brettell, C.B. & Alstatt, K. (2007). The Agency of Ethnic Minority Entrepreneurs. Biographies of the self-Employed in Ethnic and Occupational Niches of the Urban Labor Market. *Journal of Anthropological Research*, 63(3), 383-397. Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/20479430>
- Cassarino, J.P. (2004). Theorizing return migration: The conceptual approach to return-migrants revisited. *International Journal on Multicultural Societies*, 6(2), 253-279. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001385/138592E.pdf>
- Chobanyan, H. (2013). Return Migration and Reintegration Issues: Armenia. CARIM-East Research Report 2013/03.
- de Haas, H., Fokkema, T., & Fihri, M.F. (2015). Return migration as failure or success? The determinants of return migration intentions among Moroccan migrants in Europe. *Journal of International Migration and Integration*, 16(1), 415-429. doi: 10.1007/s12134-014-0344-6.
- Gmelch, G. (1980). Return Migration. *Annual Review of Anthropology*, 9(1), 135-159. doi: 10.1146/annurev.an.09.100180.001031
- Heberer, T. (2004). Ethnic Entrepreneurs as Agents of Social Change. Entrepreneurs, clans, social obligations and ethnic resources: the case of the Liangshan Yi in Sichuan. Working Papers on East Asian Studies 54/2004. Germany: University of Duisburg-Essen, Institute for East Asian Studies.
- International Organization of Migration (IOM). (2010). International migration and migrant workers remittance in Indonesia. Makati: IOM.
- Knerr, B. (2012) 'Transfers from international migration: a strategy of economic and social stabilisation at national and household level', in Béatrice, Knerr (Eds.) *International Labour Migration*. Kassel: Kassel University Press.
- Levitt, P. (1998). Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. *International Migration Review*, 32(4), 926-948. doi: 10.1177/019791839803200404
- MICRA Foundation. (2008). Promoting Female Migrant Workers Access to Finance through the National Community Empowerment Program or Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jakarta: World Bank.
- Naning, K. (2015). Transisi Peran TKI Purna Di Ponorogo, Dari Buruh Menjadi Wirauasahawan Dan Tuan Tanah. (Return Migrant Role Transition in Ponorogo City. From Labor to Entrepreneur and Landowner). *Jurnal Ekuilibrium*, 12(1), 34-45. Retrieved from: <http://eprints.umpo.ac.id/3114/>
- Nyberg-Sørensen, N., Hear, N. V., & Engberg-Pedersen, P. (2002). The Migration-Development Nexus: Evidence and Policy Options. *International Migration*, 40(5), 49-73. doi: 10.1111/1468-2435.00211
- Phuong La., Trand, Ngoc, & Wang, Anna. (2015). Empowerment of Return Migrants for Economic Development: Capitalizing on Skills of Contract-based Vietnamese workers coming home from abroad. http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/public_relations/geneva-challenge/2015_SemiFinalists/Paper%2018_EmpowermentofReturnMigrants.pdf (accessed 18 March 2016)
- Pithaloka, V.D. (2016). Migrasi Kelompok Muda di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Analisis Sosial*, 20 (1&2), 165 – 182.
- Rahman, M.M. (2011). Gender dimensions of remittances: A study of Indonesian domestic workers in East and Southeast Asia. Available at SSRN 1938306.
- Rodolfo, C. (2006). Life After Migration: Returned Indonesian Women Migrant Workers In Central And East Java. [http://www.asianscholarship.org/asf/Annual Fellows/July8_9/Ma.%20Corazon%20C.%20Rodolfo,%20Life%20after%20Migration.DOC](http://www.asianscholarship.org/asf/Annual_Fellows/July8_9/Ma.%20Corazon%20C.%20Rodolfo,%20Life%20after%20Migration.DOC). (Access 11 Nov 2015).
- Rosalinda, H. (2013). Analysis on Social Remittances as the Impact of International Migration: Case Study: The Return-migrant Women in East Java Indonesia. The Asian Conference on the Social Sciences, Conference Proceedings. Osaka Japan.

- Spitzer, D. L. (2016). Return Migrant Entrepreneurship and the Migration and Development Agenda: A Focus on Filipino and Indonesian Migrant Workers. *Migration, Mobility, & Displacement*, 2(2): 24-39. doi: 10.18357/mmd22201615311
- Snel, E., & Staring, R. (2001). Poverty, migration, and coping strategies: an introduction. *Focaal: European Journal of Anthropology*, 38, 7-22.
- Stewart, A. (1992). A Prospectus on the Anthropology of Entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 16(2), 71-92. doi: 10.1177/104225879201600206
- Syafitri, W. (2014). Determinants of Labour Migration Decisions: The case of East Java, Indonesia. Doctoral thesis faculty of Economics and the faculty of Organic Agricultural Sciences of the University of Kassel.
- White, B. (2016). Rural Youth, Intergenerational Transition, and Social Change. *Jurnal Analisis Sosial*, 20(1&2), xi – xxii.
- Wijaya, H.R., Sukesi, K., & Rosalinda, H. (2015). A Development Model Toward Social-Protection Policies for the Indonesian Women Migrant Contract Workers as Domestic Workers in Hong Kong. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 5(5), 1-10.
- Wijers, G.D.M. (2013). Contributions to Transformative Change in Cambodia: A Study on Returnees as Institutional Entrepreneurs. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(1), 3–27.
- Yen, K.C., Platt, M., Yeoh, B.S.A. (2015). Structural conditions and agency in migrant decision making: A case of domestic and construction workers from Java, Indonesia”. Sussex: Migrating out of Poverty Research Programme Consortium.
- Yuniarto, P.R. (2016). Bridging People, Seizing the Future: Indonesian Migrant Entrepreneurs in Taiwan and Return-migrant Entrepreneurship in Malang, East Java, Indonesia. Ph.D. Dissertation, Dept. of Social Anthropology, Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University.
- Zahra, S. A., & Wright, M. (2016). Understanding the Social Role of Entrepreneurship. *Journal of Management Studies*, 53(4), 610-629. doi: doi:10.1111/joms.12149

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP *EMPLOYMENT* TRANSITION: ANALISIS SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL PADA TINGKAT INDIVIDU DI PULAU JAWA

(THE EFFECT OF LOCAL ELECTION ON EMPLOYMENT TRANSITION: ANALYSIS OF FORMAL AND INFORMAL SECTORS AT INDIVIDUAL LEVEL IN JAVA ISLAND)

Beni Teguh Gunawan

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Korespondensi penulis: beni.teguh@gmail.com

Abstract

Local elections (pilkada) have become a political phenomenon which presumably may impact other sectors, including the employment and labour sector. This sector is one of the attractive commodities to be sold by the head of government, thus vulnerable to the interests of certain parties. Economic rationale is all too often used by the electoral candidate through promises to provide employment, and making it easier to attract sympathy from the unemployed. This paper presents the results of the study about the impact of the election on the employment transition. The analysed impact is the change in the employment sector one year before the election (t-1) until the year in which election was hold (t). This study analyzes the 2010 population census data with a multinomial logit (MNL) analysis approach. Empirical results show that district elections have a positive and significant effect on the transition from unemployment to working in the informal and formal sectors. While individuals who have previously worked in the formal sector tend to survive in the sector. On the other hand, it turns out that the district elections did not have a significant impact on individuals who previously worked in the informal sector

Keywords: *local election, employment formal, informal, Java*

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi fenomena politik yang diduga berdampak ke berbagai sektor lainnya, tak terkecuali sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu komoditas yang menarik untuk dijual oleh kepala pemerintahan, sehingga sektor inipun rentan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu. Alasan ekonomi acapkali digunakan oleh calon kepala daerah melalui janji untuk menyediakan lapangan kerja, sehingga relatif lebih mudah menarik simpati para pengangguran. Tulisan ini memaparkan hasil kajian tentang dampak adanya pilkada terhadap *employment transition*. Dampak yang dilihat adalah perubahan sektor pekerjaan pada saat setahun sebelum pilkada dilakukan (t-1) hingga tahun yang sama saat pilkada dilakukan (t). Kajian ini menganalisis data sensus penduduk tahun 2010 dengan pendekatan analisis multinomial logit (MNL). Hasil empiris menunjukkan bahwa pilkada tingkat kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap transisi dari tidak bekerja menjadi bekerja di sektor informal dan formal. Sementara individu yang sebelumnya telah bekerja di sektor formal cenderung bertahan di sektor tersebut. Namun di sisi lain, pilkada tingkat kabupaten/kota ternyata tidak berdampak signifikan terhadap individu yang sebelumnya bekerja di sektor informal.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, ketenagakerjaan, formal, informal, Jawa

PENDAHULUAN

Penelitian yang mengaitkan antara politik dan ketenagakerjaan telah dilakukan beberapa kali. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Charles & Stephens (2013) yang menggunakan data tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Penelitian tersebut mengungkapkan pengaruh jumlah pekerja dan upah terhadap tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden dan gubernur. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pemilihan presiden. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mechtel & Potrafke (2013) di Jerman, menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja cenderung tinggi untuk menarik simpati pemilih sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa penelitian terkait tentang *job creation* diantaranya oleh Jespersen, Munch, & Skipper (2008), menunjukkan pelatihan kerja memiliki pengaruh positif terhadap *employment* dan pendapatan.

Jika dikaji lebih dalam, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu dilakukan di negara maju, sehingga pendekatan *employment* dilakukan secara umum tanpa membedakan sektor, karena di negara maju hanya terdapat sektor formal dan tidak mengenal sektor informal.. Di negara berkembang, pekerja di sektor informal memiliki persentase yang jauh lebih besar (sekitar 70 persen) dibandingkan dengan sektor formal (Bosch & Esteban-Pretel, 2012). Pekerjaan di sektor informal cenderung lebih mudah untuk diperoleh akan tetapi rentan terhadap risiko kerja karena merupakan kelompok pekerja yang tidak terlindungi (Hohberg & Lay, 2015). Di Indonesia, jumlah pekerja sektor informal masih menjadi yang terbesar, bahkan menurut data Sakernas BPS bulan Agustus tahun 2015, sektor informal memiliki proporsi sebesar 76,12 persen dibandingkan seluruh pekerja. Sektor informal adalah salah satu sektor yang sangat rentan untuk diintervensi. Hal ini dikarenakan sektor informal dalam perjanjian kerjanya tidak berdasarkan pada kontrak maupun hal-hal lain yang tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Sehingga pekerja sektor informal lebih mudah untuk keluar-masuk pasar kerja.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor menjadi komoditas yang menarik bagi kepala pemerintahan (Lewis-Beck and Paldam, 2000; Mueller, 2003). Sektor ini rentan terhadap kepentingan pihak-pihak tertentu terlebih dengan tingginya pengangguran di negara berkembang. Alasan ekonomi menjadi penyebab para pengangguran lebih tertarik dengan calon kepala daerah yang memberikan janji untuk bekerja, sehingga relatif lebih mudah untuk menarik simpati melalui tawaran pekerjaan.

Pemilihan kepala daerah diduga akan berdampak pada perekonomian, sebagaimana dikemukakan oleh Nordhaus (1975) yang dikenal dengan *Theory Business Cycle (PBC)*. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku pemerintahan untuk meningkatkan jumlah pemilih dalam menghadapi pemilihan umum dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Di Indonesia sendiri, pemilihan kepala pemerintah, baik itu tingkat pusat hingga kabupaten/kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tingkatan terendah pemilihan kepala daerah adalah kabupaten/kota untuk memilih bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota, kemudian tingkatan provinsi untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan tingkatan nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden. Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di tingkat nasional hingga kabupaten/kota.

Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil kajian tentang dampak dari diadakannya pilkada, baik pada tingkatan kabupaten/kota maupun provinsi, terhadap *employment transition* di daerah tersebut. Dampak yang dilihat adalah perubahan sektor pekerjaan pada saat setahun sebelum pilkada dilakukan (t-1) hingga tahun yang sama saat pilkada dilakukan (t). Tingkatan analisis yang dilihat adalah tingkat individu, di mana transisi yang dilihat adalah dari tidak bekerja (N) ke bekerja sektor formal (F), tidak bekerja (N) ke bekerja sektor informal (I), tetap dalam kondisi tidak bekerja (N ke N), dari sektor informal (I) ke sektor formal (F), tetap pada sektor informal (I ke I), sektor informal (I) menjadi tidak bekerja (N), tetap di sektor formal (F ke F), sektor formal (F) ke sektor informal (I), dan dari sektor formal (F) menjadi tidak bekerja (N). Pemilihan umum tingkat nasional atau pemilu tidak disertakan dalam

analisis karena dampaknya tidak dapat dibedakan per daerah, melainkan satu negara.

Analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis multinomial logit (MNL), sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Agustus 2015 Data sekunder ketenagakerjaan tingkatan individu di Indonesia umumnya tersedia dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS dan *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) yang dilakukan oleh RAND. Sakernas memiliki keunggulan pada jumlah sampel dan adanya penimbang, sehingga lebih representatif untuk mewakili data ketenagakerjaan nasional. Sedangkan IFLS memiliki keunggulan pada kedalaman data dan metode pengamatan individu yang dilakukan secara panel. Karena penelitian ini menggunakan transisi hanya satu tahun, data Sakernas masih mampu untuk mengakomodasi.

KERANGKA TEORI

Ada dua tipe dasar model mengenai hubungan politik ekonomi dengan ketenagakerjaan. Tipe pertama adalah *opportunistic* dan teori kedua adalah teori partisan. Tipe *opportunistic* mewakili individu politisi untuk meningkatkan peluangnya dalam pemilihan kepala daerah. Tipe politik partisan diwakili oleh teori partisan atau lebih dikenal dengan *partisan theory* (PT). Siklus bisnis politik partisan adalah fluktuasi dalam variabel ekonomi makro setelah atau antara periode elektoral yang dihasilkan oleh para pemimpin yang berbeda tujuan kebijakan.

Teori *political business cycle* (PBC) pertama kali dikemukakan oleh Nordhaus pada tahun 1975. Teori ini meletakkan dasar struktur perekonomian pada kurva Philips. Teori ini menunjukkan bagaimana perilaku pemerintahan dalam menghadapi pilkada terkait dengan ketenagakerjaan. Kurva Philips menggambarkan hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek (Rogoff, 1990). Teori PBC merupakan gambaran bagaimana upaya calon kepala daerah dalam meningkatkan elektabilitasnya.. Teori PBC menggambarkan bahwa pada umumnya *voter* hanya melihat kinerja calon kepala daerah dalam jangka pendek.

Penilaian jangka pendek ini menjadi dasar bagi calon kepala daerah untuk meningkatkan jumlah *voter*. Peluang terpilih diasumsikan sebagai bentuk kepuasan *voter* terhadap kinerja calon kepala daerah (Shi & Svensson, 2006). Dalam hal ini, calon petahana lebih diuntungkan dibandingkan calon non-petahana, karena calon petahana memiliki kontrol terhadap fiskal, sehingga program-program kerjanya diarahkan untuk meningkatkan elektabilitas yang bersangkutan. Kondisi perekonomian yang meningkat dalam *short-run* ditandai dengan peningkatan inflasi, pun demikian perekonomian yang meningkat akan memengaruhi sektor ketenagakerjaan karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.

Partisan theory (PT) pertama kali dikemukakan oleh Hibbs tahun 1977. Konsep PT hampir sama dengan PBC, PT lebih bersifat ideologis terkait dengan partai-partai yang terlibat dalam pilkada. *Non rational expectation* menjadi dasar dari masing-masing partai politik dalam memaksimalkan *utility* kelompoknya. *Partisan theory* pada umumnya berlaku secara empiris, jika dalam kondisi inflasi berada dalam kecenderungan tinggi dan pengangguran dalam kondisi kecenderungan rendah. Akan tetapi, kondisi inflasi yang tinggi dalam *long-run* akan berdampak buruk pada perekonomian (Mankiw, 2001). Calon pemimpin yang menganggap bahwa *voter* adalah sebuah investasi akan berpikir jauh ke depan dan tidak akan memanfaatkan kondisi perekonomian jangka pendek untuk meningkatkan elektabilitasnya. Hal ini tentu berlawanan dengan calon kepala daerah yang hanya bertujuan untuk meningkatkan popularitas sesaat. Jika didasarkan pada teori PBC, sektor ketenagakerjaan adalah sektor yang menarik untuk diintervensi. Pengurangan pengangguran dalam jangka pendek akan memberikan opini positif kepada calon kepala daerah. Dan sektor informal sebagai sektor yang lebih mudah untuk diciptakan dan dihapuskan adalah pilihan yang paling realistis. Sifat dari sektor informal sering disebut sebagai *unregulated jobs* karena cenderung tidak mengikuti regulasi dan tidak terkendala birokrasi pemerintahan (Ulysees, 2010).

Sektor pekerjaan di negara berkembang terbagi menjadi sektor formal dan informal. Sektor formal diasumsikan sebagai sektor yang normatif,

mengikuti prinsip-prinsip dan aturan ketenagakerjaan. Sementara sektor informal cenderung dipandang sektor yang lemah dalam hal penerapan aturan ketenagakerjaan. Jika dikaitkan dengan teori PBC dan PT, sektor yang rentan terhadap intervensi adalah sektor informal. Melihat tingginya jumlah pekerja informal di negara berkembang khususnya di Indonesia, diasumsikan teori PBC dan PT ini juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah.

Data Sakernas yang digunakan dalam penelitian ini dirilis oleh BPS dua kali dalam satu tahun, yaitu Februari dan Agustus. Tulisan ini menggunakan data Sakernas bulan Agustus karena memiliki sampel yang lebih besar sehingga dapat merepresentasikan tingkat kabupaten/kota. Data tentang pemilihan kepala daerah termasuk calon pesertanya diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengaruh pilkada terhadap pola ketenagakerjaan sektor formal dan informal dilihat secara individu per angkatan kerja pada saat t-1 dan t, di mana t adalah tahun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Analisis empiris akan menggunakan analisis regresi multinomial logit (MNL) dengan variabel dependen adalah transisi dari tidak bekerja (N) ke bekerja sektor formal (F), tidak bekerja (N) ke bekerja sektor informal (I), tetap dalam kondisi tidak bekerja (N ke N), dari sektor informal (I) ke sektor formal (F), tetap pada sektor informal (I ke I), sektor informal (I) menjadi tidak bekerja (N), tetap di sektor formal (F ke F), sektor formal (F) ke sektor informal (I), dan dari sektor formal (F) menjadi tidak bekerja (N).

Daerah yang dianalisis dalam studi ini adalah wilayah Jawa karena Jawa merupakan konsentrasi penduduk di Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, sebanyak 57,48 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Sedangkan pemilihan dikaji untuk jangka waktu 2014-2015, karena pada tahun tersebut telah terwakili rentang waktu selama dan setelah pemilihan umum presiden dan legislatif. Pada kondisi tertentu, pilkada untuk tingkatan kabupaten/kota dan provinsi dilaksanakan bersamaan, hal ini tergantung pada berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah. Pembahasan yang

mendalam mengenai pekerja sektor formal dan informal perlu dilakukan untuk mengetahui definisi yang pasti dalam membedakan kelompok pekerja sektor formal dan informal.

Definisi Formal Dan Informal

Tinjauan terhadap tenaga kerja formal secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang definisi pekerja informal, demikian pula sebaliknya. Ditinjau dari tingkat kompleksitas, pekerja sektor informal memiliki sejumlah hal yang tidak dimiliki sektor formal. Dalam tinjauan ini fokus pada pekerja informal, sehingga kategori yang tidak termasuk dalam definisi informal dapat diartikan masuk ke dalam sektor formal.

Husmanns, (2004) memberikan gambaran mengenai definisi pekerja yang termasuk dalam kategori informal, yaitu

- a. Mereka yang dipekerjakan di sektor informal, meliputi:
 - 1) Pekerja yang berusaha sendiri pada perusahaan miliknya;
 - 2) Pemberi kerja pada perusahaan informal;
 - 3) Pekerja pada sektor informal;
 - 4) Pekerja keluarga yang bekerja pada perusahaan informal;
 - 5) Anggota jaringan produsen informal/koperasi informal.
- b. Pekerja informal yang bekerja di luar sektor informal, khususnya:
 - 1) Pekerja pada sektor formal yang tidak terlindungi oleh perlindungan sosial, tidak terdaftar secara resmi, atau tidak mendapatkan hak pekerja seperti gaji tahunan atau cuti sakit yang tetap dibayar;
 - 2) Pekerja rumah tangga bayaran yang tidak terlindungi dan tidak mendapat hak-hak pekerja seperti di atas;
 - 3) Anggota rumah tangga yang dipekerjakan di perusahaan formal.

Selain definisi-definisi tersebut, ILO, et al (2013) juga menyertakan pekerja yang memproduksi barang secara khusus digunakan untuk kegunaan akhir di rumah tangga mereka, seperti pertanian subsisten/gurem untuk konsumsi sendiri sebagai pekerja informal

DATA DAN SPESIFIKASI EMPIRIS

Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung pertama kali dilakukan setelah masa reformasi, lebih spesifik lagi sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota pada tingkat kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur untuk tingkat provinsi.

Masa pemerintahan kepala daerah di Indonesia adalah 5 (lima) tahun dengan opsi mencalonkan kembali pada periode berikutnya. Sebelum tahun 2017, pilkada dilakukan secara parsial berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi. Pilkada serentak baru diberlakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No. 3 tahun 2016 di seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya telah usai. Informasi segala sesuatu tentang pemilihan daerah diperoleh dari KPU, sedangkan data pendukung untuk ketenagakerjaan diperoleh dari Sakernas.

Variabel bebas atau kovariat utama yang digunakan adalah ada atau tidaknya pilkada di suatu kabupaten/kota dan provinsi pada tahun

2015. Kovariat kedua adalah karakter spesifik individu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status perkawinan. Tingkat pendidikan dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan perguruan tinggi. Sedangkan kategori tidak bersekolah dimasukkan dalam kelompok SD/ sederajat. Kovariat ketiga adalah karakteristik lokal kabupaten/kota setempat yang meliputi PDRB untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu kabupaten/kota, jumlah penduduk usia kerja dan nilai upah minimum kabupaten dalam bentuk logaritma.

Analisis empiris yang digunakan dalam studi ini adalah regresi multinomial logit (MNL) dengan pendekatan Markov Chain. Asumsikan $i=1,2,...,n$ adalah indeks yang menggambarkan sampel individu ke- i dalam suatu pengamatan. Jika $state$ pada saat $t-1$ berada di j dan $state$ pada saat t berada di k , maka P_{jk} disebut peluang transisi (Meyn & Tweedie, 1993). Dengan demikian, probabilitas seorang individu berada di $state$ j pada saat $t-1$ dan berpindah ke $state$ k pada saat t adalah

$$P_{jk,t(i)} = P(Y_{t,i} = k | Y_{t-1,i} = j) \dots\dots\dots(1)$$

Transisi antar waktu dengan m $state$ dapat ditunjukkan dalam matriks berdimensi $m \times m$, di

mana $\sum_{k=1}^m P_{jk,t} = 1$, atau dalam matriks transisi ditunjukkan dalam Tabel 1 pada baris pertama

$$P(Y_t = F | Y_{t-1} = F) + P(Y_t = I | Y_{t-1} = F) + P(Y_t = N | Y_{t-1} = F) = 1 \dots\dots\dots(2)$$

di mana dalam studi ini akan menggunakan tiga $state$ baik saat $t-1$ maupun t , yaitu tidak bekerja

(N), bekerja di sektor informal (I) dan bekerja di sektor formal (F).

Tabel 1. Matriks transisi antara $t-1$ dan t

t-1	t		
	F	I	N
F	$P(Y_t=F Y_{t-1}=F)$	$P(Y_t=I Y_{t-1}=F)$	$P(Y_t=N Y_{t-1}=F)$
I	$P(Y_t=F Y_{t-1}=I)$	$P(Y_t=I Y_{t-1}=I)$	$P(Y_t=N Y_{t-1}=I)$
N	$P(Y_t=F Y_{t-1}=N)$	$P(Y_t=I Y_{t-1}=N)$	$P(Y_t=N Y_{t-1}=N)$

Probabilitas transisi individu antar waktu menjadi heterogen karena dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing individu dalam pasar kerja. Pengaruh variabel independen atau kovariat dapat diketahui sebagaimana pada orde pertama MC

dengan X_t adalah vektor yang menjelaskan variabel independen masing-masing individu maupun regional. Sehingga persamaan probabilitas bersyarat dapat ditunjukkan dengan

$$P_{jk,t(i)} = P(Y_{t,i} = k | Y_{t-1,i} = j, X_{t,i}) \dots\dots\dots(3)$$

Pertama, pengamatan akan dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan baris yang mewakili *state* pada saat t-1. Untuk notasi, akan digunakan angka 1 hingga 3, di mana berurutan mewakili status tidak bekerja, bekerja sektor informal dan formal. Masing-masing kelompok mewakili sebuah persamaan MNL dengan m pilihan yang merupakan *state* pada saat t. Seperti dalam model logit biasa, ide dasar MNL adalah untuk

mengekspresikan *log-odds* ($p_{jk(t)}/p_{jr(t)}$) dikaitkan dengan basis/referensi sebagai fungsi linear dari vektor kovariat. Menurut Nylund (2007), dalam MNL dengan menggunakan kovariat, pada individu i di mana pada saat t-1 berada di *state* j dan pada saat t berada di *state* k, secara umum dapat menggunakan persamaan MNL

$$g_k(X_{t,i}) = \log \left(\frac{P(Y_{t,i} = k | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i})}{P(Y_{t,i} = k^* | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i})} \right) = \beta_{k0} + \beta_{k1}X_{1i} + \dots + \beta_{kp}X_{pi}(4)$$

atau

$$P(Y_{t,i} = k | Y_{(t-1),i} = j, X_{t,i}) = \begin{cases} \frac{1}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} & \text{untuk } k = r \\ \frac{\exp(g_k(X_{t,i}))}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} & \text{untuk } k \neq r \end{cases} \dots\dots\dots(5)$$

Pada saat k=r maka $g_r(X_{t,i}) = 0$, sehingga $\exp(g_k(X_{t,i})) = 1$. Dalam model ini akan selalu diasumsikan r=j, yang dimaksudkan untuk menjadikan *state* pada saat t-1 pada masing-masing kelompok sebagai basis.

Pendugaan parameter dalam MNL menggunakan *maximum likelihood estimation* (MLE) Jika terdapat 3 alternatif pilihan saat t, maka *multinomial density* untuk satu observasi adalah

$$f(y) = p_1^{y_1} \cdot p_2^{y_2} \cdot p_3^{y_3} = \prod_{r=1}^3 p_r^{y_r} \dots\dots\dots(6)$$

Fungsi *likelihood* untuk N individu dengan 3 alternatif pilihan mengadopsi model dalam Cameron & Trivedi (2005) adalah

$$L = \prod_{i=1}^N [\prod_{r=1}^3 P_{ir}^{y_{ir}}] \dots\dots\dots(7)$$

Dengan salah satu dari k menjadi basis, akan diperoleh persamaan

$$L = \prod_{i=1}^N \left[\prod_{r=1}^3 \left[\frac{\exp(g_k(X_{t,i}))}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} \right]^{y_{ir}} \left[\frac{1}{\sum_{r=1}^3 \exp(g_r(X_{t,i}))} \right]^{y_{i0}} \right] \dots\dots\dots(8)$$

Dengan transformasi fungsi logaritma pada kedua sisinya akan diperoleh persamaan *loglikelihood* dengan pendugaan nilai parameter β .

Dalam model MNL interpretasi koefisien tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui *marginal effect* yang menunjukkan

pengaruh variabel independen tertentu terhadap probabilitas suatu pilihan. *Marginal effect* dapat diketahui dari variabel independen berupa data diskrit maupun kontinyu. *Marginal effect* variabel kontinyu dapat diketahui dengan turunan pertama model persamaan (6) terhadap variabel independen tertentu.

$$\frac{\partial P_{ik}}{\partial X_i} = P_{ik}(\beta_{pk} - \sum_r \beta_{pr} P_{ir}) \dots\dots\dots (9)$$

Jika dianalogikan dalam penelitian ini, peluang transisi seseorang misalnya berada di sektor formal pada saat t-1 dan berada di sektor informal pada

saat t akibat pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota domisili adalah

$$P_{informal|formal,t(i)} = P(Y_{t,i} = informal | Y_{t-1,i} = formal, dkab_{t,i}) = P_{i,dkab} (\beta_{dkab,informal} - (\beta_{ln_umk,informal} + \beta_{ln_pdrb,informal} + \beta_{puk,informal} + \beta_{deduc1,informal} + \beta_{deduc2,informal} + \beta_{deduc3,informal} + \beta_{jk,informal} + \beta_{dkawin,informal})) \dots\dots\dots (10)$$

Setiap variabel independen diamati sebagai amatan waktu ke-t, sehingga untuk tahun 2010, data yang digunakan adalah karakteristik individu dan regional pada tahun 2010, demikian juga untuk

tahun 2015. Restriksi yang dilakukan dalam data Sakernas yang pertama adalah data yang berasal dari responden Pulau Jawa. Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Nama variabel	Penjelasan
dkab	Variabel utama <i>dummy</i> pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bernilai 1 jika di kabupaten/kota tersebut melaksanakan pemilihan kepala daerah saat tahun t dan 0 untuk selainnya
ln_umk	Variabel upah minimum dalam bentuk logaritma
ln_pdrb	Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dalam bentuk logaritma pada saat t berdasarkan lapangan usaha dengan menyertakan sektor migas sebagai variabel kontrol kondisi perekonomian daerah
puk	Variabel puk merupakan rasio antara total penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun terhadap total penduduk di suatu daerah yang digunakan sebagai kontrol regional untuk mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja dalam pasar kerja
umur	Variabel umur diperoleh dari nilai absolut individu pada saat t. Dalam Sakernas tahun 2015, variabel umur terletak di poin pertanyaan b4_k5
deduc1	Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan, bernilai 1 jika pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SD atau tidak pernah bersekolah dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SD atau lebih rendah memiliki kode 1, 2, 3 dan 4
deduc2	Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan menengah pertama, bernilai 1 jika pendidikan yang ditamatkan adalah SLTP dan sederajat dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SLTP atau sederajat memiliki kode 5, 6, dan 7
deduc3	Variabel kontrol yang disertakan adalah <i>dummy</i> pendidikan menengah atas, bernilai 1 jika pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA dan sederajat dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, pendidikan berada di poin pertanyaan b5_r1a. Pendidikan setara SLTA atau sederajat memiliki kode 8, 9, dan 10

jk	<i>Dummy</i> jenis kelamin, bernilai 1 jika berjenis kelamin laki-laki dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, jenis kelamin berada di poin pertanyaan b4_k4
dkawin	<i>Dummy</i> status perkawinan, bernilai 1 jika status perkawinan menikah dan 0 jika selainnya. Dalam Sakernas 2015, status perkawinan berada di poin pertanyaan b4_k6

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran data, baik data pada variabel dependen maupun independen. Karena data yang digunakan dalam studi ini merupakan data survei sehingga untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan menggunakan penimbang. Penimbang dimaksudkan untuk mewakili beberapa pengamatan dalam populasi pada pengamatan sampel. Total sampel yang digunakan sebanyak 526.030.

Setelah data Sakernas direstriksi berdasarkan kategori usia 15-65 tahun, jumlah observasi tersisa sebanyak 93,25 persen. Jumlah observasi tanpa penimbang tahun 2010 pada restriksi kedua berdasarkan total pengamatan pulau Jawa secara sampel sebanyak 29,16 persen. Pengamatan secara populasi dengan penimbang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah transisi antar *state* antara *t-1* dan *t*. Dari struktur antar *state* dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 jumlah individu yang tidak bekerja menjadi mayoritas diantara lainnya. Proporsi pekerja formal menurun antar tahun 2014-2015, akan tetapi meningkat jika dilihat berdasarkan kelompok data tahun 2015.

Tabel 3 Jumlah Observasi Tahun 2015

Kelompok data	Observasi			
	Tanpa penimbang	Persentase	Dengan penimbang	Persentase
Total observasi	526.030	100,00	186.100.917	100,00
Kategori usia 15-65 tahun	490.547	93,25	174.238.603	93,63
Total pengamatan di Jawa	153.369	29,16	100.790.136	54,16

Sumber: Sakernas BPS, Agustus 2015

Analisis secara deskriptif juga dilihat pada variabel independen, pada kelompok ini juga dilihat berdasarkan variabel independen bersifat kontinyu maupun *dummy*. Pada kategori variabel independen kontinyu adalah upah minimum riil (umriil), umur, pdrb, dan puk, sedangkan pada kategori *dummy* adalah jenis kelamin (djk), deduc1, deduc2, deduc3, dan statk. Nilai upah minimum riil terkecil adalah 8937,121 dan terbesar adalah 25129,15 dengan rata-rata 14208 dan standar deviasi 5115,937. Variabel umur, sebagaimana telah dibatasi sebelumnya hanya pada kisaran 15 hingga 65 tahun dengan rata-rata 38,46 tahun. Analisis deskriptif pada variabel *dummy* jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Sedangkan dari status pernikahan, sebagian besar observasi merupakan individu yang telah menikah yang mencapai perbandingan 69,28 dan 30,72.

Dari *dummy* pendidikan dapat terlihat bahwa mayoritas observasi memiliki pendidikan SD/ sederajat atau tidak pernah bersekolah pada tahun 2015. Sedangkan jumlah terendah pada kedua kelompok tahun berada pada tingkat pendidikan tinggi.

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan kecenderungan bahwa transisi yang terjadi adalah perpindahan dalam *state* yang sama antara *t-1* dan *t*. Akan tetapi, dari pengamatan secara deskriptif tersebut tidak dapat disimpulkan secara tepat bagaimana pengaruh upah minimum terhadap transisi yang terjadi. Untuk informasi lebih lanjut dilakukan uji empiris untuk mengetahui dengan pasti pengaruh upah minimum terhadap *employment transition*.

b. Hasil Analisis Empiris

Hasil analisis empiris menggunakan regresi MNL disajikan pada Tabel 4. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengaruh pilkada terhadap *employment transition* berbeda antara daerah yang mengadakan pilkada dengan daerah yang tidak

mengadakan pilkada. Pilkada berdampak signifikan terhadap *employment transition* hampir di semua perpindahan sektor kecuali dari sektor informal ke tidak bekerja (I ke N), tetap di sektor informal (I ke I) dan dari sektor informal ke sektor formal (I ke F).

Tabel 4 *Marginal Effect* Dampak Pemilihan Kepala Daerah

State saat t-1	State saat t		
	Tidak Bekerja	Informal	Formal
Tidak bekerja	-0,0126***	0,0108***	0.0018*
Informal	-0,0017	0,0028	-0,0006
Formal	-0,0042*	-0,0053***	0,0095**

Keterangan:

***=signifikan pada alpha 1%, **=signifikan pada alpha 5%, * = signifikan pada alpha 10%

Pada kelompok rata-rata diperoleh hasil *marginal effect* sebanyak 9 nilai untuk masing-masing tahun. Nilai-nilai tersebut menunjukkan hubungan dan besaran pengaruh upah minimum terhadap masing-masing transisi. Interpretasi dari nilai *marginal effect* tahun 2010 adalah:

- Pada transisi N ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk tetap tidak bekerja sebesar 0,0126 poin
- Pada transisi N ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk berpindah dari tidak bekerja menjadi bekerja ke sektor informal sebesar 0,0108 poin
- Pada transisi N ke F pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk berpindah dari tidak bekerja menjadi bekerja ke sektor formal sebesar 0,0018 poin
- Pada transisi I ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan tidak signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor informal menjadi tidak bekerja sebesar 0,0017 poin
- Pada transisi I ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan tidak signifikan, di

mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk tetap di sektor informal sebesar 0,0028 poin

- Pada transisi I ke F pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan tidak signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor informal menjadi sektor formal sebesar 0,0006 poin
- Pada transisi F ke N pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor formal menjadi tidak bekerja sebesar 0,0042 poin
- Pada transisi F ke I pilkada kabupaten/kota berdampak negatif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menurunkan peluang individu untuk berpindah dari sektor formal menjadi sektor informal sebesar 0,0053 poin
- Pada transisi F ke I pilkada kabupaten/kota berdampak positif dan signifikan, di mana setiap adanya pilkada di suatu kabupaten/kota akan menaikkan peluang individu untuk tetap bekerja di sektor formal sebesar 0,0095 poin

Selain variabel utama pelaksanaan pilkada, dalam pembahasan ini juga akan ditampilkan pengaruh variabel-variabel independen lainnya. Variabel-variabel independen tersebut akan dibagi menjadi

2 kelompok untuk menunjukkan indikator makro dan mikro. Variabel independen yang menunjukkan indikator makro adalah upah minimum kabupaten/kota (ln_UMK), produk domestik regional bruto (ln_PDRB), dan penduduk usia kerja (PUK). Sementara itu, variabel

independen yang menunjukkan indikator mikro adalah variabel yang melekat pada masing-masing individu, yaitu umur, pendidikan (deduc1, deduc2, dan deduc3), jenis kelamin (jk), dan status perkawinan (dkawin).

Tabel 5 Marginal Effect Variabel Makro

State saat t-1	State saat t		
	Tidak Bekerja	Informal	Formal
ln_umk			
Tidak Bekerja	0,1297903**	-0,1319827**	0,0021925
Informal	-0,0150522**	0,0116359**	0,0034163*
Formal	-0,0112107**	-0,0246872**	0,0358979**
ln_pdrb			
Tidak Bekerja	0,0153521**	-0,0148472**	-0,0005049
Informal	0,0094227**	-0,0112303**	0,0018076*
Formal	0,0013005	-0,0004596	-0,0004596
puk			
Tidak Bekerja	-0,0000151**	0,0000126**	0,00000253*
Informal	-0,00000782**	0,00000632**	0,00000149
Formal	-0,00000279	0,00000607**	-0,00000328

Keterangan:

**=signifikan pada alpha 1%, * = signifikan pada alpha 10%

Pada variabel indikator makro UMK, transisi pekerja dari tidak bekerja ke formal tidak signifikan, sementara transisi lainnya signifikan. Kondisi yang sama juga terjadi variabel PDRB. Sementara untuk variabel PUK, justru transisi dari tidak bekerja ke formal signifikan. Artinya, setiap kenaikan 1 persen penduduk usia kerja dibandingkan dengan total penduduk suatu kabupaten/kota akan meningkatkan kemungkinan pencari kerja untuk bekerja di sektor formal

sebesar 0,00000253. Hampir semua transisi pada variabel makro signifikan pada transisi dari tidak bekerja dan dari informal. Pada variabel UMK, hampir semua transisi berdampak signifikan, kecuali dari tidak bekerja ke sektor formal. Sementara itu, untuk variabel PDRB, transisi dari sektor formal tidak signifikan ke semua sektor. Pada variabel PUK, ada dua transisi yang tidak signifikan, yaitu dari informal ke formal dan dari formal ke formal.

Tabel 6 Marginal Effect Variabel Mikro

State saat t-1	State saat t		
	Tidak Bekerja	Informal	Formal
umur			
Tidak Bekerja	-0,00044**	0,001473**	-0,00103**
Informal	-0,00099**	0,001628**	-0,00064**
Formal	-0,00188**	-0,00033**	0,002208**
deduc1			
Tidak Bekerja	-0,15827**	0,201504**	-0,04323**
Informal	0,031225**	-0,02526**	-0,00597**
Formal	0,03323**	0,028742**	-0,06197**
deduc2			
Tidak Bekerja	-0,07276**	0,120559**	-0,0478**
Informal	0,026772**	-0,02348**	-0,00329
Formal	0,044382**	0,024936**	-0,06932**
deduc3			
Tidak Bekerja	-0,05706**	0,074161**	-0,0171**

State saat t-1	State saat t		
	Tidak Bekerja	Informal	Formal
Informal	0,021191**	-0,0215**	0,000312
Formal	0,039139**	0,014126**	-0,05326**
	jk		
Tidak Bekerja	-0,18016**	0,1767**	0,003457**
Informal	-0,01535**	0,006912**	0,008433**
Formal	-0,02988**	0,009572**	0,020309**
	dkawin		
Tidak Bekerja	-0,12757**	0,141254**	-0,01369**
Informal	-0,02465**	0,026441**	-0,0018
Formal	-0,01269**	0,000428	0,012263**

Keterangan:

**=signifikan pada alpha 1%

Berbeda dengan variabel makro, pada variabel mikro hampir semua transisi signifikan. Hanya ada empat transisi yang tidak signifikan dari total 54 transisi pada variabel mikro ini, yaitu pada transisi dari informal ke formal pada variabel *dummy* deduc2. Transisi yang sama juga tidak signifikan pada variabel deduc 3 dan *dummy* kawin.

PEMBAHASAN

Analisis empiris memperlihatkan pengaruh pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, baik sektor formal maupun yang tidak bekerja. Adanya pilkada membuat peluang bekerja seseorang yang tidak bekerja menjadi lebih besar. Tingkat peluang seseorang untuk bekerja pada saat pilkada dilaksanakan lebih besar pada sektor informal daripada sektor formal. Sementara untuk individu yang telah bekerja di sektor formal cenderung untuk bertahan di sektor tersebut dan memiliki kemungkinan negatif untuk beralih menjadi tidak bekerja maupun ke sektor informal. Seperti yang telah diduga dalam teori, bahwa sektor informal merupakan sektor yang lebih mudah untuk diintervensi karena sektor ini merupakan *unregulated sector* yang cenderung tidak terikat oleh aturan-aturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mechtel dan Potrafke (2013), di mana calon kepala pemerintahan selalu memiliki motif dan pengaruh terhadap pasar kerja. Bentuk politisasi tersebut selalu menjadikan pengangguran sebagai obyek., Tulisan ini, secara lebih spesifik juga menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja yang dijadikan obyek oleh calon kepala daerah adalah sektor informal. Tulisan ini juga memberikan gambaran lain bahwa kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang

relatif berbeda dengan di negara maju, meskipun secara keseluruhan dampak yang ditimbulkan relatif sama.

Sjahrir, Kis-Katos, dan Schulze. (2013) menemukan bahwa pengaruh dari PBC untuk di wilayah Indonesia hanya terjadi pada saat pemilihan secara langsung, namun tidak terjadi pada pemilihan secara tidak langsung, serta pengaruhnya lebih besar pada saat calon petahana kembali mencalonkan diri. Temuan Choi (2011) juga mengindikasikan hal serupa, di mana pilkada di Indonesia tidak lebih dari mempertahankan dominasi dan bahkan membentuk dinasti politik di suatu daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia, gerakan kekerasan dimobilisasi melawan musuh etnis, apakah musuh-musuh ini adalah komunitas yang saingan (seperti konflik komunal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta Maluku Utara) atau negara (seperti dalam gerakan separatist di Aceh dan Papua) (Aspinall, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak fenomena kompleks yang timbul akibat adanya pelaksanaan pilkada, bukan hanya dari sisi ekonomi saja. Rinakit (2005) menemukan bahwa dari hasil observasi di 90 daerah, dengan rincian 4 provinsi dan 86 kabupaten/kota, pilkada di Indonesia tidak lebih dari sekedar unjuk kekuatan politik masing-masing di daerah. Kekuatan yang ditunjukkan termasuk di dalamnya politik uang.

Hasil analisis empiris juga membuktikan bahwa masih banyak variabel-variabel lain yang memengaruhi transisi dalam pasar kerja. Menurut Gunawan (2017), upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N).

Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada indikasi bahwa pasar tenaga kerja berpola *monopsony*. Pasar *monopsony* berlaku pada saat upah pasar meningkat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja. Ada kemungkinan tingginya ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan untuk membayar pekerja sebesar upah minimum atau lebih tinggi, sehingga kenaikan upah minimum tidak berdampak besar terhadap transisi ke sektor formal. Sektor informal menjadi sektor yang tidak “menarik” akibat kenaikan upah minimum, karena dampak upah minimum terhadap transisi ke sektor informal negatif dari apapun statusnya saat t-1, sedangkan transisi informal ke informal tidak berdampak pada upah minimum. Ini membuktikan bahwa di Indonesia upah minimum tidak membuat upah di sektor informal meningkat.

Jika dilihat secara keseluruhan per kelompok berdasarkan variabel, dapat diketahui bahwa pengaruh utama dari seseorang bertransisi antar sektor berasal dari dalam diri sendiri. Hasil analisis empiris memperlihatkan bahwa kelompok pada variabel mikro hampir seluruh transisinya signifikan, sementara untuk variabel makro lebih sedikit.

KESIMPULAN

Analisis empiris memperlihatkan pengaruh pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota signifikan terhadap transisi tenaga kerja dari tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N), tidak bekerja ke informal (N ke I), tidak bekerja ke formal (N ke F), formal ke formal (F ke F), formal ke informal (F ke I), dan formal ke tidak bekerja (F ke N), sedangkan pengaruhnya tidak signifikan pada transisi informal ke tidak bekerja (I ke N), informal ke informal (I ke I) dan informal ke formal (I ke F).

Secara umum, pilkada tingkat kabupaten/kota semakin memperluas kesempatan kerja, baik itu pada sektor formal dan informal. Meskipun begitu, secara peluang sektor informal memberikan kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan

sektor formal. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor lain, baik itu dari variabel makro maupun mikro. Jika dilihat berdasarkan hasil analisis empiris membuktikan bahwa transisi dalam pasar kerja lebih dipengaruhi oleh umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan dari masing-masing tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11, 289–319. doi: 10.1108/17506200710779521
- Bosch, M., & Esteban-Pretel, J. (2012). Job creation and job destruction in the presence of informal markets. *Journal of Development Economics*, 98(2), 270–286. doi: 10.1016/j.jdeveco.2011.08.004
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press. [http://doi.org/10.1016/S0304-4076\(00\)00050-6](http://doi.org/10.1016/S0304-4076(00)00050-6). Analysis (Vol. 100). doi: 10.1016/S0304-4076(00)00050-6
- Charles, K. K., & Stephens, M. (2013). Employment, Wages, and Voter Turnout. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(4), 111–143. doi: 10.1257/app.5.4.111
- Choi, N. (2011). *Local politics in Indonesia : pathways to power*. Routledge contemporary Southeast Asia series. doi: 10.1080/00472336.2012.721664
- Gunawan, B. T. (2010). *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Employment Transition: Analisis Level Individu di Pulau Jawa*. Depok: Tesis Universitas Indonesia.
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- Husmanns, R. (2004). *Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment*. Working Paper. diunduh dari: <http://purochioe.rojasdatabank.info/informalsecio2004.pdf>

- ILO, Ayyagari, M., Albert, Wu, Y., & Du, Y. (2013). *Informal Employment in Urban China: Measurement and Implications*.
- Jespersen, S. T., Munch, J. R., & Skipper, L. (2008). Costs and benefits of Danish active labour market programmes. *Labour Economics*, 15(5), 859–884. doi: 10.1016/j.labeco.2007.07.005
- Lewis-Beck, M. S., & Paldam, M. (2000). Economic voting: an introduction. *Electoral Studies*, 19(2–3), 113–121. doi: 10.1016/S0261-3794(99)00042-6
- Mankiw, N. . G. (2001). The Inexorable and Mysterious Tradeoff between Inflation and Unemployment. *The Economic Journal*, 111(471), C45–C61. doi: 10.1111/1468-0297.00619
- Mechtel, M., & Potrafke, N. (2013). Electoral cycles in active labor market policies. *Public Choice*, 156(1–2), 181–194. doi: 10.1007/s11127-011-9890-z
- Meyn, S. P., & Tweedie, R. L. (1993). Markov Chains and Stochastic Stability. *Springer-Verlag*, 792. doi: 10.2307/2965732
- Mueller, D. C. (2003). *Public Choice III. International Journal of Social Economics* (Vol. 30). doi: 10.1108/03068290310492896
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*. doi: 10.2307/2296528
- Rinakit, S. 2005. The Indonesian Military After The New Order. Singapore: ISEAS.
- Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. *The American Economic Review*, 80(1), 21–36. doi: 10.3386/w2428
- Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why? *Journal of Public Economics*, 90(8–9), 1367–1389. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.09.009>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Ulyssea, G. (2010). Regulation of entry, labor market institutions and the informal sector. *Journal of Development Economics*, 91(1), 87–99. doi: 10.1016/j.jdevco.2009.07.001

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

SURABAYA MENUJU KOTA RAMAH LANSIA: PELUANG DAN TANTANGAN

(SURABAYA TOWARD AGE-FRIENDLY CITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES)

Deshinta Vibriyanti

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi penulis: akuchie2@gmail.com

Abstract

Increasing number of the elderly globally and nationally has broad implications in family, community and state. WHO issued an age-friendly cities guideline to respond two demographic phenomena, namely aging population and high levels of urbanization. To maintain the quality of health, the elderly need both physical and social environments that consider their characteristics and needs. This facilitates the elderly to access the services, interact with others and actualize themselves optimally. This study aims to analyze the opportunities and challenges faced by Surabaya as one of the ageing population city in Indonesia to be an age-friendly city. Data was collected through quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach use several secondary data at the provincial and city levels such as the 2016 Susenas data, 2017 and the 2015 Sakernas. The qualitative approach include interviewing stakeholders, observing, and reviewing literature. This study concludes that Surabaya has an opportunity to be an age-friendly city. This is because Surabaya has local regulation that support fulfillment of elderly need, the existence of elderly institution, and the committed local leader to support the elderly. However, there are still many challenges faced by the Surabaya City, particularly related to inadequate physical facilities, housing, and employment opportunities for the elderly. It requires commitment and support from all elements of the city, public and private sector.

Keywords: *age-friendly cities, elderly services, Surabaya*

Abstrak

Peningkatan jumlah lansia secara global dan nasional membawa implikasi yang luas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia (*Aged Friendly Cities Guideline*) untuk merespons dua fenomena demografi yaitu penuaan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain menjaga kualitas kesehatan, lansia membutuhkan lingkungan baik fisik maupun sosial yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas dan tipe aktivitas lansia. Hal tersebut memungkinkan lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan, berinteraksi, dan mengaktualisasikan diri secara optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang berpenduduk tua agar dapat menyandang predikat kota ramah lansia. Data yang digunakan berasal dari penelitian Tim Lansia Puslit Kependudukan LIPI tahun 2016 di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder seperti data Susenas 2016, 2017 dan Sakernas 2015. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan *stakeholder*, observasi dan studi literatur. Studi ini memperlihatkan bahwa Kota Surabaya memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat menyandang predikat kota ramah lansia karena adanya peraturan daerah, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait lansia, dan komitmen kepala daerah yang tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Surabaya adalah fasilitas fisik yang kurang memadai, kondisi perumahan, dan kesempatan kerja bagi lansia. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja nyata dari segenap elemen kota, pemerintah dan pihak swasta.

Kata kunci: kota ramah lansia, pelayanan untuk lansia, kota Surabaya

PENDAHULUAN

Menjadi tua adalah suatu proses alami setiap manusia yang sering kali ditandai dengan kemunduran fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu lansia membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak untuk menyediakan lingkungan fisik dan sosial yang sehat, nyaman, dan aman. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, secara spasial lansia memiliki pilihan ruang yang lebih sempit, dimana lansia lebih nyaman berada di tengah komunitas dengan kultur dan kondisi yang relatif sama, serta membutuhkan tempat dan lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara fisik maupun psikologis (Hermawati, 2015).

Dukungan sosial (keluarga dan masyarakat) melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang melibatkan lansia di dalam masyarakat diharapkan mampu menghilangkan permasalahan-permasalahan psikologis yang kerap dialami lansia¹. Perubahan lingkungan sosial (keluarga dan masyarakat) yang cenderung bersifat individualis juga mendorong penurunan kondisi psikologis lansia. Kondisi tersebut akan semakin buruk jika lansia juga menghadapi kondisi lingkungan fisik yang kotor/kumuh dan tidak nyaman sehingga mereka mudah mengalami stress, depresi, hingga schizophrenia. Dengan melihat karakteristik lansia tersebut, maka kebutuhan lingkungan yang ramah terhadap lansia menjadi penting. Ramah lansia artinya mempertimbangkan kondisi fisik lansia yang cenderung menurun, memperhatikan karakteristik kebutuhan lansia, dan dapat mempermudah lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan.

Sebagai provinsi yang memiliki proporsi lansia ketiga terbesar di Indonesia, Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah lansia yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dalam enam tahun terakhir, jumlah lansia di Jawa Timur mengalami kenaikan dari 4,18 juta orang atau 11,17 persen (2010) menjadi 4,60 juta orang atau 11,80 persen dari total jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2016 (BPS Jawa Timur, 2010-2016). Data BPS tahun 2018 mencatat usia harapan hidup Provinsi Jawa Timur saat ini mencapai 70,80 tahun. Kondisi di atas juga terjadi di Kota Surabaya. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk lansia mencapai 227.527 jiwa atau sekitar 7,90 persen dari 6,77 persen di tahun 2010 (BPS Jawa Timur,

2016). Kondisi ini menjadikan Kota Surabaya masuk sebagai kota dengan kategori berpenduduk tua.

Studi ini bertujuan untuk menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi Kota Surabaya untuk mencapai predikat sebagai salah satu kota ramah lansia di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari penelitian Tim Lansia Puslit Kependudukan LIPI tahun 2016 di Kota Surabaya yang berjudul "Pemetaan Kondisi Lansia Dalam Keluarga Di Era Globalisasi". Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif (teknik wawancara dan observasi) dan studi literatur. Beberapa stakeholder yang menjadi narasumber diantaranya Komda Lansia Jawa Timur yang berpusat di Kota Surabaya, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (BKKBN Kota Surabaya), dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Di samping itu, digunakan pula data kuantitatif berupa beberapa data sekunder baik di tingkat provinsi maupun kota seperti data Susenas 2016, 2017 dan Sakernas 2015 dan Profil Penduduk Lansia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

PENDUDUK LANSIA DI KOTA SURABAYA

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, sehingga menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Selain itu, secara demografis Provinsi Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi urutan ketiga (setelah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah) dari 8 provinsi di Indonesia yang tergolong berstruktur penduduk tua. Pada tahun 2016, dari total jumlah populasi di Jawa Timur, terdapat 11,80 persen penduduk lansia. Angka tersebut lebih tinggi dibanding proporsi lansia di tingkat nasional yaitu sekitar 8,03 persen. Sementara itu, proporsi lansia di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sendiri bisa dikatakan cukup tinggi yaitu berkisar antara 7 persen hingga 18 persen. (BPS Jawa Timur, 2016)

Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk lansia terbesar ketiga di Jawa Timur. Urutan pertama diduduki oleh Kabupaten Kediri (308.625 jiwa), diikuti oleh Kabupaten Jember (293.187 jiwa), dan Kota Surabaya (219.056 jiwa). Namun demikian, dalam perhitungan proporsi yaitu perbandingan berdasarkan jumlah seluruh populasi penduduk maka lansia di kota Surabaya berjumlah sekitar 7,90 persen dari total populasi (2.848.583 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki jumlah total populasi yang besar. Berbeda dengan Kabupaten Pacitan yang memiliki jumlah penduduk lansia yang lebih kecil yaitu 97.094 jiwa namun jika dihitung

¹ Seperti ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, ketergantungan, perasaan tidak diperhatikan dan diterlantarkan, post power syndrome, empty nest syndrome, perasaan kesepian (*loneliness*), terasing dari lingkungan, dan lain sebagainya.

secara proporsi, jumlah lansia telah mencapai 17,94 persen dari total populasi penduduk (BPS Jawa Timur, 2016). Tingginya proporsi lansia di Kabupaten Pacitan disebabkan oleh jumlah populasi penduduk yang relatif rendah yaitu sekitar 552.307 jiwa. Perhitungan persentase kelompok usia tertentu per total jumlah populasi secara demografi digunakan untuk analisa yang bersifat makro. Sama halnya dengan menghitung rasio ketergantungan penduduk secara umum, rasio ketergantungan lansia dihitung melalui perbandingan antara jumlah penduduk lansia dengan jumlah penduduk usia produktif. Rendahnya persentase penduduk suatu kelompok tidak selamanya sejalan dengan jumlah absolut dari kelompok tersebut.

Penduduk lansia di Kota Surabaya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun persentase dari jumlah seluruh penduduk

(Tabel 1). Data BPS tahun 2010 mencatat jumlah lansia di Kota Surabaya sebanyak 187.593 jiwa atau sebesar 6,77 persen dari total penduduk. Peningkatan jumlah lansia di kota Surabaya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, hingga tahun 2017 jumlah lansia mencapai 236.541 jiwa atau 8,23 persen dari total populasi. Proporsi lansia laki-laki sebanyak 48,10 persen dan lansia perempuan sebesar 51,59 persen. Peningkatan jumlah penduduk lansia pada dasarnya dapat dijadikan refleksi semakin membaiknya kondisi kesehatan lansia dan juga kemajuan pelayanan kesehatan sehingga berpengaruh terhadap usia harapan hidup yang lebih panjang. Data BPS tahun 2016 mencatat usia harapan hidup penduduk kota Surabaya mencapai 71 tahun.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin
Kota Surabaya, Tahun 2010 – 2017

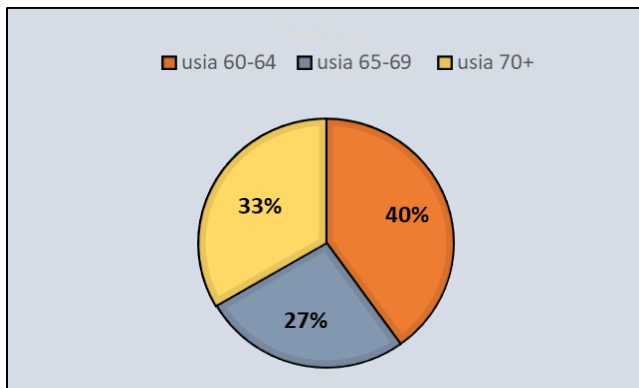
Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah Lansia (jiwa)	Total Populasi (jiwa)	Persentase Lansia Per Total Populasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	45,84	54,16	187.593	2.771.615	6,77
2011	46,20	53,80	192.564	2.788.932	6,90
2012	46,64	53,36	198.124	2.805.718	7,06
2013	47,00	53,00	204.429	2.821.929	7,24
2014	47,35	52,65	211.256	2.833.924	7,45
2015	47,63	52,37	219.164	2.848.583	7,69
2016	47,91	52,09	227.527	2.862.406	7,90
2017	48,10	51,59	236.541	2.874.699	8,23

Sumber: BPS Kota Surabaya tahun 2010-2017

Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut akan berdampak pada rasio ketergantungan penduduk lansia. Saat ini rasio ketergantungan penduduk lansia di Kota Surabaya pada tahun 2016 mencapai 11,35. Artinya setiap 100 orang penduduk Kota Surabaya yang produktif harus menanggung rata-rata 11 orang penduduk lansia (Susenas, 2016).

Jika melihat struktur demografis penduduk lansia di Kota Surabaya, kelompok umur yang paling banyak mendominasi adalah kelompok lansia muda (60-64 tahun) yaitu sebanyak 91.169 jiwa, lansia madya (65-69 tahun) sebanyak 60.305 jiwa dan nomor dua terbanyak adalah lansia tua (70+) yaitu 76.053 jiwa (Gambar 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok usia lansia muda memang masih yang terbanyak, namun demikian jika melihat proporsi lansia tua (usia 70+) dengan jumlah selisih yang tidak terlalu jauh justru memerlukan perhatian dari berbagai

pihak. Hal ini terutama terkait dengan kondisi kesehatan lansia karena semakin bertambahnya usia, persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar. Salah satu indikator kondisi kesehatan lansia adalah angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Data BPS tahun 2016 mencatat angka kesakitan penduduk lansia Kota Surabaya sebesar 20,67 persen. Artinya, bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 20-21 orang diantaranya mengalami sakit sehingga kegiatan sehari-hari terganggu. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, angka kesakitan lansia perempuan sedikit lebih rendah yaitu 20,14 persen dibanding lansia laki-laki sebesar 21,26 persen (Profil Penduduk Lansia Jawa Timur, 2016).



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Gambar 1

Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur di Kota Surabaya, 2016

Untuk mengetahui derajat kesehatan penduduk secara kasar maka digunakan indikator keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas, atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat kesehatan secara kasar. Data BPS tahun 2016 menunjukkan sebanyak 46,32 persen lansia mengeluhkan kesehatannya. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2015 yang tercatat 52,95 persen. Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka lansia perempuan lebih banyak mengeluhkan kesehatannya dibanding lansia laki-laki yaitu 47,70 persen dibanding 44,80 persen.

Perilaku pencarian pengobatan lansia dalam memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan dapat terlihat dari data BPS tahun 2016 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 35,53 persen lansia di Kota Surabaya dalam kondisi sakit namun tidak berobat jalan. Jika ditelusuri kembali maka alasan lansia tidak berobat jalan adalah: tidak ada biaya (1,48%), mengobati sendiri (48,72%), merasa tidak perlu (38,60%), dan lainnya (11,20%). Dari berbagai alasan tersebut, mengobati sendiri merupakan alasan terbanyak yang digunakan lansia dan kemudian diikuti oleh alasan merasa tidak perlu berobat. Di samping itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat bahwa cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kota Surabaya baru mencapai 78,81 persen. Artinya masih terdapat 21,19 persen yang belum tersentuh pelayanan kesehatan lanjut usia. Kelompok inilah yang semestinya menjadi prioritas utama dari pemerintah agar para lansia tersebut tetap memiliki akses menuju tempat pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka.

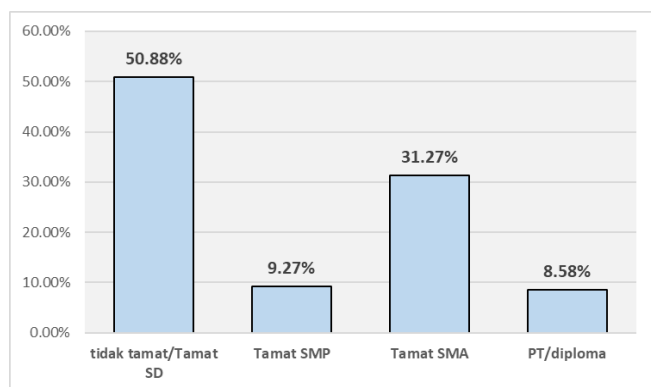
Berdasarkan data yang sama, menunjukkan bahwa terdapat 64,47 persen lansia sakit yang telah melakukan berobat jalan. Proporsi lansia menurut lokasi berobat jalan adalah: di Rumah Sakit Pemerintah (23,47%), Rumah Sakit swasta (13,53%), praktik dokter/bidan (13,03%), Klinik Dokter Bersama (17,72%), Puskesmas/Pustu (27,93%), UKBM² (0,78%), Praktik Batra³ (1,55%), dan lainnya (3,39%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas menjadi referensi terbanyak bagi lansia untuk datang dan berobat ketika dalam kondisi sakit. Hal ini kemungkinan karena jarak tempuh Puskesmas yang relatif dekat dengan tempat tinggal, selain itu juga Puskesmas juga menjadi fasilitas kesehatan pertama sebagai rujukan jika melakukan pengobatan dengan skema jaminan kesehatan (BPJS).

Kegiatan ekonomi lansia sebagaimana dikemukakan juga berhubungan dengan status dalam rumah tangga. Berdasarkan data BPS 2016 tercatat bahwa 68,31 persen lansia di Kota Surabaya berstatus sebagai kepala rumah tangga, sedangkan 31,69 persen berstatus sebagai anggota rumah tangga. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa lansia yang berperan sebagai kepala rumah tangga tersebut kemungkinan adalah para lansia yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangganya meskipun anak-anak mereka sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bagi kelompok penduduk lanjut usia.

Angkatan kerja lansia merupakan penduduk lansia yang mempunyai kegiatan ekonomi bekerja dan mencari pekerjaan. Kelompok penduduk lansia tersebut dikategorikan sebagai penduduk lansia potensial. Bagi negara-negara yang belum memiliki skema jaminan sosial hari tua yang mapan, seperti Indonesia, kelompok lansia potensial ini akan terus berusaha bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya (Murdianti & Gutomo, 2017). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa struktur umur lansia di Kota Surabaya proporsi lansia muda lebih banyak sehingga peluang lansia untuk tetap bekerja juga lebih tinggi. Struktur umur penduduk usia tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

² UKBM singkatan dari Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)

³ Praktek Batra singkatan dari Pengobatan Tradisional (termasuk dukun bersalin)

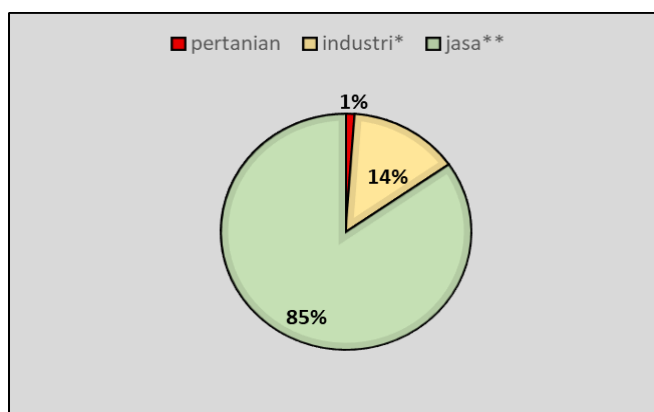


Sumber: Diolah dari data SUSENAS, 2016

Gambar 2

Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surabaya, 2016

TPAK penduduk lansia adalah perbandingan antara jumlah penduduk lansia yang bekerja dan mencari kerja dengan total populasi penduduk lansia suatu wilayah. Dari perhitungan tersebut diketahui TPAK lansia Kota Surabaya tahun 2015 yaitu 37,25. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu sebesar 35,04. Angka TPAK lansia laki-laki lebih tinggi yaitu 48,00 dibanding TPAK lansia perempuan sebesar 27,46 (Sakernas, Agustus 2015). Sesuai dengan karakteristik kota besar, maka lansia yang bekerja di Kota Surabaya mayoritas bekerja pada lapangan pekerjaan jasa (84,68%) (Gambar 3). Selanjutnya, dilihat dari status pekerjaan utama, proporsi lansia yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih mendominasi (34,88 persen), diikuti oleh lansia bekerja dengan status berusaha sendiri (31,72 persen) (Gambar 4).



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

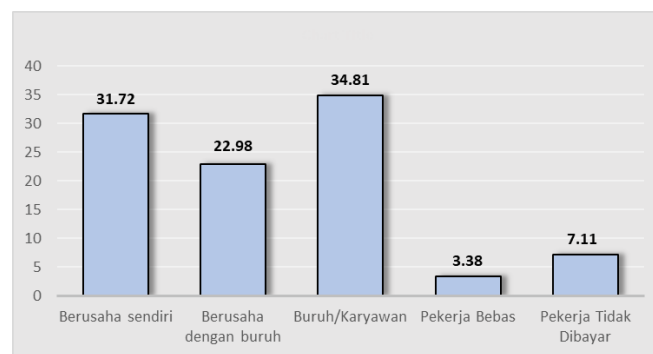
Keterangan:

*Industri: termasuk sektor industri, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, Air Minum, dan Konstruksi

** Jasa : termasuk sektor Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Jasa-jasa lainnya

Gambar 3

Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Surabaya, 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambar 4

Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surabaya, 2015

Penilaian Kota Ramah Lansia Bagi Surabaya

Diawali oleh pertemuan dunia kelanjutusiaan pada tahun 2002 di Madrid atau yang dikenal dengan *Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)*, yang diikuti 159 negara dari seluruh dunia termasuk Indonesia, berbagai negara meratifikasi pernyataan global terkait kelompok penduduk lansia. Pada pertemuan MIPAA tersebut disetujui beberapa kesepakatan utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia. Kesepakatan tersebut antara lain menggarisbawahi adanya pergeseran paradigma kelanjutusiaan tentang pembangunan panti berubah ke arah kelanjutusiaan aktif. Deklarasi MIPAA tersebut terdiri dari tiga pilar yaitu (1) partisipasi penduduk lansia dalam pembangunan negara, (2) peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sosial di tingkat dasar, dan (3) lingkungan yang mendukung dan ramah semua usia termasuk lansia.

Struktur penduduk yang menua saat ini dialami secara global oleh banyak negara di dunia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia dan tingkat urbanisasi secara global, hal ini membutuhkan perhatian yang lebih secara global pula. Pada tahun 2002, WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia (*Age Friendly Cities Guideline*) yang berisi semacam panduan untuk menciptakan sebuah kota yang mendorong penuaan penduduk secara aktif (*active ageing*) melalui pengoptimalisasian peluang bagi kesehatan, serta partisipasi dan keamanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Secara praktis, sebuah kota ramah lansia beradaptasi dalam hal struktur dan layanan sehingga dapat diakses secara inklusif bagi lansia sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Daftar pedoman WHO terkait kota ramah lansia ini mencakup 8 dimensi yaitu:

- 1) Gedung dan ruang terbuka (*building and outdoor space*);
- 2) Transportasi (*transportation*);
- 3) Perumahan (*housing*);
- 4) Partisipasi sosial (*social participation*);
- 5) Penghormatan dan keterlibatan sosial (*respect and social inclusion*);
- 6) Partisipasi sipil dan pekerjaan (*civil participation and employment*);
- 7) Komunikasi dan informasi (*communication and information*);
- 8) Dukungan masyarakat dan kesehatan (*community support and health services*).

Check list delapan dimensi kota ramah lansia yang dibuat WHO ini sangat komprehensif memperhatikan semua aspek lingkungan yang mendukung kehidupan seseorang, sehingga jika suatu tempat telah memenuhi indikator-indikator tersebut, bukan hanya menjadikan satu tempat ramah untuk lanjut usia, tetapi menjadi ramah untuk semua kelompok umur dan kelompok rentan lainnya termasuk anak-anak, kaum difabel, dan juga perempuan. Ketersediaan trotoar bebas hambatan, misalnya, meningkatkan mobilitas dan kemandirian orang cacat muda dan tua, ibu hamil dan perempuan, termasuk anak.

Sementara itu Dokumen Kota Ramah Lansia Global menyatakan bahwa kota yang ramah lansia adalah: (1) kawasan hunian dan rumah ramah lansia, (2) fasilitas publik dekat dengan hunian lansia agar mendorong kelanjutusiaan aktif, (3) transportasi dan infrastruktur yang ramah lansia, (4) fasilitas publik taman dan hiburan yang ramah usia termasuk lansia, (5) diskon khusus untuk transportasi, makanan, sandang dan papan yang ramah lansia (Nugroho, 2013).

Tahun 2008 Komnas Lansia melaksanakan seminar tentang “*Age Friendly City*” (Kota Ramah Lansia) yang dihadiri beberapa pakar dari negara ASEAN yang intinya mengupas tentang Kota Ramah Lansia Dunia, sebuah pedoman yang diluncurkan oleh WHO pada Kongres Gerontology dan Geriatry (IAGG) ke XVIII yang dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di Rio De Janerio, Brazil. Beberapa negara sepakat untuk melakukan penelitian di beberapa kota untuk meneliti kriteria yang disepakati untuk sebuah kota ramah lansia. Pada tahun 2007, mereka menyepakati untuk melaksanakan kegiatan penelitian di 33 kota dari 33 negara. Indonesia pada saat itu tidak diundang dan tidak diikutsertakan dalam penelitian. Kelompok riset yang meneliti itu dibantu oleh unsur dari pejabat pemerintahan, swasta, unsur masyarakat diwakili oleh para Non Government Organisasi (NGO-LSM), dan kalangan perguruan tinggi. Kebutuhan kota ramah lansia ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk

pengakuan bahwa kota yang ramah untuk penduduk lanjut usia merupakan suatu kebutuhan sebagai satu dari tiga prioritas Rencana Aksi Internasional tentang Kelanjutusiaan di Madrid yang dikukuhkan oleh PBB pada tahun 2002 dan dianggap sebagai respon logis untuk promosi rasa sehat dan kontribusi penduduk lansia dalam mempertahankan keberlangsungan kota.

Selanjutnya pada tahun 2013, Kota Surabaya menjadi salah satu dari 14 kota di Indonesia yang dikenakan pengujian kelayakan sebagai Kota Ramah Lansia dengan menggunakan 8 indikator yang ditetapkan oleh WHO. Studi ini dilakukan oleh Lembaga SurveyMETER bekerja sama dengan *Center for Ageing Studies*, Universitas Indonesia yang didanai oleh *Knowledge Sector, Australian Aid* yang dikelola oleh *Asian Foundation*. Penilaian dilakukan menggunakan kategori warna. Berdasarkan kategori warna yang disesuaikan dengan persentase skor penilaian masyarakat yang menyatakan Sesuai dan Sangat sesuai, Kota Surabaya dinarasikan sebagai kota yang belum sesuai dengan kategori Kota Ramah Lansia. Gambaran singkat hasil kajian kota Surabaya menuju Kota Ramah Lansia dalam studi tersebut terangkum dalam matriks di bawah ini.

Tabel 2.
Hasil Kajian Kelayakan Kota Surabaya Sebagai Kota Ramah Lansia

No.	Dimensi Assesment	Hasil (%)	Kategori Pencapaian*
1.	Gedung dan Ruang Terbuka	47,2	orange
2.	Transportasi	46,1	orange
3.	Perumahan	31,2	orange
4.	Partisipasi Sosial	59,3	kuning
5.	Penghormatan dan Inklusi/Keterlibatan Sosial	44,3	orange
6.	Partisipasi Sipil dan Pekerjaan	13,8	merah
7.	Komunikasi dan Informasi	46,6	orange
8.	Dukungan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan	60,6	kuning
Skor Total Berdasarkan Bobot		46,3	orange

*) Kategori pencapaian per 25 *percentile* dibentuk untuk membantu melakukan monitoring dari waktu ke waktu. Kategori pencapaian dibuat menjadi empat kategori yaitu Merah (< 25%), Orange (25% - 49%), Kuning (50% - 74%), dan Hijau (75% - 100%).

Berdasarkan kategori pencapaian yang disesuaikan dengan persentase skor penilaian yang menyatakan ‘Sesuai’ dan ‘Sangat sesuai’, maka kota Surabaya terbukti belum memenuhi standar kriteria sebagai kota ramah lansia yang ditetapkan oleh WHO. Studi ini kemudian menawarkan beberapa langkah strategis dalam upaya mendorong Kota Surabaya menjadi Kota Ramah Lansia tahun 2030. Adapun strategi yang direkomendasikan adalah:

1. Membuat perencanaan berdasarkan informasi dari SKPD-SKPD yang terkait mengenai pembenahan infrastruktur pada masing-masing dimensi pengukuran.
2. Pemantapan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan peraturan lalu lintas dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi yang lebih memperhatikan penduduk lansia.
3. Penguatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, kelompok masyarakat dan masyarakat secara umum untuk dapat lebih memperhatikan kelompok masyarakat lanjut usia.
4. Pembuatan aturan dan sosialisasi terhadap fasilitas pelayanan masyarakat atau fasilitas umum lainnya untuk dapat memberikan pelayanan khusus bagi penduduk lansia
5. Penguatan pencitraan kepada penduduk lanjut usia sebagai individu yang aktif, berdayaguna dan dapat berkarya dengan melibatkan media massa dan media elektronik.
6. Memasukkan muatan lokal mengenai peran dan penjelasan lanjut usia pada kurikulum sekolah untuk dapat memupuk rasa kasih sayang dan penghormatan terhadap penduduk lanjut usia sejak dini.
7. Melaksanakan riset terkait pengembangan kapasitas Kota Ramah Lansia pada masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pemerintah (SurveyMETER & CAS UI, 2013)

Pemerintah Kota Surabaya kemudian menentukan tahun 2015 sebagai titik tahun persiapan menuju Kota Ramah Lansia, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun menuju 2030. Strategi-strategi yang disusun kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan target setiap tahun. Dalam perkembangannya dari hasil *assessment* tahun 2013 yang dilakukan oleh Lembaga SurveyMETER di atas hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya terus berbenah diri dan melakukan berbagai program peningkatan pelayanan bagi penduduk lansia. Diantaranya yang nampak jelas adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Taman Lansia Kota Surabaya. Pelayanan pengobatan gratis, edukasi kesehatan lansia, senam sehat lansia, pemeriksaan kesehatan dan laboratorium

gratis menjadi beberapa agenda kegiatan yang banyak dimanfaatkan oleh lansia yang berkunjung di Taman Lansia. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terhitung bulan Desember 2017 jumlah pengunjung yang diperiksa di Taman Lansia telah mencapai 2.015 orang lansia. Melihat tanggapan positif dari masyarakat dan tingginya animo masyarakat Kota Surabaya, maka Dinas Kesehatan Kota Surabaya mendapat masukan untuk membuka pengobatan gratis di beberapa taman lain di Kota Surabaya.

Selain itu, pelayanan publik yang kini mulai mengakomodasi kebutuhan kaum lansia adalah pada bidang transportasi. Kaum lansia Kota Surabaya kini nyaman berpergian dengan menggunakan Suroboyo Bus yang menyediakan bangku prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan kaum difable, dengan sistem *low deck* (pijakan kaki yang dibuat rendah sehingga mudah untuk dinaiki). Lebih lanjut, terobosan program khusus lansia lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya adalah program penyediaan makanan, yaitu pemberian makanan berupa nasi, lauk pauk, dan buah yang diberikan setiap hari ke rumah-rumah hampir 20.000 orang lansia di Kota Surabaya. Program ini menurut Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya telah dimulai sejak tahun 2012 dan menjadi program satu-satunya yang ada di Indonesia. Program ini telah memiliki legalitas perundang-undangan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar.

Hingga awal tahun 2018, terhitung sebanyak 17.535 orang lansia yang mendapatkan layanan antar jatah makan setiap harinya. Setiap pukul 07.00 pagi petugas khusus pengantar rantang makanan sudah mulai bergerak mengantarkan makanan ke rumah-rumah lansia. Adapun kriteria lansia penerima program permakanan adalah ber-KTP Surabaya, sebatang kara, dan dari keluarga tidak mampu. Untuk tahun ini dana yang dianggarkan khusus untuk program ini mencapai 177 milyar dan kemungkinan setiap tahun akan bertambah seiring meningkatnya jumlah lansia di Kota Surabaya. Atas terobosan program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tersebut, maka pada awal tahun 2018 Kota Surabaya masuk dalam nominasi sebagai Kota Ramah Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (<https://www.jatimtimes.com/baca/176894/20180808/105400/surabaya-masuk-nominasi-kota-ramah-lansia/>).

PELUANG DAN TANTANGAN SURABAYA MENUJU KOTA RAMAH LANSIA

Peluang

Pertumbuhan jumlah penduduk lansia yang tinggi di Kota Surabaya merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan secara umum. Namun keberhasilan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya kebutuhan lansia yang tentunya berbeda dengan penduduk kelompok usia muda. Seperti penjelasan di atas, Kota Surabaya pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi kota Ramah Lansia. Kota Surabaya sudah memiliki modal dasar seperti partisipasi sosial masyarakat yang tinggi dan infrastruktur yang relatif memadai bagi lansia dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Berikut ini adalah pembahasan terkait peluang-peluang yang dimiliki oleh Kota Surabaya menuju Kota Ramah Lansia..

a. Perangkat Kebijakan

Perangkat kebijakan merupakan salah satu modal legal bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi dan program kegiatan. Perangkat kebijakan yang bersifat struktural dilakukan dari tingkat provinsi dan kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten/kota. Perangkat kebijakan juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat. Adapun perangkat kebijakan yang disusun terkait kesejahteraan penduduk lansia adalah:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial;
- h. perlindungan sosial;

Peraturan Daerah (Perda) mempunyai dua sisi yaitu bagi para lansia dan pemerintah daerah. Bagi para lansia, Perda merupakan jaminan hukum tentang penyediaan kesejahteraan. Selanjutnya, bagi pemerintah produk hukum tersebut menjadi dasar hukum untuk menyusun program dan penyediaan dana. Dengan Perda itu kedua pihak akan mempunyai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya dan mendapatkan hak-haknya.

Beberapa Perda yang terkait dengan lansia meliputi:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008/E1)
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 tahun 2017 Tentang Karang Werda.
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1). Pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, pada pasal 7 disebutkan peningkatan kesejahteraan lansia menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat.
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar
- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/612/436.1.2/2014 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya.

Selain berisi pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan lansia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 juga menyinggung kemungkinan untuk dibentuknya Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) tingkat provinsi yaitu tercantum pada pasal 40. Komda Lansia merupakan wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan berbagai program kegiatan terkait upaya peningkatan kesejahteraan Lansia. Komda Lansia mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur saat ini yang telah menetapkan Perda Lansia sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan yang telah terbentuk Komda Lansia sebanyak 20 Kabupaten/Kota. Bagi kabupaten/kota lainnya, telah terbit surat himbauan dari Gubernur Jawa Timur tertanggal 19 Januari 2015 agar kabupaten/kota menyusun Perda dan membentuk Komda Lansia.

Mengacu pada Keppres No 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, dan PERMENDAGRI No. 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia

dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, maka dibentuklah Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/612/436.1.2/2014. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Komda Lansia Kota Surabaya banyak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan SKPD terkait untuk mendorong terwujudnya Kota Surabaya sebagai Kota Ramah Lansia. Salah satu contoh diantaranya adalah upaya penataan kota seperti taman dan ruang terbuka bagi lansia. Bahkan saat ini program lain yang sedang digarap oleh Komisi Daerah Lansia adalah mendorong penyerapan tenaga kerja lansia yang potensial di sektor informal dengan mengajak pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lingkungan Kota Surabaya untuk dapat menampung para lansia potensial. Selain itu, karena mereka yang duduk sebagai dewan pengurus Komda Lansia Kota Surabaya merupakan pensiunan, akademisi, dosen, dan sebagainya maka beberapa kali Komda Lansia Surabaya melakukan kajian terkait kesejahteraan lansia di Kota Surabaya.

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Komda Lansia Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 terhadap 300 responden pra-lansia berjudul Identifikasi Potensi dan Kesiapan Pra-Lansia di Jawa Timur Dalam Memasuki Masa Lanjut Usia. Kajian ini diantaranya membuktikan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap potensi sosial ekonomi responden pra-lansia adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, bidang pekerjaan yang ditekuni saat ini, serta kepemilikan aset ekonomi. Sedangkan bidang usaha yang mayoritas dipilih oleh responden pra-lansia sebagai kegiatan yang ingin dilakukan setelah memasuki usia pensiun adalah wirausaha. Alasan ini terungkap didasari oleh keinginan agar kelak mereka (responden pre-lansia) tidak menjadi beban bagi orang lain di usia lanjut. Hasil kajian ini tentu saja penting untuk menjadi dasar dalam memotret aspirasi masyarakat pra-lansia agar nantinya diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk lansia (Komda Lansia Provinsi Jawa Timur, 2012). Salah satu program Komda Lansia lainnya yang sedang dirumuskan adalah memberikan pelayanan berupa konsultasi, advokasi, dan mediasi bagi para lansia yang menghadapi permasalahan hukum maupun masalah sosial lainnya. Lansia yang terkait permasalahan hukum ini belum banyak mendapat perhatian.

b. Kelembagaan Terkait Lansia

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia adalah dengan memahami kebutuhan-kebutuhan spesifik usia lanjut yang terdiri dari kebutuhan fisik/jasmani, kebutuhan psikis/mental, dan kebutuhan

sosial (Suardiman, 2011). Hasil penelitian tim Lansia Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI tahun 2017 menunjukkan bahwa keterlibatan lansia dalam kegiatan di masyarakat terbukti secara signifikan memengaruhi kualitas hidup lansia (Vibriyanti & Harfina, 2017). Oleh karena itu, pemerintah maupun masyarakat perlu menyediakan wadah bagi lansia untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan komunitasnya dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa bentuk wadah atau kelembagaan bagi lansia untuk melakukan berbagai kegiatan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

• Karang Werdha

Karang werda adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan lansia yang berada di tingkat kelurahan/desa. Di Jawa Timur, Karang Werdha telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.31 tahun 2017 Tentang Karang Werdha. Pergub ini merupakan pengganti Keputusan Gubernur No. 65 tahun 1996 Tentang Pedoman Pembentukan Karang Werdha di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks Peraturan Pemerintah No.72/2005 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, Karang Werdha termasuk kategori Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Karang Werdha dibentuk dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya. Karang Werdha sendiri didanai melalui APBDes dan/atau pendanaan masyarakat melalui iuran anggota, sumbangan masyarakat, atau lembaga masyarakat non pemerintah yang tidak mengikat. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Karang Werdha cukup beragam, diantaranya kegiatan keagamaan, pelayanan kesehatan, kegiatan kebugaran jasmani, pelatihan seni dan budaya, serta kegiatan sosial lainnya.

Secara umum Pemerintah Kota dan Dinas Sosial Kota Surabaya menjadikan Karang Werdha sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan dan mengkoordinasikan program-program bantuan bagi lansia miskin dan terlantar. Salah satu kegiatan di Karang Werdha yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota dan Dinas Sosial Kota Surabaya adalah pemberian makanan secara rutin kepada lansia yang tidak mampu dan/atau terlantar yang dikenal dengan Program Permakanan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Program Permakanan ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota

Surabaya. Sebenarnya sasaran dari program ini tidak hanya khusus lansia, melainkan beberapa kelompok masyarakat yang tergolong fakir miskin dan/atau terlanjar seperti penyandang disabilitas dan anak yatim dan/atau piatu yang berasal dari keluarga miskin dan/atau terlanjar. Khusus bagi penerima manfaat kelompok lansia, pelaksanaan pemberian makanan dilakukan oleh Karang Werdha tingkat kelurahan/desa.

Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Sosial Kota Surabaya juga sering melakukan pembinaan Karang Werdha tingkat kelurahan se-Kota Surabaya. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan Karang Werdha yang mandiri dan mampu memotivasi anggotanya untuk peduli dan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Saat ini rata-rata setiap kelurahan di Kota Surabaya memiliki satu Karang Werdha, namun tidak semua Karang Werdha dalam kondisi aktif. Hal ini tergantung pada keaktifan pengurus Karang Werdha beserta anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah kegiatan bagi kelompok penduduk lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

• ***Bina Keluarga Lansia (BKL)***

BKKBN merupakan salah satu lembaga yang menyediakan wadah bagi lanjut usia dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan. Salah satu program yang dirancang khusus untuk kelompok penduduk lansia adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL menurut BKKBN adalah wadah kegiatan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia dengan berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lanjut usia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lanjut usia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lanjut usia.

Untuk mewujudkan lansia yang tangguh, sehat, serta produktif, kader-kader Bina Keluarga Lansia Kota Surabaya menerapkan prinsip kerja 4M yaitu Mendengarkan, Memperhatikan, Membantu aktivitas lansia, dan Memberi semangat. Para kader juga dilatih untuk bersikap aktif menyampaikan hal-hal yang positif bagi kehidupan lansia seperti mengajak melakukan aktivitas spiritual, mengonsumsi makanan sehat, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, mengajarkan pendidikan keterampilan, dan membudayakan menabung. Data dari Pengendalian Kependudukan BKKBN menunjukkan hingga saat ini diperkirakan di Kota Surabaya terdapat sekitar 6.837 Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan 327.854 keluarga yang terlibat.

c. **Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**

Menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2015, pelayanan kesehatan untuk penduduk lansia telah mencapai 78,31 persen dari 219.164 penduduk lansia. Dengan rincian lansia laki-laki yang mendapat pelayanan adalah sebesar 69,07 persen dan lansia perempuan sebanyak 86,70 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lansia yang mendapat pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sebesar 22,27 persen (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015). Pelayanan kesehatan bagi penduduk lansia dapat melalui berbagai bentuk fasilitas pelayanan. Pelayanan tersebut diantaranya diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah (LSM) dan swadaya masyarakat. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada lanjut usia, pemerintah telah mencanangkan pelayanan pada lanjut usia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, pelayanan di tingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah rumah sakit (Fallen & Kartiningrum, 2011).

• ***Puskesmas Santun Lansia***

Salah pelayanan kesehatan khusus bagi lansia di tingkat dasar adalah program Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang menyediakan ruang khusus untuk melakukan pelayanan bagi kelompok lanjut usia yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ciri-ciri pelayanan di Puskesmas Santun Lansia adalah dilakukan secara proaktif, baik, berkualitas, dan sopan. Puskesmas Santun Lansia juga memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan lansia berupa keringanan atau penghapusan biaya pelayanan bagi lansia yang tidak mampu serta memberikan berbagai dukungan dan bimbingan kepada lansia dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Program yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan rasa nyaman bagi Lansia saat berkunjung ke Puskesmas dengan cara memprioritaskan pemberian pelayanan kepada lansia. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa Puskesmas Santun Lansia di Jawa Timur menduduki posisi kedua terbanyak se-Indonesia yaitu 127 unit (Kementerian Kesehatan, 2014). Sedangkan di Kota Surabaya jumlah Puskesmas Santun Lansia hanya terdapat 4 unit, yaitu:

1. Puskesmas Medokan Ayu di Kecamatan Rungkut
2. Puskesmas Balongsari di Kecamatan Tandes
3. Puskesmas Gunung Anyar di Kecamatan Gunung Anyar
4. Puskesmas Pucangsewu di Kecamatan Gubeng

• **Posyandu Lansia**

Salah satu wujud pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada kelompok lansia yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia. Posyandu Lansia atau juga biasa disebut dengan istilah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Lansia merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia di tingkat desa dalam masing-masing wilayah kerja Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2005). Tujuan dari Posyandu Lansia secara garis besar adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini jumlah Posyandu Lansia di Provinsi Jawa Timur merupakan yang terbanyak se-Indonesia yaitu mencapai 52.450 unit (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2013). Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pada tahun 2016 jumlah Posyandu Lansia Kota Surabaya sedikitnya mencapai 680 unit.

Posyandu Lansia memiliki program atau upaya terkait penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, hemoglobin, dan kolesterol untuk deteksi dini atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi lansia (Pedoman PPLU, 2010). Kegiatan lain yang dilakukan pada Posyandu Lansia di Kota Surabaya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan lansia melalui pemberian makanan tambahan yang bergizi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak keluarga merubah perilaku dengan memberi makanan yang sehat dan bergizi kepada lansia setiap hari.

d. Infrastruktur dan Fasilitas Umum Ramah Lansia

Selain perangkat kebijakan dan program-program yang diperuntukkan kepada lansia, Kota Surabaya memiliki peluang menjadi Kota Ramah lansia dalam hal kondisi infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah terhadap kaum lansia. Kondisi fisik lansia yang mulai menurun harus menjadi pertimbangan dalam penyediaan berbagai fasilitas untuk membangun ruang publik yang ramah lansia.

Salah satu keunggulan dari Kota Surabaya adalah ruang terbuka hijau berupa taman-taman dan

pelayanan umum sudah cukup dirasakan ramah terhadap kebutuhan lansia. Salah satu contoh ruang terbuka hijau yang terkenal di Kota Surabaya adalah Taman Lansia yang terletak di jalan Kalimantan. Dengan luas sekitar 2000 m² merupakan lahan bekas SPBU yang dirubah fungsi menjadi taman kota. Selain ditumbuhi oleh beraneka tanaman bunga beragam warna, di taman ini juga dibangun jalur untuk refleksi kaki yang dapat dimanfaatkan oleh lansia. Selain itu area taman juga didesain untuk kenyamanan lansia yang menggunakan kursi roda lengkap dengan tempat duduk untuk pengantar yang menemani para lansia. Karena lokasi taman Lansia yang banyak dikunjungi maka setiap hari Sabtu dan Minggu Taman Lansia diselenggarakan kegiatan pengobatan bagi lansia yang dilakukan secara gratis.

Selain itu, dalam hal pelayanan publik pun telah banyak yang ditujukan pada kelompok penduduk lansia, seperti mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum (tersedia loket khusus bagi lansia untuk pelayanan umum seperti di fasilitas kesehatan, bank, dan kepolisian), keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual seperti pembangunan sarana ibadah juga mulai mempertimbangkan aksesibilitas bagi lanjut usia. Tentu saja kondisi ini tidak terlepas dari perhatian dan komitmen pemangku kebijakan daerah dan masyarakat yang tinggi terhadap kelompok penduduk lanjut usia.

e. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta

Salah satu keberhasilan suatu program disebabkan adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Dalam hal kelanjutusiaan beberapa pemangku kepentingan yang banyak berurusan langsung dengan lansia adalah pemerintah Kota/Kabupaten, BKKBN tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak-pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat. Namun yang menjadi *vocal point* dalam suatu wilayah kabupaten/kota adalah pimpinan daerah yaitu Walikota atau Bupati. Keberpihakan dan kepedulian yang tinggi dari Walikota Kota Surabaya kepada kelompok usia lanjut tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang terbilang aktif di wilayah Kota Surabaya. Tentu saja konsekuensi logis dari suatu kegiatan adalah penganggaran alokasi dana daerah yang berkelanjutan bagi program-program unggulan daerah bagi peningkatan kesejahteraan lansia.

Koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) pun menjadi salah satu kunci kesuksesan suatu kebijakan dan program. Memang tidak selamanya program dan kegiatan lintas SKPD menjadi lebih mudah dilakukan, apalagi jika berbicara dalam kerangka penganggaran. Ego sektoral kelembagaan sering kali menjadi penghambat dalam suatu tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk lansia. Namun jika tantangan tersebut bisa dilakukan dengan menjalin koordinasi yang harmonis dan bersinergi, maka program-program pemerintah akan lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran. Untuk isu kelanjutusiaan ini beberapa SKPD di Kota Surabaya sering bersinergi dalam melakukan kegiatan. Sebagai contoh dalam kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu di Taman Lansia akan diisi oleh kegiatan senam lansia yang diinisiasi oleh Yayasan Jantung Sehat Kota Surabaya, kegiatan pemeriksaan gula darah, tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan ringan dilakukan oleh petugas dari dinas kesehatan. Sementara itu petugas pertamanan Taman Lansia dari dinas pertamanan Kota Surabaya siap menjaga kebersihan dan kenyamanan lansia yang memanfaatkan fasilitas taman. Tidak jarang pula lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan produsen-produk khusus produk untuk lansia pun turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Tantangan

Di tengah potensi dan peluang Kota Surabaya dalam mewujudkan cita-citanya sebagai Kota Ramah Lansia, tentu saja masih banyak tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan baik yang bersifat infrastruktur fisik, implementasi kebijakan dan program maupun terkait perilaku dan kesadaran masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan penduduk lansia.

a. Infrastruktur Fisik

Walaupun Kota Surabaya relatif unggul dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya dalam hal infrastruktur fisik ramah lansia, namun masih terdapat beberapa hal yang belum memadai. Adapun kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian adalah belum adanya tempat parkir atau area menurunkan penumpang bagi lanjut usia dan penyandang cacat, desain bus dan angkutan umum belum ramah lansia, lahan perumahan yang padat dan sempit membuat gerak lansia menjadi terbatas, serta desain perumahan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan lansia (landasan lantai yang rata, pintu masuk yang lebar untuk kursi roda, kamar mandi yang dilengkapi

pegangan)⁴. Selain itu, tantangan yang berhubungan dengan infrastruktur fisik bagi lansia adalah yang terkait dengan infrastruktur fasilitas umum seperti trotoar yang tidak rata sehingga sulit dilalui oleh kaum lansia, masih banyak toilet umum yang belum memasang pegangan pada dindingnya, masih minimnya area singgah (*drop-in*) untuk memberikan area duduk dan beristirahat dalam jarak tertentu bagi lansia.

b. Implementasi Kebijakan dan Program

Perangkat kebijakan dan program-program yang dirancang khusus untuk lansia di Kota Surabaya relatif sudah cukup banyak. Namun, implementasinya di masing-masing wilayah masih menghadapi berbagai kendala. Sebagai contoh adalah program pelayanan kesehatan bagi lansia seperti Posyandu Lansia. Di beberapa wilayah dengan tingkat partisipasi lansia yang cukup tinggi dibutuhkan penambahan tenaga medis dari Puskesmas. Hal ini dirasakan perlu karena selain jumlah lansia yang banyak juga luas cakupan wilayah kecamatan yang cukup besar. Selain itu, penambahan jumlah tenaga medis juga dibutuhkan karena perlu adanya peningkatan penyuluhan kesehatan kepada para lansia. Diharapkan dengan jumlah petugas yang memadai, kegiatan Posyandu Lansia dapat terselenggara dengan optimal. Bagi lansia yang terbaring sakit di rumah, salah satu strategi pelayanan kesehatan adalah dengan mengunjungi rumah-rumah mereka. Tentu saja ini membutuhkan waktu dan jumlah tenaga medis yang ekstra. Selanjutnya, masih dalam hal pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan upaya penyembuhan (kuratif) dan memperluas pelayanan pada bidang geriatrik/gerontologi.

Jika mengacu pada hasil *assesment* Kota Ramah Lansia yang dilakukan oleh SurveyMETER & CAS UI (2013), terlihat bahwa perolehan skor paling rendah adalah pada dimensi Partisipasi sipil dan pekerjaan yang hanya memperoleh skor 13,8. Dimensi ini menunjukkan masih rendahnya dukungan pengambil kebijakan di sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan lapangan kerja bagi lansia. Perusahaan yang ada juga belum mendorong partisipasi dan memberikan kesempatan kerja pada lansia. Penciptaan kesempatan kerja bagi lansia sesuai dengan kapasitasnya belum banyak dilakukan. Namun, wacana ke arah itu sudah diperjuangkan oleh Komda Lansia Jawa Timur. Komda Lansia berusaha agar

⁴ Merupakan salah satu komponen penilaian kategori Kota Ramah Lansia versi WHO (SurveyMETER & CAS UI), 2013

warga lanjut usia memiliki pekerjaan di sektor informal, salah satunya yaitu dengan mendorong para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menampung tenaga kerja berusia lanjut, dengan target lansia yang tergolong lansia potensial. Hal itu diharapkan lansia dapat meningkatkan pendapatan bagi keluarganya.

c. Dukungan Keluarga dan lingkungan sosial

Aspek lain yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi lansia agar bisa melakukan aktifitasnya dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya adalah partisipasi, penghormatan dan inklusi sosial, dan dukungan komunitas (Iwarsson, 2007). Ketiga hal ini menjadi kunci sukses bagi kehidupan sosial lansia di tengah masyarakat. Hasil penelitian studi lansia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa salah satu tantangan program pelayanan kesehatan Posyandu Lansia adalah kurangnya kesadaran lansia akan pentingnya Posyandu dan kurangnya dukungan keluarga untuk mengantar atau mengingatkan lansia untuk datang ke Posyandu. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa alasan anggota keluarga lansia yang lebih muda tidak dapat mengantarkan lansia ke Posyandu adalah kesibukan kerja, termasuk bagi anak perempuan yang dulu berperan sebagai *caregiver* bagi lansia. Meskipun beberapa puskesmas telah melakukan kunjungan ke rumah-rumah lansia (jemput bola), namun keterbatasan jumlah petugas menjadi hambatan dalam program kunjungan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya himbauan dan pemahaman kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berusia lanjut tentang pentingnya keikutsertaan dalam kegiatan Posyandu Lansia. Selain itu, juga diperlukan strategi dari penyelenggara Posyandu Lansia adalah dengan memilih waktu penyelenggaraan Posyandu pada hari-hari libur atau akhir minggu (*weekend*), sehingga anggota keluarga dapat mengantarkan atau menemani lansia. Apabila dimungkinkan petugas Posyandu lansia membuat program penjemputan bagi lansia pada saat kegiatan Posyandu.

KESIMPULAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan proporsi penduduk lansia 8,23 persen dari total populasinya (BPS, Jatim 2017). Fenomena meningkatnya jumlah lansia di Kota Surabaya membawa dampak terhadap kesiapan lingkungan, baik fisik maupun sosial dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman sesuai dengan karakteristik lansia atau biasa disebut dengan

lingkungan ramah lansia. Walaupun dalam studi yang dilakukan oleh SurveyMETER& Cas UI (2013) Kota Surabaya belum termasuk dalam kategori Kota Ramah Lansia menurut standar WHO, Kota Surabaya memiliki keunggulan pada dua dimensi yaitu dimensi dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan serta dimensi partisipasi sosial.

Terlepas dari *assesment* Kota Ramah Lansia di atas, Kota Surabaya pada dasarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kota dengan predikat Kota Ramah Lansia. Hermawati (2013) menyatakan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Kota Ramah Lansia, yaitu (1) kota memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang lansia, seperti peraturan daerah, (2) memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan berkepedulian terhadap lansia, (3) memiliki metode dokumen yang ramah lansia seperti yang ada dalam ketentuan WHO tetapi disesuaikan dengan keadaan daerah yang bersangkutan, dan (4) fasilitas yang ramah terhadap lansia.

Berpijak pada empat syarat yang dikemukakan di atas, maka Kota Surabaya memiliki peluang yang besar untuk menyandang predikat sebagai Kota Ramah Lansia. *Pertama*, Kota Surabaya telah memiliki perangkat kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Kedua*, Kota Surabaya memiliki pemimpin daerah yaitu Walikota, Tri Rismaharini yang sangat peduli dan berkomitmen tinggi terhadap penduduk lansia. Hal ini tercermin dalam berbagai program lansia di lingkungan SKPD Kota Surabaya. *Ketiga*, Kota Surabaya telah melalui *assesment* sebagai Kota Ramah Lansia menurut ketentuan WHO dan menunjukkan indeks kesesuaian (*fit*) sebesar 46,3 persen. Indeks ini relatif besar jika dibanding rata-rata indeks 14 kota di Indonesia lainnya (42,9 persen). *Keempat*, Kota Surabaya telah berupaya memasukkan isu kelanjutusiaan dalam berbagai fasilitas publik kota. Walaupun dalam *assesment* Kota Surabaya memperoleh nilai kesesuaian yang kurang memuaskan pada dimensi-dimensi yang terkait fasilitas fisik maupun sosial, namun rata-rata skor yang diperoleh berada pada kelompok tengah yaitu 46,05. Hal ini membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang nyata dalam pembenahan terhadap indikator yang memiliki pencapaian rendah.

Mengarusutamakan isu lansia ke dalam perencanaan kota serta kebijakan yang terarah dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah dalam membangun kota yang ramah lansia. Semua itu diawali dengan memahami karakter lansia itu sendiri, sehingga terbentuk kesesuaian antara kebutuhan dan karakter penduduk lansia dengan mempertimbangkan aspek

lokalitas. Sejalan dengan itu peningkatan kualitas kesehatan lansia pun harus tetap menjadi fokus utama. Kesemuanya itu dapat berjalan dengan baik jika terjalin sinergi yang harmonis dari seluruh elemen kota, diantaranya pemerintah setempat, *stakeholder* terkait, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota yang mampu mengakomodir kebutuhan lansia dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS].(2016). *Profil Penduduk Lansia Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2015). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2015*. Jakarta: *Badan Pusat Statistik*
- Badan Pusat Statistik [BPS].(2016). *Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.(2005). *Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Bagi Petugas Kesehatan II*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dinas Kesehatan Jawa Timur.(2015). *Profil Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2015*. Surabaya: Dinas Kesehatan Jawa Timur
- Fallen, R &.(2011). *Keperawatan Komunitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hermawati, I. (2015). *Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia*. Yogyakarta: *Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial*. Disampaikan dalam Seminar dan Loka Karya tentang Kota Ramah Lansia di LPPM UNY, Kamis 23 April 2015. Diunduh dari: <http://eprints.uny.ac.id/20570/1/MAKALAH%20KOTA%20RAMAH%20LANJUT%20USIA.UNY.ISTI%20ANA.pdf>
- Iwarsson, S. (2007). Importance of the Home Environment for Healthy Ageing: Conceptual and Methodological Background of the European ENABLE-AGE Project. *The Gerontologist* 47 (1), 78-84. doi: 10.1093/geront/47.1.78
- Komda Lansia Provinsi Jawa Timur.(2012). *Identifikasi Potensi dan Kesiapan Pra-Lansia di Jawa Timur dalam Memasuki Masa Lanjut Usia*. Laporan Kajian. Jawa Timur
- Murdiyanto & Gutomo, R.T (2017). Peran Keluarga Dalam Mewujudkan Lanjut Usia Sejahtera. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41 (1), 1-10. doi: 10.31105/mipks.v41i1.1191
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.31 Tahun 2017 tentang Karang Werdha
- Peraturan Daerah No.3 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar
- Samino.(2002). *Proses Menua Menjadi Penyakit?*. Makalah Seminar. Disampaikan dalam Peresmian Asosiasi Alzheimer Indonesia (AazI) Wilayah Yogyakarta, 12 Oktober 2002.
- Suardiman, S.P. (2011). *Psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- SurveyMETER & Center for Ageing Studies University of Indonesia [CAS UI].(2013). *Satu Langkah Menuju Impian lanjut Usia: Kota Ramah Lanjut Usia 2030*. Kota Surabaya. Yogyakarta: SurveyMETER, Center for Ageing Studies University of Indonesia, The Asian Foundation & AusAid. Diunduh dari: <https://surveymeter.org/read/115/satu-langkah-menuju-impian-lanjut-usia-kota-ramah-lanjut-usia-2030-kota-surabaya>
- United Nations. (2002). *Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing*. Second World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, 8-12 April 2002. New York: United Nations Headquarters.
- Vibriyanti, D & Harfina, D. 2017 *Determinan Kualitas Hidup Lanjut Usia*. Laporan Penelitian. Jakarta. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.
- World Health Organization [WHO]. (2007). *Global Age-Friendly Cities: A Guide*. Switzerland: WHO Press.
- http://www.kompasiana.com/elisakaramoy/mewujudkan-ruang-publik-kota-yang-ramah-lansia_560a2b362d7a617f12ab52e0
- <http://surveymeter.org/read/409/di-surabaya-kesejahteraan-lanjut-usia-menjadi-tanggungjawab-pemerintah-keluarga-dan-masyarakat>
- <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/22/ada-44-juta-lansia-di-jatim-ini-program-prioritas-komda-lansia>

<https://www.jatimtimes.com/baca/176894/20180808/105400/surabaya-masuk-nominasi-kota-ramah-lansia/>
<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/22/ada-44-juta-lansia-di-jatim-ini-program-prioritas-komda-lansia>

<https://www.jatimtimes.com/baca/176894/20180808/105400/surabaya-masuk-nominasi-kota-ramah-lansia/>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

**KETERKAITAN TRANSFER PEMERINTAH UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
TERHADAP PERILAKU MEROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN
DI INDONESIA**

**(THE INFLUENCE OF GOVERNMENT TRANSFERS FOR SOCIAL PROTECTION
ON SMOKING BEHAVIOUR AMONG POOR HOUSEHOLDS IN INDONESIA)**

Diyang Gita Cendekia

Badan Pusat Statistik

Korespondensi penulis: diyang.dgc@bps.go.id

Abstract

Indonesia has a relatively high proportion of the productive population. Decreasing the number consumption of cigarette is one of the ways to improve human capital, productivity, and wealth. The report published by Statistics Indonesia states that cigarettes expenditure is the second largest expenditure in poor households. On the other hand, poor households also get government social protection programs to help them get out of poverty. Therefore, this study aims to determine the association of the number types of social protection assistance programs received with smoking behaviour in poor households. By using multiple linear regression method, the results of this study found that the variables of the number types of social protection assistance received are related to the average of cigarettes consumed by the head of household in poor households. Besides, the study found that head of household in poor households who received three types of social protection assistance programs at once (Raskin, BLT and BSM) had a greater weekly average of cigarettes consumption than that of households in the same poor household that did not get any social protection assistance program.

Keywords: Poverty, Social Protection Program, Cigarettes

Abstrak

Indonesia memiliki proporsi penduduk produktif yang relatif tinggi. Mengurangi konsumsi rokok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal manusia, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan. Data dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi untuk rokok merupakan pengeluaran kedua terbesar pada rumah tangga miskin setelah beras. Di sisi lain, rumah tangga miskin juga mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan banyaknya jenis program bantuan perlindungan sosial yang diterima dengan perilaku merokok pada rumah tangga miskin. Dengan metode regresi linier berganda, hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel banyaknya jenis bantuan perlindungan sosial yang diterima memiliki keterkaitan terhadap rata-rata rokok yang dikonsumsi kepala rumah tangga (KRT) pada rumah tangga miskin. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa KRT pada rumah tangga miskin yang menerima tiga jenis program bantuan perlindungan sosial sekaligus, yaitu Raskin, BLT, dan BSM memiliki rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu lebih besar dibandingkan dengan KRT pada rumah tangga miskin yang sama sekali tidak mendapatkan program bantuan perlindungan sosial.

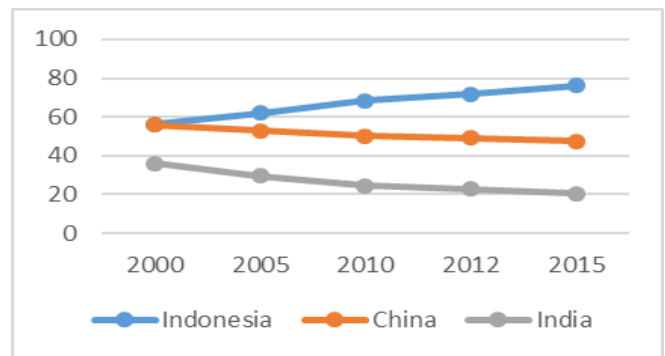
Kata kunci: Kemiskinan, Program Perlindungan Sosial, Rokok

PENDAHULUAN

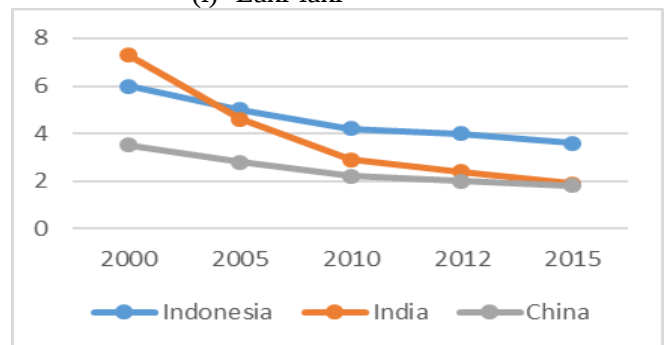
Todaro dan Smith (2011) mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan mutu modal manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Dalam tahapan pembangunan, dinamika dan kondisi penduduk memiliki peranan penting. Dilihat berdasarkan dinamika penduduk, Hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2015 (SUPAS 2015) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada pada kelompok umur muda. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar sebagai penggerak pembangunan (BPS, 2015a), Indonesia mampu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun demikian, hal tersebut sangat bergantung pada kondisi kesehatan. Ananta (1990) menyebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengetahui mutu modal manusia yang berpengaruh terhadap produktifitas seseorang. Produktifitas inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Merokok merupakan salah satu perilaku berbahaya yang seringkali dilakukan penduduk muda. Walaupun telah diketahui bahwa rokok memiliki dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positifnya, rokok telah menjadi komoditas yang lazim dikonsumsi oleh penduduk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. *World Bank* (2017) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan dalam prevalensi merokok. Dibandingkan dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar seperti India dan China, Indonesia memiliki persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok lebih tinggi (Gambar 1).

Hal tersebut juga terlihat jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin. Di China dan India, persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang merokok cenderung mengalami penurunan. Berbeda halnya yang terjadi di Indonesia dimana persentase penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang merokok mengalami peningkatan. Selain itu, penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas yang merokok mengalami penurunan pada ketiga negara. Walaupun demikian, penurunan di Indonesia cenderung lebih lambat yang ditunjukkan oleh bentuk grafik yang lebih landai dibandingkan dengan di China dan India (Gambar 1).



(i) Laki-laki



(ii) Perempuan

Gambar 1. Perbandingan Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Merokok di Indonesia, India dan China, 2000-2015

Sumber : *World Bank* (2017), diolah

Jika ditinjau dari segi pengeluaran konsumsi rumah tangga, BPS (2017), BPS (2016b), BPS (2016c), dan BPS (2015b) menyebutkan bahwa pengeluaran pada kelompok makanan memberikan kontribusi yang dominan dalam pembentukan garis kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dilihat dari jenis komoditas yang dikonsumsi, pada Maret 2015 hingga September 2016 rokok merupakan komoditas penyumbang terbesar kedua pada garis kemiskinan setelah beras. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rokok merupakan komoditas yang masih banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin.

Keterkaitan antara konsumsi rokok dan rumah tangga miskin juga ditunjukkan oleh Armour, Pitts, dan Lee (2008) pada penelitiannya di Amerika Serikat. Hasil studi itu menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk mengonsumsi rokok. Bahkan John, Ross, dan Blecher (2011) menyebutkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi rokok adalah pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan pakaian. Begitu juga dengan rumah tangga berpendapatan menengah atau rendah, pengeluaran makanan seringkali digunakan untuk konsumsi rokok.

Beberapa penelitian mengenai perilaku merokok juga dilakukan di Indonesia. Salah satunya Harahap (2003) yang melakukan penelitian mengenai determinan probabilitas merokok dan besarnya jumlah konsumsi rokok. Bersumberkan pada data *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) 1997 dengan menggunakan analisis regresi tobit dengan pendekatan *sample selection model*, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel ekonomi seperti harga rokok dan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan besarnya jumlah rokok yang dikonsumsi. Harga berpengaruh negatif dan pendapatan berpengaruh positif. Selain itu, variabel sosio-demografi sebagai *proxy* selera secara signifikan memiliki hubungan pada jumlah rokok yang dikonsumsi adalah umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Begitu juga jika dilihat dari kewilayahan, disebutkan bahwa wilayah dan daerah tempat tinggal juga memiliki hubungan yang signifikan dengan besarnya jumlah rokok yang dikonsumsi.

Sugiharti, Sukartini, dan Handriana (2015) menyatakan bahwa perilaku merokok berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Individu dengan pendidikan sekolah dasar atau sederajat memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk merokok dibandingkan dengan individu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa individu dengan pengeluaran paling rendah memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk merokok. Begitu juga jika dilihat dari sisi pendapatan. Gordon (1950) melakukan penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga maka semakin sedikit jumlah pengeluaran terhadap rokok.

Perilaku merokok juga dapat dilihat berdasarkan umur seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti dkk. (2015). Hasil studi ini menemukan bahwa semakin bertambah umur semakin besar peluang individu menjadi perokok. Tidak hanya faktor individu, lingkungan tempat individu tinggal memiliki pengaruh pada perilaku merokok. Smet, Maes, De Clercq, Haryanti, dan Winarno (1999) melakukan penelitian mengenai perilaku merokok pada remaja di Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa merokok merupakan perilaku yang umumnya dilakukan bersama-sama. Selain itu, perilaku merokok dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan pertemanan pada anak remaja laki-laki.

Townsend (1996) serta Hosseinpoor, Parker, d'Espaignet, dan Chatterji (2011) menyatakan bahwa ada sedikit perbedaan kebiasaan merokok pada kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Townsend (1996) menyebutkan bahwa di Inggris dan beberapa

negara lain prevalensi merokok tertinggi terjadi pada kelompok penduduk berpendapatan rendah. Selain itu, penurunan tingkat merokok di Inggris selama ini juga tergolong relatif rendah. Tingkat merokok sangat tinggi umumnya terjadi pada pengangguran dan orang dewasa muda dengan keluarga muda, terutama orang dewasa muda dengan orang tua tunggal. Selain itu, keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki tingkat merokok yang tinggi dan pendapatan mereka dibelanjakan dengan tidak proporsional.

Lee dan Masson (2011) menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada dasarnya dibiayai dari tiga komponen, yaitu pendapatan dari bekerja (*labor income*), transfer, dan *asset based reallocation*. Komponen transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *privat transfers* dan *public transfers*. Penelitian ini hanya berfokus pada *public transfers* yang diberikan pemerintah pada penduduk, seperti perlindungan sosial.

Bappenas (2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta memungkinkan kelompok miskin dan rentan miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Ananta (1990) menyebutkan bahwa orientasi peningkatan mutu modal manusia dapat berupa pemberian prioritas penggunaan investasi di bidang mutu modal manusia. Salah satu investasi yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau kembali kegiatan produksi yang mengurangi atau menghambat kenaikan modal manusia, seperti pada industri rokok. Walaupun hasilnya akan dirasakan dalam jangka yang panjang, upaya tersebut memegang peranan penting dalam pembangunan kualitas penduduk. Selain itu, Todaro dan Smith (2011) berpendapat bahwa selain komponen pendidikan, komponen kesehatan juga memiliki peranan penting dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Atmawikarta (2009) juga berpendapat bahwa pada tingkat mikro, kesehatan merupakan dasar bagi produktivitas. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan mendapatkan

penghasilan yang tinggi. Sementara itu pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik adalah input penting dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.

Jika mengesampingkan kesehatan, industri rokok memberikan pendapatan bagi negara yang cukup besar, baik dari reklame maupun dari hasil penjualan. Namun demikian, konsumsi rokok mampu menimbulkan masalah kesehatan secara mikro maupun makro. Dari sisi mikro, dalam hal ini adalah bagi perokok itu sendiri ataupun bagi orang sekitar yang terpapar asap rokok, konsumsi rokok akan berpengaruh pada menurunnya kualitas modal manusia, khususnya kondisi kesehatan. Jika dilihat dari sisi makro, rendahnya kondisi kesehatan akibat rokok dapat menjadi beban bagi negara, baik dari sisi pembiayaan dari pemerintah ke penduduk maupun dari sisi produktifitas yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Selain penurunan pada kualitas modal manusia, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efroymson, Ahmed, Townsend, Alam, Dey, Saha, dan Rahman (2001) menyebutkan bahwa konsumsi rokok dapat menyebabkan kemiskinan, bahkan memperparah tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan penduduk miskin dalam mengendalikan konsumsi rokok sehingga mengesampingkan alokasi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, seperti peningkatan modal manusia.

Beberapa ahli telah menyebutkan bahwa terdapat perbedaan prevalensi merokok antara kelompok sosial demografi dan ekonomi yang memiliki karakteristik berbeda (Townsend, 1996; Hosseinpoor, Parker, d'Espaignet, & Chatterji, 2011). Selain itu, konsumsi rokok juga memberikan sumbangan yang besar pada garis kemiskinan (BPS, 2017; BPS, 2016b; BPS, 2016c; BPS, 2015b). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan transfer pemerintah pada rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan terakhir oleh kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah banyaknya jenis transfer yang diberikan pemerintah pada rumah tangga miskin memiliki keterkaitan dengan rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk membuat strategi pengurangan konsumsi rokok, khususnya pada rumah tangga miskin. Hal ini dikarenakan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perilaku merokok akan dirasakan lebih besar pada rumah tangga miskin pada khususnya

(misalnya produktifitas menurun karena sakit akibat perilaku merokok) dan juga bagi negara pada umumnya (seperti beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016. Susenas merupakan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap enam bulan sekali, yaitu bulan Maret dan bulan September. Penelitian ini menggunakan hasil pencacahan Susenas tahun 2016 pada bulan Maret.

BPS (2016a) menyebutkan bahwa setiap periode pencacahan menggunakan dua kuesioner. Pada bulan Maret, pencacahan menggunakan kuesioner Kor (inti) dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada variabel yang terdapat dalam kuesioner Kor dan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran hasil Susenas Maret 2016.

Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2016 adalah sebanyak 300.000 rumah tangga yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Susenas adalah dengan wawancara menggunakan kuesioner pada semua rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Tidak semua individu dalam rumah tangga terpilih dijadikan unit analisis dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan data. Adapun batasan dalam pemilihan unit analisis dari penelitian ini adalah kepala rumah tangga (KRT) pada rumah tangga miskin yang terdiri dari 28.690 kepala rumah tangga.

Definisi rumah tangga miskin pada penelitian ini adalah rumah tangga yang termasuk dalam kelompok 40 persen pengeluaran terendah nasional. Seseorang dikatakan sebagai KRT ketika seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga (ART) bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari rumah tangga (BPS, 2016a).

Variabel terikat dalam penelitian ini berupa rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu pada rumah tangga miskin. Definisi merokok yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Susenas, yaitu merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan. Terdapat dua cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama, menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua, hanya menghisap

sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung. Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok keretek, cerutu, lisong, dan pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap *shisha/waterpipe*. *Shisha/water pipe* dikategorikan merokok tembakau yang diberi tambahan rasa melalui pipa, baik tunggal maupun banyak (BPS, 2016a hal.135).

Variabel bebas utama dalam penelitian ini adalah transfer dari pemerintah melalui banyaknya jenis perlindungan sosial yang diterima. Adapun jenis perlindungan sosial dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu penerimaan bantuan langsung tunai (BLT), penerimaan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan penerimaan bantuan siswa miskin (BSM). Dalam penelitian ini, digunakan juga variabel kontrol yang berfungsi untuk mendapatkan keterkaitan murni dari transfer pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap perilaku merokok. Adapun beberapa variabel kontrol tersebut terdiri dari variabel lingkungan keluarga (yang terdiri dari jumlah anggota rumah tangga (ART) yang merokok), variabel karakteristik individu (umur, pendidikan, status pekerjaan, dan daerah tempat tinggal) serta variabel ekonomi (kepemilikan perlindungan sosial). Adapun definisi untuk semua variabel dalam penelitian ini merujuk pada definisi dalam Susenas Tahun 2016 (BPS, 2016a).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis inferensial. Metode analisis deskriptif yang digunakan berupa tabulasi silang perilaku merokok berdasarkan karakteristik individu dan rumah tangga untuk melihat gambaran perilaku merokok pada rumah tangga miskin. Sedangkan metode analisis inferensial yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis regresi berganda untuk mengetahui keterkaitan transfer pemerintah terhadap rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu. Pada tahap ini, hanya individu yang merokok yang dianalisis dengan model umum yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$\text{KONSUMSI} = \beta_0 + \beta_1 \text{JARO} + \beta_2 \text{JARTK} + \beta_3 \text{UMUR} + \beta_4 \text{PENDIDIKAN} + \beta_5 \text{KERJA} + \beta_6 \text{DTT} + \beta_7 \text{JPS} + \varepsilon$$

Keterangan:

- KONSUMSI : Rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu selama sebulan terakhir.
 JARO : Jumlah ART yang merokok dalam rumah tangga.
 JARTK : Jumlah ART yang tidak bekerja.
 JPS : Jumlah bantuan program

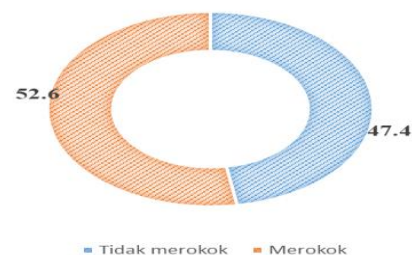
- perlindungan sosial yang dimiliki.
 UMUR : Umur KRT.
 PENDIDIKAN : Ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
 KERJA : Kegiatan utama individu seminggu yang lalu.
 DTT : Daerah tempat tinggal.
 KERJA : Kegiatan utama individu seminggu yang lalu.
 DTT : Daerah tempat tinggal.

HASIL DAN DISKUSI

Kesejahteraan merupakan tujuan dalam pembangunan. Penduduk dengan kesejahteraan yang rendah atau seringkali disebut sebagai penduduk miskin selalu menjadi sorotan. Karena sifatnya yang adiktif maka komoditas rokok merupakan konsumsi terbesar kedua setelah beras yang notabene merupakan kebutuhan dasar (BPS, 2017; BPS, 2016b; BPS, 2016c; BPS, 2015b). Pada bagian ini akan dibahas mengenai perilaku merokok KRT dalam rumah tangga miskin. Pembahasan akan dimulai dengan analisis deskriptif berupa grafik dan tabulasi silang perilaku merokok berdasarkan karakteristik sosial demografi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa keterkaitan transfer pada rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi selama sebulan terakhir, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Analisis Deskriptif

Hasil penelitian ini (Gambar 2) menunjukkan bahwa secara umum KRT pada rumah tangga miskin memiliki persentase merokok yang lebih besar (52,6%) dibandingkan mereka yang tidak merokok (47,4%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa KRT rumah tangga miskin cenderung merokok.



Gambar 2.
Persentase Individu dalam Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Perilaku Merokok

Sumber: Susenas 2016, diolah

Selain itu, jika dilihat berdasarkan faktor lingkungan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa KRT yang merokok memiliki ART lain yang juga merokok. Sedangkan jika dilihat berdasarkan karakteristik individu, sebagian besar KRT rumah tangga miskin

yang merokok memiliki memiliki ijazah tertinggi maksimal SMA, laki-laki, bekerja, dan tinggal di daerah perdesaan (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik KRT pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia

Nama Variabel	Kategori	Tidak Merokok	Merokok
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin	Laki-laki	72,0	99,3
	Perempuan	28,0	0,7
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tinggi	1,3	0,7
	Menengah	16,3	20,7
	Rendah	82,4	78,6
Status pekerjaan	Bekerja	81,5	95,0
	Tidak bekerja	18,5	5,0
Daerah tempat tinggal	Kota	28,1	28
	Desa	71,9	72
Jumlah bantuan	3 jenis	2,1	3,3
	2 jenis	16,2	21,5
	1 jenis	47,1	46,4
	Tidak dapat	34,6	28,8
Bantuan Siswa Miskin	Menerima	79,6	72,1
	Tidak menerima	20,4	27,9
Bantuan Tunai	Menerima	91,9	91,4
	Tidak Menerima	8,1	8,6
Raskin	Membeli atau menerima	42,7	37,2
	Tidak membeli atau menerima	57,3	62,8

Sumber: Susenas 2016, diolah

Analisis Inferensial

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, berikut akan diperlihatkan model sebelum menggunakan variabel kontrol dan setelah menggunakan variabel kontrol untuk melihat keterkaitan murni dari transfer pemerintah untuk perlindungan sosial pada rata-rata rokok yang dikonsumsi.

1. Variabel Ekonomi

Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah jenis bantuan program perlindungan sosial yang dimiliki dan jumlah ART yang tidak bekerja. Program perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk dari transfer pemerintah pada penduduk

miskin. Perlindungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi penerimaan bantuan langsung tunai dalam enam bulan terakhir (BLT), pembelian/penerimaan raskin/rastra dalam tiga bulan terakhir (RASKIN), serta penerimaan bantuan siswa miskin dalam setahun terakhir (BSM). Selain itu, jumlah ART yang tidak bekerja dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan beban yang terdapat dalam rumah tangga miskin.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, jumlah bantuan program perlindungan sosial yang dimiliki rumah tangga miskin secara statistik memengaruhi rata-rata rokok yang dikonsumsi selama sebulan terakhir oleh KRT rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan terakhir pada rumah tangga miskin yang mendapatkan transfer pemerintah (program perlindungan sosial) atau tidak. Rata-rata rokok yang dikonsumsi pada KRT rumah tangga miskin akan meningkat seiring dengan jumlah perlindungan sosial yang dimiliki (Tabel 2). Hal ini diduga berkaitan dengan perilaku (*moral hazard*) dari KRT dalam mengalokasikan pengeluaran mereka untuk tetap mengkonsumsi rokok daripada mengalokasikan kelebihan pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lainnya.

Tabel 2. Penduga Parameter dan P-Value Regresi Linier Berganda Setelah Menggunakan Variabel Kontrol

Nama Variabel	β	Sig.
(1)	(2)	(3)
Konstanta	25,794	0,000
Jumlah jenis bantuan	0,944	0,004
Jumlah ART perokok	30,844	0,000
Umur	-0,515	0,000
Jumlah ART tidak bekerja	1,146	0,000
Bekerja	7,977	0,000
Daerah tempat tinggal	-0,202	0,724
Pendidikan tinggi	-5,459	0,032
Pendidikan menengah	0,410	0,595

Sumber: Susenas 2016, diolah

Hasil penelitian ini sejalan dengan John dkk. (2011) yang juga menyebutkan bahwa rumah tangga berpendapatan menengah atau rendah seringkali mengalokasikan pengeluaran makanan untuk konsumsi rokok. Selain itu, Kurniati (2016) juga menyebutkan bahwa sifat rokok yang adiktif membuat konsumen lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk pengeluaran rokok dibandingkan untuk pengeluaran lain yang lebih penting seperti pangan dan pendidikan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata

rokok yang dikonsumsi KRT rumah tangga miskin memiliki perbedaan secara statistik berdasarkan jumlah ART yang tidak bekerja dalam rumah tangga (Tabel 2). Semakin banyak jumlah ART dalam rumah tangga miskin yang tidak bekerja, semakin besar rata-rata rokok yang dikonsumsi. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak tanggungan dalam rumah tangga, maka semakin besar rata-rata rokok yang dikonsumsi. Inilah yang menjadi salah satu potret kemiskinan di Indonesia. Meskipun mereka memiliki jumlah tanggungan yang besar dalam rumah tangga, tetapi mereka masih tetap untuk mengonsumsi rokok. Hal ini juga berkontribusi pada besarnya sumbangan konsumsi rokok dalam pembentukan Garis Kemiskinan, yaitu terbesar kedua setelah beras (BPS, 2017; BPS, 2016b; BPS, 2016c; BPS, 2015b).

Selain itu, Reynolds dan Taylor (2005) juga mengemukakan bahwa apa yang melatarbelakangi seseorang untuk merokok cukup beragam, antara lain tuntutan sosial dan tekanan hidup. Misalkan pada perempuan seringkali dituntut untuk bersikap tenang, dalam kesibukan mengurus rumah tangga, menjaga orang tua, melanjutkan pendidikan, dan bekerja. Sedangkan tekanan hidup, dapat dimisalkan ketika hidup dalam kemiskinan diduga dapat memiliki keterkaitan pada perilaku merokok.

2. Variabel Lingkungan Keluarga

Pomerleau, Berman, Gritz, Marks, dan Goeters (1994) menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan keturunan dapat mendorong seseorang untuk merokok. Orang tua atau saudara dapat mendorong keinginan seseorang untuk merokok yaitu dengan memberi contoh dan menciptakan suasana bahwa merokok bukanlah hal yang buruk dan perokok dapat diterima secara sosial.

Variabel lingkungan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan jumlah ART merokok dalam rumah tangga miskin. Dengan menggunakan regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan secara statistik pada jumlah rokok yang dikonsumsi antara jumlah ART yang berbeda. Hal yang menarik adalah rata-rata rokok yang dikonsumsi seseorang akan bertambah setiap penambahan jumlah ART yang merokok dalam rumah tangga miskin. Semakin banyak anggota keluarga yang merokok, maka semakin meningkat juga jumlah rokok yang dikonsumsi (Tabel 2). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smet dkk. (1999) di Semarang yang menunjukkan variabel lingkungan merupakan variabel yang sangat berpengaruh.

3. Variabel Karakteristik Individu

Pindyck dan Rubinfeld (2014) menjelaskan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi perilaku konsumen adalah variabel selera. Untuk mendekati variabel selera, maka penelitian ini menggunakan variabel karakteristik individu seperti umur, pendidikan, status pekerjaan, dan daerah tempat tinggal.

Umur

Umur merupakan salah satu indikator dalam menentukan kedewasaan seseorang untuk menimbang baik dan buruk dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Saeed, Tawfik, dan Khan (1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan merokok di usia yang muda, yaitu dengan memulainya pada usia 11-15 tahun dan kemudian melanjutkannya. Selain itu, Hosseinpoor dkk. (2011) serta Rani, Bonu, Jha, Nguyen, dan Jamjoum (2003) juga menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk dengan pendapatan menengah, probabilitas untuk merokok terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya umur hingga mencapai 50 tahun dan setelahnya mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik umur KRT memiliki keterkaitan pada rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu selama sebulan yang lalu (Tabel 2). Rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu selama sebulan yang lalu akan berkurang setiap penambahan umur KRT.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan sebagai komponen yang dapat meningkatkan kualitas manusia memiliki peranan penting pada keputusan KRT untuk merokok. Sugiharti dkk. (2015) menyatakan bahwa perilaku merokok berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil kecenderungan individu untuk merokok. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, mudahnya akses ke fasilitas kesehatan, serta lebih mengenal dengan budaya *saving*.

Dalam penelitian ini pendidikan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu maksimal tamat SD atau sederajat (pendidikan rendah), tamat SMP atau sederajat dan tamat SMA atau sederajat (pendidikan menengah), serta minimal tamat Diploma (pendidikan tinggi). Pendidikan rendah merupakan kategori referensi atau pembandingan dalam penelitian ini. Dengan regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pendidikan signifikan secara statistik memengaruhi konsumsi rokok KRT rumah tangga miskin. Rata-rata konsumsi rokok pada KRT berbeda berdasarkan tingkat pendidikan. KRT dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki konsumsi rokok yang lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata konsumsi rokok pada KRT dengan pendidikan rendah. Namun demikian, rata-rata konsumsi rokok pada KRT dengan tingkat pendidikan menengah tidak berbeda dengan rata-rata konsumsi rokok pada KRT dengan tingkat pendidikan rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani dkk. (2013) di India yang menunjukkan individu dengan pendidikan tinggi memiliki rata-rata konsumsi rokok lebih sedikit dibandingkan dengan individu yang berpendidikan rendah (Tabel 2).

Status Pekerjaan

Variabel status pekerja dalam penelitian ini dibedakan menjadi bekerja dan tidak bekerja. KRT yang dikategori bekerja merupakan KRT yang seminggu yang lalu melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh pendapatan dan/atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan paling sedikit dilakukan selama satu jam. Individu yang memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan lainnya juga dikategorikan dalam bekerja.

Berdasarkan regresi linear berganda, status pekerjaan signifikan secara statistik memengaruhi rata-rata rokok yang dikonsumsi KRT rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata rokok yang dikonsumsi baik pada KRT rumah tangga miskin yang bekerja maupun yang tidak bekerja. KRT yang bekerja memiliki rata-rata konsumsi rokok yang lebih banyak dibandingkan dengan KRT yang tidak bekerja (Tabel 2). Dengan bekerja KRT akan mendapatkan pendapatan yang berupa *labor income*. Ketika KRT tidak bekerja maka konsumsinya dapat dibiayai oleh *non labor income* dan transfer. *Non labor income* diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh tanpa ada proses *earning* seperti hasil sewa dan bunga. Sedangkan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak luar seperti pemerintah atau kerabat baik berupa uang maupun barang. Ketika pendapatan bukan *labor income* diasumsikan konstan, dengan bekerja maka seseorang akan mendapatkan *labor income* dan akan memiliki keterkaitan pada perilaku konsumsi, begitu juga dengan perilaku konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki rumah tangga miskin, semakin besar rata-rata rokok yang dikonsumsi (Sari, Syahnur, & Seftarita, 2017).

Daerah Tempat Tinggal

Faktor kewilayahan dalam penelitian ini menggunakan variabel daerah tempat tinggal yang dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah perdesaan dan perkotaan. Persentase penduduk miskin umumnya berada di daerah perdesaan. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar unit analisis dalam penelitian ini tinggal di perdesaan.

Dilihat dari segi kuantitas rokok yang dikonsumsi, berdasarkan hasil regresi linear berganda, penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara statistik pada rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu pada rumah tangga miskin yang tinggal di perdesaan dan perkotaan (Tabel 2). Hal ini telah mengonfirmasi hasil tabulasi silang yang menunjukkan bahwa persentase KRT yang merokok atau tidak merokok tidak berbeda secara statistik. Hasil ini didukung oleh David, Esson, Perucic, dan Fitzpatrick (2010) yang menyebutkan bahwa pada negara berkembang umumnya rokok dijual dengan harga per batang. Dengan demikian, kondisi ini akan mempermudah rumah tangga miskin untuk mendapatkan rokok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, KRT dalam rumah tangga miskin dalam penelitian ini memiliki karakteristik seperti menerima paling tidak satu jenis bantuan program perlindungan sosial, terdapat ART lain yang merokok, berpendidikan menengah dan rendah, laki-laki, bekerja, dan tinggal di daerah perdesaan.

Variabel ekonomi seperti jumlah bantuan program perlindungan sosial yang dimiliki dan jumlah ART yang tidak bekerja memiliki keterkaitan pada rata-rata rokok yang dikonsumsi per minggu dalam sebulan yang lalu. Semakin banyak jumlah bantuan program perlindungan sosial yang dimiliki rumah tangga miskin, semakin banyak rata-rata rokok yang dikonsumsi KRT. Begitu juga dengan jumlah ART yang tidak bekerja, semakin banyak tanggungan dalam rumah tangga miskin tersebut, maka semakin banyak rata-rata rokok yang dikonsumsi. Variabel lingkungan yang didekati dengan jumlah ART yang merokok dalam rumah tangga miskin secara statistik memengaruhi rata-rata rokok yang dikonsumsi KRT dalam rumah tangga miskin. Semakin banyak jumlah ART yang merokok semakin banyak rata-rata rokok yang dikonsumsi KRT rumah tangga miskin.

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel karakteristik individu yang memiliki keterkaitan pada

rata-rata rokok yang dikonsumsi KRT dalam rumah tangga miskin adalah umur, tingkat pendidikan, status pekerja, dan daerah tempat tinggal. Semakin bertambahnya umur KRT rata-rata rokok yang dikonsumsi semakin berkurang. Selain itu, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KRT dengan pendidikan tinggi memiliki rata-rata konsumsi rokok yang lebih sedikit dibandingkan dengan KRT dengan pendidikan rendah dan menengah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa KRT yang bekerja memiliki rata-rata konsumsi rokok yang lebih banyak dibandingkan dengan KRT yang tidak bekerja.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu aspek dalam data dan aspek dalam metode analisis. Aspek dalam data adalah meliputi keterbatasan dalam data Susenas yang dikumpulkan oleh BPS. Keterbatasan tersebut meliputi tidak dapat mencantumkan jenis dan merk rokok secara spesifik. Sedangkan dari aspek metode analisis, penelitian ini menggunakan analisis data tahun 2016 (data potong lintang atau *cross-section data*) sehingga data diasumsikan tidak mengalami perubahan. Namun demikian, penggunaan *cross-section data* berpotensi bias dalam analisis dikarenakan variabel didalamnya memiliki kemungkinan berubah sepanjang waktu sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan keterkaitan atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Sedgwick, 2014). Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data panel agar diperoleh hasil yang komprehensif.

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah membatasi penerima bantuan dengan mengkhususkan pada rumah tangga berpendapatan rendah yang tidak merokok agar transfer yang diberikan pemerintah dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan peningkatan *human capital* seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi bahwa mengonsumsi rokok memiliki dampak yang negatif pada masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan pada pendidikan kesehatan dan pendidikan agama. Selain itu, peningkatan akses pendidikan individu dalam rumah tangga miskin juga perlu dilakukan agar memiliki pendidikan minimal Diploma.
3. Jika data tersedia, dalam penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel harga rokok sesuai

dengan jenis rokok yang dikonsumsi serta pendapatan. Penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan data yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. (1990). *Ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anggreani, D. Arifin, T & Farisi, A. R. (2013). *Faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan rokok kretek di kota Parepare* (Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, Indonesia).
- Armour, B. S., Pitts, M. M., & Lee, C.-W. (2008). Cigarette Smoking and Food Insecurity among Low-Income Families in the United States, 2001. *American Journal of Health Promotion*, 22(6), 386-390. doi: 10.4278/ajhp.22.6.386
- Atmawikarta, A. (2009). *Investasi Kesehatan untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia September 2016 No.05/01/Th. XX, 3 Januari 2017. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016a). *Pedoman Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016b). Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2016 No.66/07/Th. XIX, 18 Juli 2016. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016c). Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan September 2015 Indonesia No.05/01/Th. XIX, 4 Januari 2016. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015a). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015b). Berita resmi statistik profil kemiskinan Indonesia Maret 2015 No.86/09/Th. XVIII, 15 September 2015. Jakarta: BPS RI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: BAPPENAS RI.
- David, A., Esson, K., Perucic, A. M., & Fitzpatrick, C. (2010). Tobacco use: Equity and social determinants. In Kurup, A. S. and Blas, E. (Eds.) *Equity, social determinants and public health programmes* (pp. 199). Geneva: World

Health Organization.

- Efroymson, D., Ahmed, S., Townsend, J., Alam, S. M., Dey, A. R., Saha, R., . . . Rahman, O. (2001). Hungry for tobacco: an analysis of the economic impact of tobacco consumption on the poor in Bangladesh. *Tobacco Control*, 10(3), 212-217. doi: 10.1136/tc.10.3.212
- Gordon, L. J. (1950). *Economics for consumers*. USA, American Book Company.
- Harahap, A. M. (2003). *Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi rokok individu model sampel selection* (Tesis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).
- Hosseinpour, A. R., Parker, L. A., Tursan d'Espaignet, E., & Chatterji, S. (2011). Social Determinants of Smoking in Low- and Middle-Income Countries: Results from the World Health Survey. *PLoS ONE*, 6(5), e20331. doi: 10.1371/journal.pone.0020331
- John, R. M., Ross, H., & Blecher, E. (2012). Tobacco expenditure and its implications for household resource allocation in Cambodia. *Tobacco Control*, 21(3), 341. doi: 10.1136/tc.2010.042598
- Kurniati, K. (2016). *Pengaruh status merokok ibu terhadap pengeluaran kesehatan dan pendidikan Rumah tangga di Indonesia* (Tesis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).
- Lee, R., dan Mason, A. (2011). *Population aging and the generational economy. A Global Perspective*. Edward Elgar Publishing, Northampton, Massachusetts.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2014). *Mikroekonomi. Edisi 8*. Pearson education, Inc, edisi Bahasa Indonesia. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Pomerleau, C.S., Berman, B. A., Gritz, E.R., Marks, J.L., & Goeters, S.. (1994). *Why women smoke*. Totowa, NJ: Humana Press Inc.
- Rani, M., Bonu, S., Jha, P., Nguyen, S. N., & Jamjoum, L. (2003). Tobacco use in India: prevalence and predictors of smoking and chewing in a national cross sectional household survey. *Tobacco Control*, 12(4), e4. doi: 10.1136/tc.12.4.e4
- Reynolds, W., & Taylor, J.. (2005). *Why women smoke*. Aware Press: Canada.
- Sari, H. Syahnur, S & Seftarita, C. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Saeed, A. A., Khoja, T. A., & Khan, S. B. (1996). Smoking behaviour and attitudes among adult Saudi nationals in Riyadh City, Saudi Arabia. *Tobacco Control*, 5(3), 215. doi: 10.1136/tc.5.3.215
- Sedgwick, P. (2014). Cross Sectional Studies: Advantages and Disadvantages. *BMJ (Online)*, 348(March), 1–2. doi: 10.1136/bmj.g2276
- Smet, B., Maes, L., De Clercq, L., Haryanti, K., & Winarno, R. D. (1999). Determinants of smoking behaviour among adolescents in Semarang, Indonesia. *Tobacco Control*, 8(2), 186. doi: 10.1136/tc.8.2.186
- Sugiharti, L. Sukartini, N. M, & Handriana, T. (2015). Konsumsi rokok berdasarkan karakteristik individu di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. (2015). *Economic development (12th Edition)*. London: Pearson Education, Inc.
- Townsend, J. (1996). *Price and consumption of tobacco*. British edical Bulletin 52 (1): Applied Economics, 19(2): 355-65.
- World Bank. (2017) dalam <https://data.worldbank.org/indicator/SH.PRVS.MOK.FE?locations=ID&view=chart>

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PENGETAHUAN PENDUDUK TERHADAP PETA KAWASAN RAWAN BENCANA DAN MITIGASI BENCANA MERAPI

(PEOPLE'S KNOWLEDGE ON HAZARD MAP AND MERAPI HAZARD MITIGATION)

Laksmi Rachmawati

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Kependudukan-LIPI)

Korespondensi penulis: rachmawati.laksmi@gmail.com

Abstract

The risk of volcanic disasters is increasing over time due to population growth and the increase of settlements around volcanoes. In addition, the centres of economic growth and infrastructure development around this area also further increase the vulnerability of the population living around of the volcano. The choice to live around volcanoes should be followed by knowledge on hazard, hazard zone and the alert status of a volcano as part of the early warning system platform. However, in reality, the understanding of hazard-prone areas and hazard maps is still limited. This paper aims to examine the knowledge of people living around of Merapi on Hazard map (peta Kawasan Rawan Bencana – KRB) and the understanding of hazard-prone areas in Merapi related to mitigation efforts. In addition, to communicate risk by paying attention to the Living in harmony with environment approach are also examined, to provide a complete understanding of the knowledge of hazard map and early warning systems. Data collection was conducted in 2012 and 2014 by using qualitative approach (interviews, focus group discussions and observations) and using quantitative approach (survey of 600 respondents which distributed evenly in the KRB III-I and outside of KRB areas). The findings of the research at Merapi showed that 54 per cent of respondents know about disaster-prone areas. In addition, from respondents who knew about disaster-prone areas, only 49 per cent had seen maps of hazard map (KRB). Changes to the KRB map due to changes in the naming of zoning and 2010 eruption events are indicated to be a factor in the limitations of understanding disaster-prone areas. In addition, information dissemination and public perceptions of areas considered safe are also other factors discussed in this paper. Therefore a more effective risk communication strategy, which integrates spatial early warning (KRB map), Merapi alert status and traditional acceptance of early warning becomes a necessity for Merapi disaster mitigation.

Keywords : *hazard map, people's knowledge, volcanic hazard mitigation, risk communication.*

Abstrak

Risiko bencana erupsi gunung api makin meningkat dari waktu ke waktu akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat dan bermukim di sekitar gunung api. Selain itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah ini juga makin meningkatkan kerentanan penduduk akan bencana erupsi gunung api. Pilihan untuk tetap tinggal di sekitar gunung api seharusnya diikuti pula dengan pengetahuan akan bencana yang direfleksikan pada pengetahuan kawasan rawan bencana (KRB) dan status gunung api sebagai bagian dari peringatan dini. Namun, pada kenyataannya pemahaman akan kawasan rawan bencana dan peta bencana masih terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi terhadap peta kawasan rawan bencana dan pemahaman akan kawasan rawan bencana di Merapi terkait dengan upaya mitigasi. Selain itu, upaya untuk mengkomunikasikan risiko dengan memperhatikan pendekatan *Living in harmony with environment* juga dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh akan pengetahuan peta rawan bencana dan sistem peringatan dini yang merupakan salah satu kegiatan mitigasi penduduk. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2012 dan 2014 dengan pendekatan kualitatif (wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi) dan pendekatan kuantitatif (survei pada 600 responden yang tersebar merata di wilayah KRB III-I dan luar KRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54 persen responden mengetahui tentang kawasan rawan bencana. Selain itu, dari responden yang tahu tentang kawasan rawan bencana, hanya 49 persen yang pernah melihat peta kawasan rawan bencana (KRB). Perubahan peta KRB akibat perubahan penamaan zonasi dan kejadian erupsi 2010 diindikasikan menjadi salah satu faktor keterbatasan pemahaman kawasan rawan bencana. Selain itu, sosialisasi informasi dan persepsi masyarakat akan kawasan yang dianggap aman juga menjadi faktor lain yang didiskusikan dalam artikel ini. Oleh karena itu strategi komunikasi risiko yang lebih efektif, dan mengintegrasikan peringatan dini secara spasial (peta KRB) dan status Merapi serta penerimaan akan peringatan dini secara tradisional menjadi sebuah keharusan untuk mitigasi bencana Merapi.

Kata kunci : *peta rawan bencana, pengetahuan penduduk, mitigasi bencana gunung api, komunikasi risiko*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di Lingkaran Api -*Ring of Fire* menghadapi risiko yang besar akan bencana gunung api (Hinga, 2015; Sigurdsson, Houghton, McNutt, Rymer & Stix, 2015). Terdapat hampir 130 gunung api yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (Lavigne dkk, 2008). Selain itu sejarah juga telah mencatat erupsi-erupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Hinga (2015) menyebutkan beberapa erupsi seperti Gunung Api Toba yang terjadi lebih dari 74.000 tahun yang lalu dengan VEI (*Volcanic Explosivity Index*¹) sekitar 8,8, letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 dengan VEI sebesar 7 dan Gunung Krakatau Krakatau yang meletus tahun 1883 dengan VEI 6.

Letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan letusan yang besar dengan tingkat VEI sebesar 4, yang menyamai letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1872 (Hartmann, 1934 dalam Surono dkk, 2012). Sebagai sebuah gunung yang paling aktif dan mematikan, gunung Merapi yang terletak di tengah dua provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, memiliki risiko yang tinggi mengingat banyak penduduk yang masih tetap tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi. Selain itu jumlah penduduk di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang cukup besar, sekitar 41² persen dari keseluruhan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan hal penting yang harus diperhitungkan.

Tilling (2013) menyebutkan bahwa risiko gunung api akan makin meningkat dari masa ke masa disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang makin pesat dan pemukiman yang makin padat yang berada di sekitar gunung api. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah ini juga makin meningkatkan kerentanan penduduk akan bencana gunung api. Kawasan rawan bencana yang berada di sekitar gunung api idealnya menjadi kawasan terbatas yang tidak dapat ditinggali, namun demikian banyak faktor yang berpengaruh seperti sosial, ekonomi, politik, budaya maupun kondisi

individual membuat masyarakat tetap tinggal di daerah bahaya tersebut (Crosweller & Wilmshurst, 2013).

Untuk mengurangi risiko bencana gunung api (*Volcanic Risk Reduction*) dilakukan berbagai upaya. Selain meningkatkan upaya keakuratan penilaian kegiatan vulkanik oleh para ahli gunung api, upaya untuk membangun komunikasi risiko bagi pengambil kebijakan dan masyarakat juga menjadi agenda utama untuk pengurangan risiko gunung api (Barclay dkk, 2008; Hill, Sparks & Rougier, 2013) Pengetahuan akan kawasan rawan bencana merupakan bagian dari upaya memahami bencana, risiko dan sistem peringatan dini sebagai salah satu hal penting untuk meningkatkan kapasitas penduduk yang diperlukan untuk pengurangan risiko bencana (Andreastuti, dkk, 2017). Hal ini terkait dengan asumsi, bahwa mereka yang memutuskan tinggal di kawasan rawan bencana seharusnya memahami dan dapat melakukan upaya mitigasi sesuai dengan kondisi risiko bencana yang sesuai dengan lokasi masing-masing.

Peta bencana selama ini dianggap sebagai salah satu alat yang efektif untuk mensosialisasikan informasi terkait dengan bencana tersebut kepada publik. Haynes, Barclay & Pidgeon (2007) menyebutkan untuk gunung berapi, peta memberi petunjuk dimana daerah yang memiliki potensi bencana tertentu dibandingkan dengan daerah yang lain, seperti terhadap bencana awan panas dan lahar. Namun demikian, Newhall (2000) menyebutkan bahwa walaupun peta merupakan alat yang dipergunakan dalam pengurangan risiko gunung berapi, namun peta terkadang bersifat terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh pemakainya sebagai bagian dari ‘*warning*’ pada pengurangan risiko gunung berapi (Newhall 2000)

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian “Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Gunung Merapi” yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2014³ yang mengkaji bagaimana persepsi risiko penduduk dan *stakeholder* terhadap erupsi Gunung Merapi. Selain persepsi risiko, komunikasi risiko yang terbangun di antara *stakeholder* dan penduduk yang ada di sekitar Gunung Merapi juga menjadi fokus penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ternyata pemahaman penduduk tentang peta bencana masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini mencoba mengkaji pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar

¹ Indeks yang dipergunakan untuk mengukur magnitude erupsi adalah Volcanic Explosivity Index (VEI). Semakin tinggi angka VEI semakin besar erupsi yang terjadi (Pyle, 2000)

² Penduduk Kota Yogyakarta tercatat sebesar 412.437 dan penduduk Kabupaten Sleman sebesar 1.058.368 diunduh dari

<http://kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik> , tanggal 25 Desember 2018.

³ . Penelitian “ Persepsi dan Komunikasi Risiko Bencana Gunung Api, Gempa/Tsunami dan Banjir” berada pada skema Penelitian Kompetitif Kebencanaan dan Lingkungan, Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI tahun 2012-2014 dengan anggota Fitranita, Herry Yogaswara, Ulil Amri dan Ade Latifa.

Gunung Merapi terhadap peta kawasan rawan bencana dan pemahaman akan kawasan rawan bencana di Gunung Merapi terkait dengan upaya mitigasi. Sosialisasi risiko bencana sebagai upaya komunikasi risiko dan pendekatan *Living in harmony* yang mengintegrasikan sistem peringatan dini juga dikaji untuk memberikan pemahaman yang utuh akan pengetahuan peta rawan bencana dan kegiatan mitigasi penduduk.

METODE

Lokasi penelitian berada di sebelah Selatan Gunung Merapi yang termasuk dalam wilayah KRB dan luar KRB di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April- Mei tahun 2012 dan bulan Oktober 2014. Pada tahun 2012 dilakukan kegiatan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan pada tahun 2014, selain dilakukan pengumpulan data secara kualitatif, selain itu juga dilakukan diseminasi hasil penelitian tahun 2012.

Data kualitatif dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD-*focus group discussion*) dan observasi. Data yang dikumpulkan dengan memakai pendekatan ini terdiri dari pengalaman kejadian erupsi 2010, pengetahuan akan kawasan rawan bencana dan persepsi risiko. Wawancara dilakukan pada penduduk lokal, pemimpin formal maupun informal, *stakeholder* pemerintah (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappeda), BPPTKG-PVMBG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), akademisi (Universitas Gadjah Mada/ UGM dan Universitas Pembangunan Nasional/ UPN), LSM dan Media. Diskusi kelompok terfokus pada kelompok masyarakat di tingkat lokal dan *stakeholder* tingkat provinsi dilakukan pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2014, selain dilakukan wawancara mendalam, juga dilakukan diskusi kelompok terfokus pada *stakeholder* pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten dan desa.

Data pengetahuan penduduk akan peta rawan bencana berasal dari hasil survei yang disebar pada 600 responden yang tersebar pada 30 dusun yang berada di sebelah Selatan Merapi yang berada pada KRB III, II, I dan diluar KRB. Keempat wilayah rawan bencana ini diambil untuk melihat apakah ada perbedaan pada persepsi risiko, mitigasi yang dilakukan dan pengetahuan peta rawan bencana antara penduduk yang tinggal di tiap KRB. Dua metode sampling diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu (i) Metode

stratified random sampling untuk dusun-dusun yang masuk wilayah KRB dan (ii) Metode *purposive sampling* untuk dusun-dusun diluar KRB dengan mempertimbangkan jarak dengan sungai (sebagai tempat aliran lahar). Metode *stratified random sampling* dipakai untuk menjamin tersebarnya responden secara merata pada setiap wilayah KRB. Lebih lanjut, untuk setiap dusun, penentuan sampel pada tingkat rumah tangga ditentukan secara random.

GUNUNG MERAPI : SEJARAH ERUPSI DAN PETA BENCANA

Gunung Merapi yang secara harfiah berarti gunung yang berapi merupakan salah satu gunung api teraktif di dunia, bahkan menurut Crandell dkk (1984) dalam Thouret dkk. (2000) Gunung Merapi memiliki beberapa karakteristik sebagai gunung api paling berbahaya di dunia. Menurut Voight, Constantine, Siswowidjyo, & Torley. (2000), salah satu karakter yang dianggap berbeda antara Gunung Merapi dengan gunung api lainnya adalah hampir separuh letusan yang pernah terjadi disertai dengan *nuees ardante*⁴ dan sebagian besar erupsi tipe ini menimbulkan korban jiwa. Tipe letusan Gunung Merapi yang berbeda dengan gunung api lainnya membuat para vulkanolog mengkategorikan tipe letusan ini sebagai “*Merapi type nuee*”⁵ (Voight dkk., 2000)

Dalam tulisannya tentang sejarah Gunung Merapi, Voight dkk. (2000) memaparkan sejarah erupsi Gunung Merapi. Tabel 1 di bawah ini merupakan ringkasan dari tabel 2 pada artikel Voight dkk. (2000) yang menjelaskan sejarah erupsi pada tahun 1768-1998. Kebanyakan arah *wedus gembel* pada data sejarah erupsi Voight dkk. (2000) adalah menuju Utara, Barat dan Barat Laut dengan jarak lebih dari 5 km. Arah *pyroclastic flow* yang menuju ke arah Barat Daya dan Selatan dengan jarak 5-10 km dijumpai pada tahun erupsi 1994 (arah Kali Boyong), 1942 dan 1913 (arah Kali Gendol) dan 1904, 1939, 1961, 1942 (arah Kali Woro).

Para ahli gunung api yakin bahwa peta bencana merupakan salah satu alat utama untuk mengkomunikasikan risiko bencana gunung api pada publik (Haynes, Barclay da& Pidgeon, 2008). Selain

⁴ *pyroclastic flow*/ awan panas/ wedus gembel. Dalam tulisan ini istilah – istilah ini akan dipergunakan bergantian

⁵ Tipe letusan Merapi ini erupsi didahului dengan pembentukan kubah lava di kawah gunung lewat erupsi-erupsi kecil (*effusive*). Dengan makin membesarnya kubah lava, maka karena pengaruh gravitasi, kubah lava gugur, yang menyebabkan terjadinya *nuees ardante*/ *wedus gembel*

itu, Sparks, Aspinall, Crosweller & Hincks (2013) menambahkan bahwa peta bencana sejak tahun 1970 secara global telah menjadi alat komunikasi utama dalam vulkanologi. Dalam pembuatan *warning* dalam skala spasial, data sejarah letusan gunung api tersebut ditransformasi menjadi sebuah peta kawasan rawan bencana (KRB), untuk memperlihatkan daerah yang memiliki probabilitas lebih tinggi mengalami kejadian bencana tertentu seperti abu vulkanik, aliran lava, *wedus gembel* (*pyroclastic flow*) maupun lahar (Calder, Wagner & Ogburn, 2015). Peta bencana secara teknis memuat distribusi bencana, tingkat risiko daerah terdampak, kemungkinan fenomena erupsi (komponen spasial) dengan mempergunakan analisa geologi dan geomorfologi, catatan sejarah erupsi sebelumnya dan modeling probabilitas (Haynes, Barclay & Pidgeon, 2007; Thouret dkk, 2000). Peta bencana akan berubah sesuai dengan kondisi gunung api misal setelah kejadian erupsi. Menurut Thouret dkk (2000) peta bencana erupsi biasanya dibuat berdasarkan data sejarah *pyroclastic flow* selama 100 tahun.

Hasil wawancara dengan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) yang berada di bawah naungan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada Bulan Mei 2012, menjelaskan bahwa :

“....Peta itu sebenarnya adalah bentuk peringatan dini dalam dimensi

ruang...Peringatan dini itu ada dua, satu dalam dimensi ruang dan satu dalam dimensi waktu. Kalau dimensi waktu ya peringatan dini bertahap mulai dari ...normal sampai awas. Kalau dalam dimensi ruang ..sebenarnya ya peta KRB itu. Artinya ini lho tempat yang rawan karena disini pernah terlanda awan panas, masyarakat harus paham itu. Terlepas bahwa rumah mereka ada di zona KRB III atau bukan, tetap harus disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu...senang atau tidak senang harus tahu ...” (Kepala BPPTKG-PVMBG, Mei 2012)

Peta memiliki peran penting sebagai pemberi peringatan secara spasial, sebagai penyedia informasi peringatan dini secara jangka panjang (Rougier, 2013). Oleh karena itu, peta kawasan rawan bencana (KRB) merupakan referensi krusial dalam perencanaan pembangunan terutama untuk pembangunan infrastruktur dan wilayah permukiman penduduk. PVMBG sebagai lembaga yang melakukan monitoring gunung api, memiliki kewenangan untuk mempublikasikan peta bencana. Hasil penilaian yang diterbitkan dalam bentuk peta rawan bencana memiliki landasan hukum sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana yaitu sesuai dengan UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (pasal 32 tentang penetapan daerah rawan bencana) dan UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Tabel 1. Ringkasan Kejadian Erupsi Gunung Merapi 1768-2010

Tahun	Jumlah erupsi	Volcanic Explosivity Index (VEI)*	Keterangan
1800- 1850	4	-	-
1850-1900	11	1872 VEI = 4	Pada erupsi 1872, jumlah korban meninggal 200 orang; <i>pyroclastic flow</i> mengalir sejauh 11 km ke arah Blongkeng, Woro, Gendol
1900-1950	14	1930-1931 VEI=3	Jumlah korban meninggal 1.369 orang. <i>Wedus gembel</i> mengalir sejauh 12 km ke arah Senowo, Blongkeng, Kali Putih
1950-1960	3	-	-
1960-1970	3	1961 VEI =3	-
1970-1980	3	-	-
1980-1990	1	-	-
1990- 2000	3	1994 Turgo VEI = 2	Jumlah korban meninggal 43 orang. <i>Wedus gembel</i> mengenai Dusun Turgo dan wilayah sekitar Kali Boyong
2000- 2010 [#]	2	2006 Kaliadem VEI = 2	Jumlah korban meninggal 2 orang, <i>wedus gembel</i> mengenai wilayah bunker Kaliadem
		2010 VEI = 4	Jumlah korban meninggal 275 orang. <i>Wedus gembel</i> mengalir sejauh 17 km, di Kali Gendol

Sumber: Voight dkk (2000)

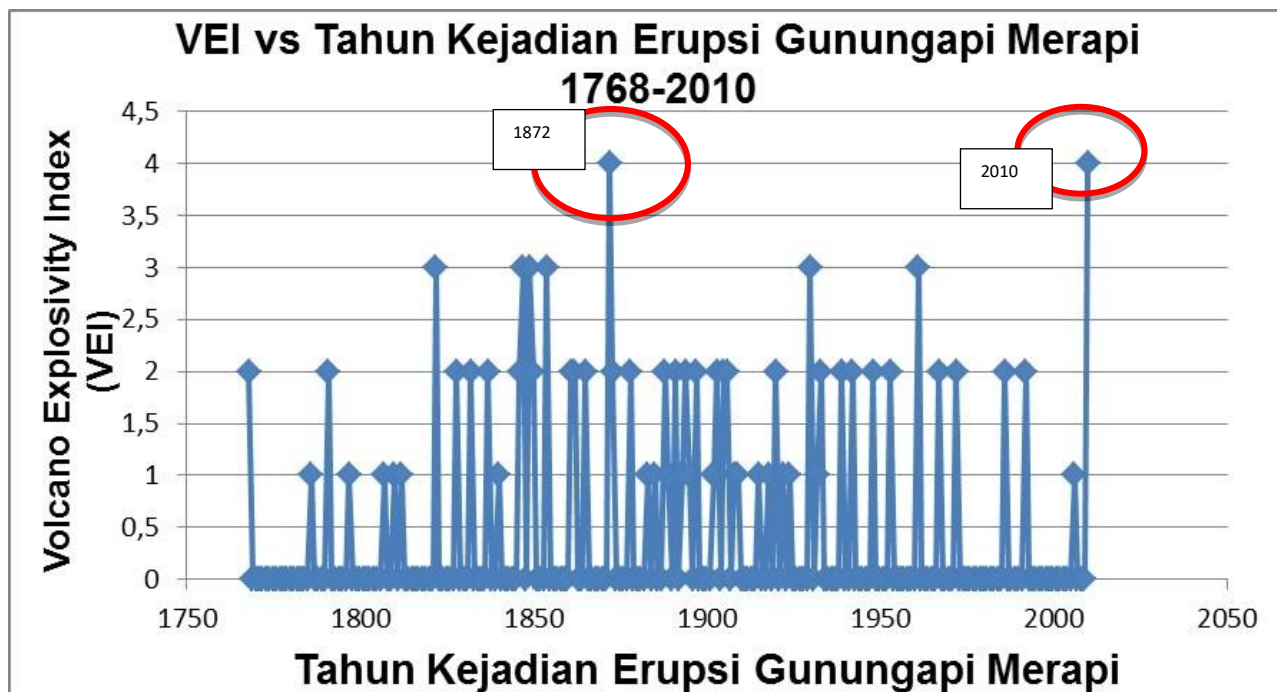
* Tahun yang tidak dituliskan rata-rata memiliki VEI =2

[#] periode 2000-2010 ditambahkan oleh penulis berdasarkan Surono dkk (2012)

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 memiliki VEI sebesar 4 (Surono, 2012) yang sama dengan erupsi tahun 1872 (Voight, 2000) .

Gambar 1 memperlihatkan besarnya erupsi Merapi yang dinyatakan dengan *Volcano Explosivity Indeks*

(VEI) – magnitude besarnya erupsi.

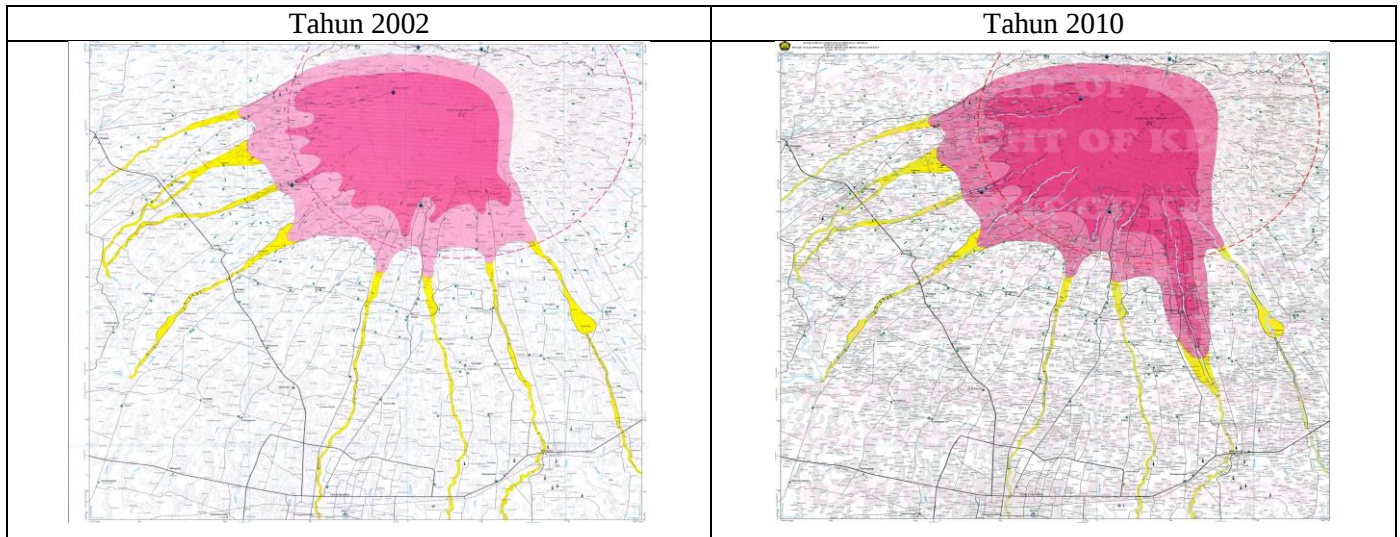


Sumber: Voight (2000) dalam Marfai dkk (2012)

Gambar 1. VEI vs Tahun Kejadian Erupsi Gunungapi Merapi 1768-2010

Untuk pertama kali peta bencana Gunung Merapi dipublikasikan pada tahun 1978, dengan hanya melihat pada dua kali kejadian erupsi yaitu erupsi tahun 1930 dan 1978 saja (Thouret dkk, 2000), dengan aliran awan panas yang mencapai 10-15 km pada arah Barat dan Barat Daya. Biasanya peta bencana diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dengan merujuk pada data empiris kejadian erupsi 100 tahun sebelumnya. Namun untuk peta tahun 1978 hanya mengambil basis dua kejadian erupsi saja. Peta bencana akan berubah apabila dalam kurun waktu 100 tahun terjadi erupsi yang tidak sama polanya dengan pola-pola sebelumnya. Apabila erupsi yang terjadi masih berada di sekitar wilayah yang terkena erupsi dari kejadian sebelumnya, biasanya peta bencana tidak akan berubah (Thouret dkk, 2000). Namun apabila kejadian erupsi cukup hebat dan wilayah terdampak berubah, maka akan dipublikasikan peta bencana yang baru seperti setelah kejadian erupsi Merapi 2010 (Jenkins dkk, 2016). Peta bencana tahun 2002 direvisi menjadi peta

2010 yang dipublikasikan pada tahun 2012. Pada peta bencana tahun 2002 arah aliran wedus gembel yang lebih banyak ke arah Barat dan Barat Daya Merapi terutama di Kali Kuning dan Kali Putih. Peta KRB II010 memperlihatkan bagaimana erupsi 2010 telah mengubah bentuk peta dengan penambahan luas wilayah terutama KRB III dan KRB II, di sekitar Kali Gendol. Sebagian wilayah KRB II pada peta tahun 2002 berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya karena terkena awan panas – KRB III pada peta tahun 2012. Sebagai contoh dari lima desa yang ada di Kecamatan Cangkringan (Desa Wukirsari, Argomulyo, Glagaharjo Kepuharjo dan Umbulharjo), hampir seluruh wilayah yang ada di Desa Kepuharjo menjadi wilayah KRB III setelah erupsi 2010. Demikian pula dengan Desa Glagaharjo dan Desa Umbulharjo menjadi wilayah yang masuk dalam KRB III. Perubahan bentuk kawasan rawan bencana dapat dilihat pada peta 1 berikut.



Sumber: BPPTKG-PVMBG

Gambar 2. Peta Kawasan Rawan Bencana Tahun 2002 dan 2010

Erupsi 2010 telah mengubah dusun-dusun yang berada di sekitar Kali Gendol yang dikategorikan sebagai KRB III dan KRB II. Pada peta 2002, kawasan KRB III berada pada radius kurang dari 5 km. Selain itu menurut Lavigne (2000) maksimum jarak KRB II berada pada radius 15 km dengan merujuk pada aliran awan panas pada erupsi 1930, 1961 dan 1969. Oleh karena itu, tempat-tempat pengungsian dibangun oleh pemerintah pada radius 5 km untuk mengantisipasi pengungsi dari KRB III. Namun demikian, pada erupsi 2010, wilayah yang terkena *pyroclastic flow* melebihi 15 km - mencapai hampir 17 km di aliran Kali Gendol, setelah sebelumnya pemerintah menetapkan 20 km sebagai radius yang harus dikosongkan.

KRB III merupakan kawasan yang paling berbahaya karena berisiko terkena awan panas, gas, abu vulkanik, namun memiliki risiko yang relatif lebih kecil untuk ancaman lahar. Wilayah KRB II, merupakan wilayah dengan warna pink muda merupakan wilayah yang memiliki risiko relatif lebih kecil dari bahaya awan panas, namun probabilitas tinggi akan bencana lahar. KRB I merupakan wilayah dengan probabilitas tinggi terkena ancaman lahar. Penamaan zonasi dengan KRB III-I dilakukan pada peta 2002. Peta sebelumnya yang dipublikasi tahun 1978 mempergunakan istilah yang berbeda. Tabel 2 memperlihatkan perbandingan penamaan pada peta KRB 1978 dan peta KRB 2002. Walau penamaan zonasi berbeda, namun risiko bencana yang potensial mengenai masing-masing KRB relatif sama.

Tabel 2. Perubahan Penamaan Zonasi wilayah Bahaya dalam Peta KRB

Peta KRB I978*	Peta KRB 2002	Risiko Bencana
Daerah Terlarang (<i>Forbidden area</i>)	KRB III	Awan panas, gas, lava, material vulkanik – termasuk batu-batuan dan abu (<i>tephra fall</i>)
Kawasan rawan bencana 1 (<i>First danger zone</i>)	KRB II	Kemungkinan kecil akan awan panas, lava, lahar, abu dan batu-batuan
Kawasan rawan bencana 2 (<i>Second danger zone</i>)	KRB I	Lahar

*Bersumber dari artikel Thouret dkk (2000)

Risiko yang muncul dari erupsi Gunung Merapi tidak hanya dapat dilihat dari kondisi fisik gunung, namun juga pada jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan rawan bencana Merapi. Berdasarkan Thouret

dkk (2000), jumlah penduduk yang tercatat pada peta bencana yang dipublikasi sebelum tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah, kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang berisiko tinggal di sekitar Merapi, 1976-1995

	Jumlah desa	Luas (km ²)	Penduduk		Kepadatan penduduk	Pertumbuhan penduduk (% 1990-1995)
			1976	1995		
Ketinggian > 200 m	296	949	-	1.083.400	1399	3.6
Ketinggian > 500 m	89	374.5	-	258.200	690	3
Daerah terlarang (<i>Forbidden zone</i>) → kemudian menjadi KRB III	32	186.4	40.800 (20%)	79.100 (26%)	424	3.9
KRB I (<i>First danger zone</i>) → kemudian menjadi KRB II	37	100.8	72.600 (35%)	114.800 (38%)	1139	3.6
KRB II (<i>Second danger zone</i>) → kemudian menjadi KRB I	-	-	93.200 (45%)	110.000 (36%)	-	-
Total	296	949	206.600	1.083.400	1139	3.6

Sumber : Thouret dkk (2000)

Terlihat peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dari tahun 1976 ke tahun 1995 terutama pada KRB III dan KRB II. Tercatat pada tahun 1976, jumlah penduduk di wilayah rawan bencana Merapi adalah sebesar 206.600 jiwa. Jumlah penduduk kemudian meningkat lebih dari lima kali pada tahun 1995 sebesar 1.083.400. Apabila dilihat secara spesifik untuk setiap wilayah KRB, peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi di wilayah KRB III. Pada tahun 1976, persentase penduduk yang tinggal di KRB III adalah sebesar 40.800 (20 persen) dan meningkat menjadi 79.100 (26 persen) pada tahun 1995. Peningkatan persentase yang lebih kecil terjadi di KRB II, bahkan menurun secara persentase pada KRB

I. Data terakhir, dalam Widodo, Nugroho dan Asteria (2017) menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS 2010 jumlah penduduk sebelum kejadian erupsi 2010 yang berada di kawasan KRB III mencapai 100 ribu dan penduduk di KRB II sebesar 140 ribu jiwa.

PENDUDUK DAN PENGETAHUAN TENTANG PETA KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)

Dengan 600 kuesioner yang disebarkan di berbagai kawasan rawan bencana (KRB III, II, I) dan di luar KRB, menunjukkan karakteristik demografis sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Demografi Responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan yang ditamatkan

Jenis Kelamin		Umur		Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	
Laki-laki	47%	>60 tahun	21 %	Universitas	12 %
Perempuan	53%	50-59 tahun	21 %	SMA	42 %
		40-49 tahun	24 %	SMP	17 %
		30-39 tahun	21 %	SD	29 %
		<30 tahun	13 %		

Sumber: Survei Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Merapi, PPK-LIPI, 2012

Responden perempuan lebih banyak sekitar 6 persen dari responden laki-laki. Apabila dilihat distribusi usia hampir seimbang, hanya untuk responden kurang dari 30 tahun lebih kecil dari kelompok umur lainnya.

Dilihat dari tingkat pendidikan, Mayoritas menamatkan SMA sebanyak 42 persen, diikuti oleh tamatan SD (29 persen), SMP (17 persen) dan Universitas (12 persen).

Tabel 5. Kegiatan seminggu yang lalu dan pekerjaan yang dilakukan

Kegiatan seminggu yang lalu (N=600)		Pekerjaan (N=384)	
Bekerja	64%	Petani	38 %
Pelajar	2 %	Pedagang	14 %
Ibu Rumah Tangga	26%	Pegawai	17 %
Pengangguran/ Mencari kerja	4 %	Guru	7 %
Lainnya	4 %	Buruh	14 %
		Penambang Pasir	4 %
		Lainnya	6 %

Sumber: Survei Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Merapi, PPK-LIPI, 2012

Dari tabel 5, terlihat bahwa pada tahun 2012, 64 persen responden yang bekerja, hampir 42 persennya bekerja di wilayah Merapi sebagai petani (38 persen) dan penambang pasir (4 persen). Pekerjaan-pekerjaan ini sangat tergantung pada kondisi lingkungan Merapi. Ketergantungan pada lingkungan Merapi terkadang membuat masyarakat beranggapan bahwa keuntungan tinggal di sekitar Merapi lebih besar daripada biaya yang harus dihadapi karena bencana. Kondisi ini membuat penduduk merasa aman untuk tetap tinggal di wilayah sekitar Merapi.

Pengetahuan penduduk yang tinggal dekat dengan Merapi terhadap peta rawan bencana sangat terbatas. Beberapa kejadian yang menunjukkan indikasi ini diantaranya adalah:

- Pada saat peneliti bertanya pada sekelompok perempuan pada salah satu kegiatan diskusi kelompok terfokus tentang lokasi KRB tempat tinggal mereka . Seorang perempuan menjawab dan menyebutkan bahwa mereka tinggal di KRB 5. Jawaban ini mengindikasikan ketidakbiasaan (*unfamiliarity*) mereka terhadap peta dan istilah yang ada pada peta kawasan rawan bencana.
- Pada saat peneliti mewawancarai seorang kepala dusun dan menanyakan apakah memiliki peta bencana tahun 2010. Dia menjawab bahwa dia memiliki peta tersebut. Pada saat kepala dusun ini

memperlihatkan peta yang dimaksud, ternyata peta masih utuh terbungkus plastik. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang ada di peta terkait dengan kawasan rawan bencana belum pernah disosialisasikan pada warga dusun tersebut.

- Di salah satu kantor desa, masih dipasang peta bencana tahun 2002. Seharusnya peta terbaru terkait dengan kawasan rawan bencana yang dipajang. Desa ini yang sebelumnya berada di KRB II, kemudian berubah pada tahun 2010 menjadi KRB III (daerah paling berbahaya)

Hasil dari survei mengkonfirmasi beberapa temuan di atas. Hampir separuh dari responden tidak mengerti istilah kawasan rawan bencana (46 persen). Apabila dilihat dari distribusi jawaban responden pada masing-masing wilayah KRB, terlihat bahwa responden yang mengerti bahwa mereka tinggal di kawasan rawan bencana di bawah 60 persen untuk masing-masing lokasi. Hanya 55 persen dari responden yang tinggal di wilayah KRB III yang tahu bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana, bahkan relatif sedikit lebih rendah dari responden di KRB II (57 persen). Temuan penting dari pertanyaan ini adalah 45 persen responden yang tinggal di KRB III ternyata tidak mengetahui kalau mereka tinggal di kawasan rawan bencana, hal ini patut menjadi perhatian terkait dengan mitigasi bencana.

Tabel 6. Pengetahuan akan Kawasan Rawan Bencana

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	N (Persentase)
Pengetahuan akan Kawasan Rawan Bencana (N=600)	Ya	324 (54%)
	Tidak	276 (46%)
Responden yang menjawab ya (N=324) di masing-masing lokasi KRB	KRB III	125 (55%)
	KRB II	49 (57%)
	KRB I	79 (54%)
	Diluar wilayah KRB	71 (52%)

Sumber: Survei Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Merapi, PPK-LIPI, 2012

Untuk melihat apakah responden pernah melihat peta KRB, pertanyaan lanjutan diberikan pada responden yang menjawab ya. Dari 324 responden yang menjawab tahu bahwa mereka tinggal di kawasan rawan bencana, ternyata yang pernah melihat peta

KRB hanya sebesar 49 persen, sisanya (51 persen/ 166 responden) belum pernah melihat peta KRB. Apabila dilihat lebih detil, ternyata 47 persen responden di KRB III belum pernah melihat peta KRB.

Tabel 7. Pernah Melihat akan Peta Kawasan Rawan Bencana (*Hazard Map*)

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	N (Persentase)
Pernah melihat peta KRB (N=324)	Ya	158 (49%)
	Tidak	166 (51%)
Responden yang menjawab tidak (N=166) di masing-masing lokasi KRB	KRB III	58 (47%)
	KRB II	19 (39%)
	KRB I	51 (65%)
	Diluar wilayah KRB	38 (54%)

Sumber: Survei Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Merapi, PPK-LIPI, 2012

Secara kualitatif, dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion- FGD*) dengan kelompok ibu-ibu menyebutkan bahwa mereka pernah melihat peta KRB secara tidak sengaja di salah satu

kantor lembaga kemanusiaan yang ada di dekat tempat relokasi. Namun demikian, mereka menganggap perlu ada sosialisasi tentang peta tersebut agar pemahaman masyarakat tentang KRB tepat.

T : Kalau disini termasuk KRB berapa?

Ibu 1 : Ngga tahu..

Ibu 2 : 12an..

T : Ohh km 12? KRB nya KRB berapa?

Ibu 1 : 2 atau 3 ya. Itulah yang perlu, harusnya kan tahu semua ya, tapi kalau tanpa ada pengarahan atau sosialisasi dari tahu, juga ya tahunya cuma cari sendiri saja.

SOSIALISASI INFORMASI KAWASAN RAWAN BENCANA

Apabila melihat bagaimana perkembangan peta KRB di kawasan Merapi terdapat perubahan yang substansial yang berpengaruh pada pengetahuan masyarakat akan peta KRB yaitu (i) perubahan penamaan zonasi pada peta tahun 1978 menjadi peta tahun 2002; dan (ii) perubahan luas kawasan berbahaya akibat erupsi 2010.

Erupsi tahun 1994 yang mengakibatkan kerusakan di Turgo menjadi titik tolak perubahan persepsi pemerintah maupun penduduk yang tinggal di sekitar dusun ini bahwa ancaman Merapi dapat sewaktu-waktu muncul dan memiliki kemungkinan menuju arah Selatan. Selama ini, wilayah Selatan Merapi dianggap aman dari ancaman Merapi. Penduduk percaya bahwa arah erupsi Merapi tidak akan pernah menuju ke Selatan karena adanya keraton sebagai pelindung. Namun kejadian Turgo sedikit demi sedikit merubah pemahaman ini, oleh karena itu sosialisasi terkait evakuasi dan kegiatan mitigasi lainnya dilakukan setelah kejadian erupsi Turgo yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga

swadaya masyarakat. Seperti disebutkan dalam wawancara dengan Pak T di Turgo (2012).

Salah satu bahan sosialisasi adalah peta rawan bencana, yang pada saat itu masih mempergunakan sistem zonasi sesuai peta 1978 yaitu kawasan terlarang, KRB I dan KRB II. Perubahan istilah zonasi untuk wilayah bahaya ternyata agak membingungkan, terutama untuk zona yang mempergunakan istilah KRB I dan KRB II. Hal ini disebabkan pada sistem zonasi yang baru istilah KRB I dan KRB II masih dipergunakan, namun dengan kondisi tingkat bahaya yang berbeda (berkebalikan). Sebagai contoh pada peta bencana 1978, KRB I merujuk pada wilayah yang memiliki tingkat bahaya sedang (kemungkinan terdampak awan panas dan lahar), namun pada zonasi yang baru KRB I merujuk pada wilayah dengan tingkat bahaya rendah (kemungkinan terdampak lahar). Dari satu wawancara, informan menyebutkan bahwa istilah zonasi terdahulu jauh lebih dipahami daripada istilah yang muncul di peta yang diterbitkan tahun 2002. Selain itu, perubahan penamaan kawasan rawan bencana 1 menjadi KRB II, dan kawasan rawan bencana menjadi KRB I pada peta KRB tahun 2002,

membuat banyak penduduk yang mengalami kebingungan.

“dulu itu kan disini ini masuk kawasan rawan bencana 1, tapi katanya berubah istilahnya...menjadi KRB berapa gitu...saya tidak terlalu tahu pasti... (Pak T, Mei 2012)

Selain perubahan istilah zonasi, kejadian erupsi 2010 membuat beberapa dusun di sekitar wilayah Kali Gendol yang semula berada di KRB II dan KRB I meningkat status zonasi nya menjadi masuk ke dalam wilayah KRB III. Tentu saja dengan adanya perubahan zona ini, diharapkan penduduk Merapi yang tinggal di sekitar Merapi mengetahuinya mengingat risiko yang makin besar apabila masuk dalam KRB III. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi yang tepat ke

penduduk di sekitar Merapi sehingga pengetahuan tentang kawasan rawan bencana dapat dimiliki oleh penduduk terkait dengan upaya mitigasi yang harus dilakukan di masing-masing kawasan rawan bencana.

Upaya untuk mengkomunikasikan risiko yang telah dilakukan selama ini lewat penyuluhan dan wajib latih. Hasil survei menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mendapatkan penyuluhan dan ikut dalam kegiatan wajib latih relatif lebih banyak setelah kejadian erupsi 2010. Untuk penyuluhan sebelum 2010 hanya 18 persen responden yang mengaku mendapatkan penyuluhan dan setelah erupsi 2010 terdapat 24 persen. Begitu pula dengan kegiatan wajib latih, hanya 12 persen responden yang ikut terlibat dalam wajib latih, dan setelah erupsi 2010 terdapat 15 persen

Tabel 8 . Keterlibatan Responden dengan kegiatan penyuluhan dan wajib latih.

	Penyuluhan (N=600)		Wajib Latih (N=600)		
	Sebelum kejadian erupsi 2010 (%)	Setelah kejadian erupsi 2010 (%)	Sebelum kejadian erupsi 2010 (%)	Setelah kejadian erupsi 2010 (%)	
Ya	18	24	12	15	
Tidak	82	76	88	85	

Sumber: Survei Persepsi Risiko dan Komunikasi Risiko Merapi, PPK-LIPI, 2012

Penyuluhan yang dilakukan saat terjadi peningkatan status, biasanya dilakukan oleh BPPTKG ke dusun-dusun yang berada dekat dengan kawah Merapi yang merupakan wilayah KRB III termasuk dusun-dusun yang berada di sekitar sungai tempat aliran lahar Merapi. Selain itu, setelah kejadian Turgo 1994, terdapat juga organisasi masyarakat seperti Pasag Merapi yang memberi pendampingan pada masyarakat disekitar Merapi, terkait dengan upaya mitigasi bencana Merapi. Upaya untuk pengurangan sumber daya pada saat harus mengungsi, termasuk bagaimana proses mengungsi yang aman merupakan salah satu materi yang disosialisasikan pada masyarakat. Selain itu, penyuluhan maupun wajib latih juga dipergunakan untuk membangun kesadaran penduduk bahwa Merapi merupakan *permanent hazard*⁶, yang sewaktu-waktu

akan akan memengaruhi penghidupan masyarakat di sekitar Merapi. Jadi apabila penduduk memutuskan tetap tinggal di sekitar gunung, mereka harus paham kapan, bagaimana dan kemana harus mengungsi apabila dibutuhkan.

Dari tabel 8, terlihat terjadi peningkatan keterlibatan responden pada kegiatan penyuluhan dan wajib latih setelah kejadian erupsi 2010. Dari 600 responden, yang menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan sebelum kejadian erupsi 2010 adalah sebesar 18 persen. Setelah kejadian erupsi 2010, terdapat 24 persen dari responden yang menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan. Begitu juga dengan kegiatan wajib latih yang mengalami peningkatan juga, namun dengan tingkat yang lebih kecil yaitu dari 12 persen menjadi 15 persen. Namun demikian, masih terdapat berbagai kesulitan dalam pelaksanaan dan penyebarluasannya. Dalam sebuah diskusi kelompok terfokus, seorang peserta menyebutkan bahwa pelatihan yang didesain sebagai *training for trainer* (TOT), dilakukan dan dihadiri oleh perwakilan dari dusun atau desa, tidak semua penduduk dilibatkan. Namun menurut mereka cara ini tidak efektif mengingat keterbatasan peserta.

⁶ Istilah *permanent hazard* pada terbitan WMO (2006) untuk kasus gunung api lebih mengacu pada skala frekuensi kejadian bencana. Dalam publikasi ini *permanent hazard* merupakan kejadian bencana yang frekuensi nya cukup sering, dalam hitungan tahun (p.38). Namun dalam penelitian tahun 2012 dan 2014, banyak informan yang menyebutkan Merapi sebagai *permanent hazard* namun lebih ditujukan pada posisi Merapi yang berada di sekitar tempat hidup masyarakat di sekitar Merapi. Sehingga memberikan risiko yang tetap, namun sesuai dengan kondisi peringatan gunung api.

Ibu S : Saya memang pernah ikut, tapi kan banyak yang ngga ikut, bukan perwakilan perwakilan saja. Mereka juga menyampaikan kalau misalnya saya sama bu R ikut ya, terus mau menyampaikan caranya kan kalau dia ngga lihat langsung kan juga susah.

Ibu R : Harus semua ngrasain..merasakan bagaimana caranya, seperti itu.

Ibu T : Ngga cuma ngene-ngene..gitu kan masih gimana ya, tapi kalau dipraktekkan itu otomatis kan dia kan lebih tahu, lebih yakin gitu lho. Ohh aku harus seperti itu. (Mei 2012)

Informasi terkait dengan upaya mitigasi bencana gunung api termasuk informasi tentang kawasan rawan bencana dan peta KRB tidak dapat diketahui oleh semua orang karena jumlah peserta pelatihan yang terbatas. upaya sosialisasi diharapkan dapat disebarluaskan pada seluruh anggota masyarakat mengingat perlunya secara langsung masyarakat memahami upaya mitigasi yang harus dilakukan.

PERSEPSI MASYARAKAT AKAN WILAYAH AMAN DAN BERBAHAYA

Terbatasnya pengetahuan akan kawasan rawan bencana dan peta yang didapat dari penelitian diantaranya disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap kawasan sekitar Merapi bukan kawasan yang berbahaya. Penduduk yang tinggal di sekitar Merapi, terutama yang paling dekat dengan kawah menganggap Merapi merupakan hal yang penting bagi kehidupan mereka. Penduduk di sekitar lereng Merapi mencoba membangun keseimbangan, harmoni dengan alam (Sasongko, 2010). Kalaupun Merapi memang berada di dekat dengan mereka, tapi bukanlah ancaman buat mereka karena kesejahteraan juga dihasilkan di lokasi tersebut. Bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya, Merapi bukan hanya merupakan ancaman bagi kehidupan mereka, namun juga merupakan kesempatan / *opportunities* yang memberi berkah kehidupan. Kesuburan tanah yang didapat sebagai dampak dari erupsi memberikan hasil yang bagus untuk pertanian dan ternak. Selain itu kegiatan penambangan pasir dan pariwisata yang berkembang sebagai dampak erupsi Merapi juga menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Merapi. Penduduk secara eksplisit memberi arti risiko tinggal di lereng Merapi tidak hanya secara negatif namun juga secara positif. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka tetap bertahan tinggal di daerah rawan bencana- dalam hal ini KRB III terutama di daerah yang terdampak langsung erupsi 2010. Dove (2008)

menunjukkan bahwa upaya semacam ini disebut sebagai upaya *naturalising, familiarising and "domesticating" the threat from volcano* – upaya untuk menginternalisasi risiko yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuat penduduk lokal mengembangkan pengetahuan lokal terkait dengan mitigasi bencana Lavigne dkk (2008).

Selain itu, untuk penduduk di sisi Selatan, mereka memiliki kepercayaan bahwa tinggal di sekitar Merapi akan tetap aman karena adanya Keraton Kesultanan Yogyakarta berada di sebelah Selatan Gunung Merapi. Penduduk percaya bahwa arah erupsi (*wedhus gembel*) tidak akan pernah mengarah ke Selatan karena keraton merupakan pelindung mereka. Selain itu, Sultan Yogyakarta telah menunjuk seorang juru kunci untuk menjaga Merapi. Kepercayaan pada pengaruh Sultan dan keraton pada kehidupan masyarakat di sekitar Merapi makin menguatkan masyarakat untuk mempersepsikan bahwa wilayah tempat tinggal mereka adalah wilayah yang aman (Triyoga, 2010). Walaupun kepercayaan-kepercayaan ini hanya akan membangun perasaan keamanan yang 'semu'. Apabila dilihat dari data empiris sejarah erupsi kebetulan memang arah erupsi kebanyakan tidak mengarah ke Selatan tapi ke Barat dan Utara. Namun demikian, kejadian erupsi Turgo 1994 membuka mata bahwa wilayah Selatan juga memiliki kemungkinan menjadi wilayah terdampak langsung oleh erupsi.

Upaya relokasi selain pada tahun 2010 juga pernah dilakukan untuk penduduk Turgo setelah erupsi tahun 1994, dengan memindahkan sebagian penduduk menjauh dari Gunung Merapi dan bahkan sebagian juga pindah sebagai transmigran ke luar Jawa. Namun demikian, upaya ini tidak berhasil, mereka tetap kembali pada lokasi mereka tinggal sebelumnya. Seperti kondisi di Turgo, untuk dusun-dusun yang terkena dampak langsung awan panas pada erupsi 2010, wilayah ini seharusnya dikosongkan dan penduduk pindah ke lokasi yang telah disediakan pemerintah sebagai hunian tetap (huntap). Namun sampai saat ini masih ada beberapa dusun yang penduduknya bersikeras untuk menolak pindah. Mereka beragumen bahwa selama kondisi Gunung Merapi aman, mereka akan tetap aman tinggal di daerah tersebut. Namun apabila Gunung Merapi sedang bergejolak, bila diperlukan penduduk harus segera mengungsi. Pendekatan seperti ini oleh Buergelt dkk (2017) disebutkan sebagai implementasi konsep *Living in harmony with environment*, yang membuka peluang peningkatan kapasitas adaptasi penduduk. Implementasi pendekatan ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi

penduduk agar mereka harus dapat mengambil keputusan yang tepat terkait mitigasi bencana, oleh karena itu peningkatan kapasitas adaptasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai contoh salah satu kegiatan yang mungkin dapat dilakukan adalah adanya integrasi sistem peringatan dini secara saintifik dan yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, mereka membutuhkan adanya jaringan komunikasi yang dapat selalu memonitor kondisi Gunung Merapi. Jaringan komunikasi yang berkembang kebanyakan mempergunakan radio HT (*handie talkie*) maupun radio komunitas di sekitar Gunung Merapi, sehingga semua penduduk dapat memonitor kondisi Gunung Merapi secara *real time*. Dengan HT, warga dapat memonitor suara seismik dari stasiun monitoring BPPTKG dan meng *update* kondisi Merapi dari informasi-informasi lain. Selain itu BPPTKG juga memberikan informasi seperti dengan CCTV lewat home page yang dapat diakses oleh semua orang. Di sisi lain, sistem peringatan dini secara tradisional juga tetap diterima sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian penduduk sekitar Gunung Merapi.

Pilihan untuk menetap di kawasan rawan bencana mensyaratkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat pada saat kejadian bencana. Perlu adanya informasi yang jelas akan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk di dusun tersebut. Selain itu rencana untuk menghadapi kejadian bencana, yang dalam manajemen bencana disebut sebagai rencana kontijensi, mulai dibangun di tiap-tiap dusun. Sebagai bagian dari mitigasi bencana, pembuatan rencana kontijensi krusial. Hal ini dikarenakan dalam rencana kontijensi selain dilakukan inventarisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk merespons atau mengantisipasi kejadian bencana, juga dibuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan bencana. Dengan jumlah penduduk yang makin meningkat, rencana kontijensi menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan pada level komunitas/ dusun. Salah satu yang dipersiapkan dalam rencana kontijensi adalah alur peta untuk mengungsi, titik kumpul maupun orang yang bertanggung jawab pada tugas-tugas tertentu. Upaya pembuatan peta pada tingkat yang lebih kecil, dalam hal ini dusun merupakan upaya untuk memberi pemahaman pada penduduk bahwa wilayah mereka merupakan kawasan rawan bencana.

KESIMPULAN

Peta bencana merupakan salah satu instrumen yang penting untuk mengkomunikasikan risiko bencana gunung api, sebagai alat peringatan dini – *early warning* akan kondisi bencana. Namun demikian

pada kenyataannya masih terdapat gap antara pengetahuan penduduk terhadap peta KRB. Temuan penelitian di tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya 54 persen dari responden di Gunung Merapi yang tahu tentang kawasan rawan bencana dan dari kelompok ini hanya 49 persen yang pernah melihat peta KRB Gunung Merapi.

Untuk meningkatkan pengetahuan akan kawasan rawan bencana dan peta KRB diperlukan adanya komunikasi risiko yang efektif untuk memberi pemahaman kepada penduduk yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Dengan mengedepankan dialog antara saintis (dalam hal ini BPPTKG-PVMBG), pemerintah dan masyarakat, komunikasi risiko akan menjadi proses yang bersifat iteratif untuk membangun pemahaman akan kawasan rawan bencana. Dalam proses yang bersifat iteratif ini, penilaian terhadap bencana yang dilakukan secara saintifik juga memberi ruang bagi penduduk lokal untuk mempergunakan pengetahuan lokal - menerjemahkan kondisi alam. Dengan adanya dialog yang cair, maka penyuluhan, pelatihan dan wajib latih dapat diformulasikan dalam metode yang lebih baik agar mendapatkan hasil optimal.

Pengetahuan akan kawasan rawan bencana mungkin dapat ditingkatkan penduduk melihat secara langsung peta KRB. Ilustrasi zonasi dengan mempergunakan warna tertentu akan mempermudah pemahaman masyarakat akan lokasi tempat tinggal mereka berada di wilayah KRB tertentu. Dan bila memungkinkan perbandingan antara peta bencana terbaru dan sebelumnya akan membuat pemahaman yang lebih baik bagi penduduk, termasuk bagian yang menjelaskan perbedaan istilah zonasi. Selain itu, upaya untuk menerjemahkan peta menjadi dalam lingkup yang lebih kecil seperti tingkat dusun, menjadi lebih implementatif untuk membangun rencana kontijensi untuk tiap dusun.

Selain itu, pendekatan *Living in Harmony* mencoba mengakomodasi kondisi masyarakat yang tetap tinggal di sekitar gunung api. Namun demikian, pilihan hidup yang berisiko ini harus diimbangi dengan pemahaman akan kondisi bahaya gunung termasuk tanda-tanda yang harus diwaspadai sebagai penanda masyarakat perlu melakukan aksi menyelamatkan jiwa seperti evakuasi. Oleh karena itu, perlu untuk memformulasikan komunikasi risiko yang lebih efektif mengingat bahwa untuk memahami persepsi dan pengetahuan tentang bencana harus terintegrasi dengan pemahaman konstruksi risiko secara sosial. Komunikasi risiko merupakan integrasi antara peringatan dini secara spasial (peta KRB) dan berdasarkan waktu (status Gunung Merapi) penting

dipahami masyarakat. Komunikasi risiko yang efektif penting untuk dibangun mengingat penduduk yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi makin meningkat jumlahnya sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi seperti penambangan pasir dan wisata yang merupakan penghidupan masyarakat lokal juga banyak ditemui di wilayah lereng Gunung Merapi. Oleh karena itu upaya mitigasi bencana yang dibangun dengan komunikasi risiko yang efektif diharapkan akan dapat menyelamatkan banyak jiwa penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreastuti, S., Paripurno, ET., Gunawan, H., Budianto, A., Syahbana, D., & Pallister, J. (2018). Character of community response to volcanic crises at Sinabung and Kelud Volcanoes. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*. available online 20 February 2017, In Press, Corrected Proof. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2017.01.022
- Barclay, J., Haynes, K., Mitchell, T., Somana, C., Teeuw, R., Darnell, A., Crosweller, H.S., Cole, P., Pyle, D., Lowe, C., Fearnley, C., & Kelman, I. (2008) *Framing volcanic risk communication within disaster risk reduction: finding ways for the social and physical sciences to work together*, Geological Society, London, Special Publication 305(1) : 163-177, Geological Society of London.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2011). *Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Buergelt, P.T., Paton, D., Sithole, B., Sangha, K., Praadaraos PSDV; Campion, L & Campion, J. (2017). *Living in Harmony with Our Environment: A Paradigm Shift* in Paton, D., & Johnston, D.M. (Eds.) *Disaster Resilience : An Integrated Approach* (2nd Ed) pp 289-307. Springfield: Charles C. Thomas.
- Crandell, D.R., Booth, B., Kusumadinata, K., Shimozuru, D., Walker, G.P.L., & Westercamp, D. (1984). *Sourcebook for Volcanic Hazard Zonation*, UNESCO Paris, 97pp.
- Crosweller, H.S., & Wilmshurst, J. (2013). *Natural hazards and risk: the human perspective*. In Rougier, JC; Sparks, R.S.J., & Hill, L.J. (eds) *Risk and Uncertainty assessment for natural hazards*, Cambridge University Press
- Dove, M.R. (2008). *Perception of volcanic eruption as agent of change on Merapi volcano, Central Java*, *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 172 (2008) 329–337. Sciencedirect-Elsevier. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2007.12.037
- Hartmann, M.A. (1934). *Der grosse Ausbruch des Vulkanes G Merapi (Mittel-Java) im Jahre 1872*. *Natuurk, Tijdschr. Ned. Indie* 94, 189-210
- Haynes, K., Barclay, J., & Pidgeon, N. (2007). Volcanic Hazard Communication using map: an evaluation of their effectiveness. *Bulletin Volcanology* 70 (2), 123-138. Springer-Verlag. doi: 10.1007/s00445-007-0124-7
- Haynes, K., Barclay, J & Pidgeon, N. (2008). *Whose Reality Counts? Factors Affecting the Perception of Volcanic Risk*, *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 172: 259-272. Sciencedirect-Elsevier
- Hill, L.J., Sparks, R.S.J., & Rougier, J.C. (2013). *Risk Assessment and Uncertainty in natural hazards*. In Rougier, J.C., Sparks, R.S.J & Hill, L.J., (Eds) *Risk and Uncertainty assessment for natural hazards*, Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139047562
- Hinga, B.D.R. (2015). *Ring of Fire: an encyclopedia of the Pacific Rim's earthquakes, tsunami and volcanoes*. California: ABC-CLIO
- Jenkins, S.F., Komorowski, J.C., Baxter, P.J., Charbonnier, S.J., Cholik, N & Surono. (2016). *The Devastating Impact of the 2010 Eruption of Merapi Volcano, Indonesia*. In Duarte, J.C., & Schellart, W.P. (Eds) *Plate Boundaries and Natural Hazards, Geophysical Monograph* 219, American Geophysical Union, John Wiley & Sons, Inc. doi:10.1002/9781119054146.ch12
- Lavigne, F., De Coster, B., Juvin, N., Flohic, F., Gaillard, J.C., Texier, P., Morin, J., & Sartohadi, J. (2008) *People's Behaviour in the face of volcanic hazards: Perspectives from Javanese Communities, Indonesia*. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 172(3-4) : 273-287. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2007.12.013
- Lavigne, F., Morin, J., Mei, E.T.W., Calder, E.S., Usamah, M., & Nugoho, U. (2017). Mapping Hazard Zones, Rapid Warning Communication and Understanding Communities: Primary Ways to Mitigate Pyroclastic Flow Hazard dalam *Advances in Volcanology*, Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/11157_2016_34
- Marfai, MA., Cahyadi, A., Hadmoko, D.S, Sekaranom, A.B. (2012). Sejarah Letusan Gunung Merapi Berdasarkan Fasies Gunungapi di Daerah Aliran Sungai Bedog, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ris. Geo. Tam* 22 (2) : 73- 79. doi: 14203/risetgeotam2012.v22.59
- Newhall, C. (2000). *Volcano Warnings*. In Sigurdsson, H., Houghton, B., McNut, S., Rymer, H., Stix, J. (Eds) *Encyclopedia of volcanoes (pp 1185-1197)*. New York: Academic press
- Pyle, D. (2000). Sizes of volcanic eruptions. In Sigurdsson, H., Houghton, B., McNut, S., Rymer, H., Stix, J. (Eds) *Encyclopedia of volcanoes (pp 263-270)*. New York: Academic press.

- Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Rymer, H., & Stix, J.(2015). *Encyclopedia of Volcanoes*. San Diego:Academic Press. doi: 10.1016/C2015-0-00175-7
- Sparks, R.S.J., Aspinall, W.P., Crosweller, H.S., & Hincks, T.K. (2013). Risk and uncertainty assessment of volcanic hazards. In Rougier, JC; Sparks, RSJ dan Hill, LJ, (eds) *Risk and Uncertainty assessment for natural hazards*, Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139047562.012
- Surono., Jousset, P., Pallister, J., Boichu, M., Buongiorno, M.F., Budisantoso, A.,...Lavigne,F.(2012). The 2010 explosive eruption of Java's Merapi volcano- a 100 year event. *Journal of Volcanology and Geothermal Research vol 241-242*, 121-135. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2012.06.018
- Tilling, R.I. (2013).Volcanic Hazards and Early Warning dalam Extreme Environmental Events: Complexity in *Forecasting and Early Warning*, Meyers, Robert A. (Ed). Springer
- Thouret, J.C., F. Lavigne, K. Kelfoun, S. Bronto. (2000). Toward a revised hazard assessment at Merapi volcano. Central Java. *Journal of Volcanology and Geothermal Research Vol 100 (1-4)*,479-502. doi: 10.1016/S0377-0273(00)00152-9
- Triyoga, L.S .(2010) .*Merapi dan Orang Jawa: Persepsi dan Kepercayaan*. Grasindo.
- Voight, B., Constantine, E.K., Siswowidjono, S., & Torley, R. (2000). Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia. 1768-1998, *Journal of Volcanology and Geothermal Research Vol 100 (1-4)* : 69-138. doi: 10.1016/S0377-0273(00)00134-7
- Widodo, D.R., Nugroho, S.P., & Asteria, D.(2017). Analisis penyebab masyarakat tetap tinggal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi (Studi di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan 15 (2)* : 135-142. doi: 10.14710/jil.15.2.135-142

PANDUAN PENULISAN

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah diunggah secara daring (online) melalui website <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jki>. Penulis harus login untuk dapat mengunggah naskah tersebut. Pendaftaran secara daring (online) tidak dikenakan biaya apapun.
2. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
3. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
5. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
6. Outline dan isi naskah terdiri dari dua jenis sebagai berikut :

I. Untuk manuskrip yang merupakan hasil kajian literatur menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.
2. **Abstrak** dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, maksud/tujuan artikel, pendekatan dan metode yang digunakan.
4. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
5. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
6. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.

II. Untuk manuskrip yang merupakan hasil penelitian menggunakan outline sebagai berikut :

1. **Judul** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Identitas penulis yang diletakkan di bawah judul meliputi nama dan lembaga penulis serta alamat email.

2. **Abstrak** dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150-200. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
3. **Pendahuluan** yang berisi justifikasi isu yang diangkat dalam artikel, dan maksud/tujuan artikel.
4. **Metodologi** yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan (kuantitatif dan atau kualitatif), model dan variabel yang digunakan serta sumber data yang digunakan. Apabila menggunakan data primer, jelaskan metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan analisa data yang digunakan.
5. **Batang tubuh/inti artikel** berisi kupasan, analisis, argumentasi, dan komparasi penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
6. **Kesimpulan** berisi bahasan tentang hal-hal penting dari temuan. Kesimpulan dapat ditambahkan saran-saran atau rekomendasi berkaitan dengan persoalan yang menjadi temuan.
7. **Tampilan tabel, gambar atau grafik** harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.

III. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)

IV. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Buku

O'Keefe, J. H., Bell, D. S. H., & Wyne, K.L. (2009). *Diabetes essentials*. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Bunga Rampai

Friedman, S. L., & Wachs, T. D. (Editor). (1999). *Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts*. Washington, DC: American Psychological Association.

Electronic Book

De Lara, M., & Doyen, L. (2008). *Sustainable management of natural resources: Mathematical models and methods*. Diakses dari <http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-79073-0>

Ardia, D. (2008). Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models: Theory and applications. doi: 10.1007/978-3-540-78657-3

Bagian dari Buku

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. Dalam A. C. Gaw (Editor), *Culture, ethnicity, and mental illness* (pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Scott, D. (2005). Colonial governmentality. Dalam J. X. Inda (Editor), *Anthropologies of modernity* (pp. 21-49). Diakses dari <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117909832>

Iacono, W. G. (2008). Polygraph testing. Dalam E. Borgida & S. T. Fiske (Editor), *Beyond common sense: Psychological science in the courtroom* (pp. 219-235). doi: 10.1002/9780470696422

Artikel Jurnal

Skenderian, J. J., Siegel, J. T., Crano, W. D., Lac, A., & Alvaro, E. E. (2008). Expectancy change and adolescents' intentions to use marijuana. *Psychology of Addictive Behaviors*, 22, 563-569. doi:10.1037/a0013020

Williams, S., & Beattie, H. J. (in press). Problem-based learning in the clinical setting – a systematic review. *Nurse Education Today*.

Makalah/Artikel Daring

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. *The Practising Midwife*, 11(9), 1-27. Diakses dari <http://www.practisingmidwife.co.uk>

Makalah Seminar

Bowden, F.J., & Fairley, C.K. (1996, June). *Endemic STDs in the Northern Territory: Estimations of effective rates of partner change*. Makalah dipresentasikan pada the Scientific Meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

Laporan

Queensland Health. (2005). *Health systems review. Final report*. Brisbane, Australia: Queensland Government.

Australian Institute of Health and Welfare. (2010). *Child protection Australia 2008-09 (Report No. CWS 35)*. Diakses dari <http://www.aihw.gov.au/publications/cws/35/10859.pdf>

Tesis/Disertasi

Axford, J.C. (2007). *What constitutes success in Pacific island community conserved areas?* (Disertasi, University of Queensland, Brisbane, Australia). Diakses dari <http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747>

Set Data

Pew Hispanic Center. (2004). *Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news*

media [Data file and code book]. Retrieved from <http://pewhispanic.org/datasets/>

Laman dengan Penulis

Atherton, J. (2005). *Behaviour modification*. Retrieved from http://www.learningandteaching.info/learning/behaviour_mod.htm

Winther, M. (2009, January 14). *The unconscious is spirit* [Online forum comment]. Retrieved from <http://groups.google.com/group/alt.psychology.jung/topics?lnk>

Laman tanpa Penulis

Behaviour modification. (2007). Retrieved from <http://www.educational-psychologist.org.uk/behaviour.html>

Manuskrip

Johnson, A. (2008). *Week three: Foucault* [Powerpoint slides]. Unpublished manuscript, BESC1001, University of Queensland, St Lucia, Australia.

7. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia
Herien Puspitawati, Tin Herawati dan Ma'mun Sarma

Minilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia
Amorisa Wiratni

Dinamika Pemakalan Kontrasepsi Modern di Indonesia
(Analisis Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015)
Mario Ekoriato

Determinan Perilaku Kesehatan Ibu pada Masa Kehamilan:
Kasus Kota Medan
Yuly Astuti dan Widayati

Analisis Pemberdayaan Gender di Provinsi Sumatera Barat
Rita Diana

Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang
Fadri Alihar



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 13	No. 1	1-76	Juni 2018	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	------	-----------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214